

**IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN
KABUPATEN BOJONEGORO
DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**TRIAS AYU NOVITASARI
NIM. 105030600111028**

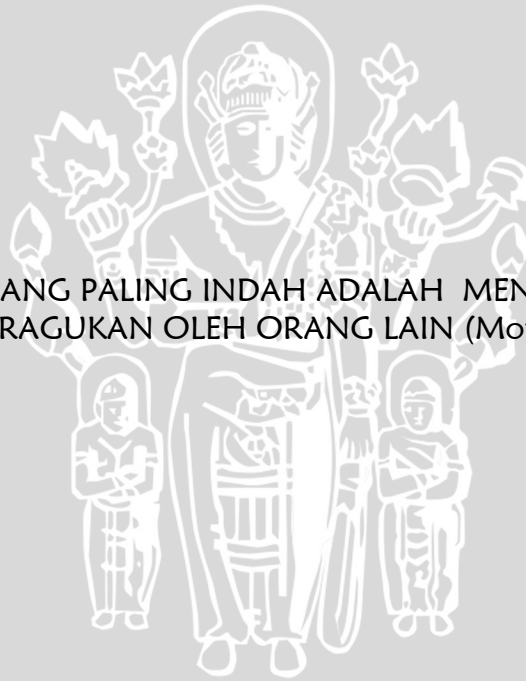


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2014**

MOTTO

TAK ADA KATA UNTUK MENYERAH KARENA SETIAP
INSAN MEMPUYAI (ALLAH SWT) YANG SIAP MEMBANTU
KESULITAN DALAM BENTUK APAPUN ITU!!

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KEBERHASILAN YANG PALING INDAH ADALAH MENCAPAI YANG
TADINYA DIRAGUKAN OLEH ORANG LAIN (Motivasiana)

*TEKAD, HARAPAN, MIMPI, CITA-CITA, dan DO'A ADALAH WUJUD
DARI SEBUAH KEBERHASILAN (Trias Novit)*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro
dan Strategi Pengembangannya

Disusun oleh : Trias Ayu Novitasari

NIM : 105030600111028

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 12 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 10 Juli 2014
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Trias Ayu Novitasari
 Judul : Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro
 dan Strategi Pengembangannya

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing,



Drs. Heru Ribawanto, MS
 NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota Komisi Pembimbing,



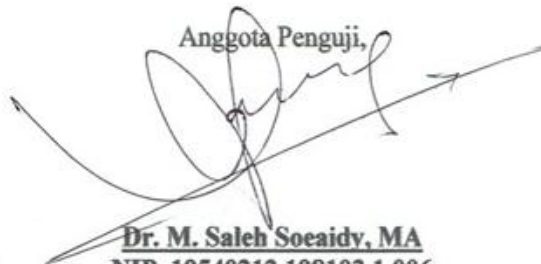
Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 19570911 198503 1 003

Ketua Penguji,



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
 NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota Penguji,



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
 NIP. 19540212 198103 1 006

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N0. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Juni 2014

Mahasiswa



Nama : Trias Ayu Novitasari
NIM : 105030600111028



RINGKASAN

Trias Ayu Novitasari, 2014. **Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dan Strategi Pengembangannya**. Drs. Heru Ribawanto, MS, Dr. Abdullah Said, M.Si, 255 Hal + xx

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah mencapai 230.706 hektar. Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, apalagi pendapatan terbesar terletak pada subsektor migas (minyak bumi dan gas alam). Tak hanya pada subsektor migas saja, Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai potensi sektor dominan di subsektor non migas yang juga perlu untuk dikembangkan dan dioptimalkan secara maksimal agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa dikatakan menjadi unggulan serta mendiskripsikan dan menganalisis strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor paling unggul di Kabupaten Bojonegoro. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan alat bantu analisis LQ (*Locatient Quotient*) yang berguna untuk mengetahui sektor unggulan/ paling unggul, serta indeks gravitasi untuk melihat jarak kedekatan Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten di sekitar Bojonegoro (eks-karasisenan) agar bisa melakukan aglomerasi.

Hasil identifikasi menggunakan metode LQ menunjukkan bahwa di Kabupaten Bojonegoro terdapat 4 sektor unggulan (sektor pertanian, pertambangan & penggalian, bangunan, serta sektor jasa-jasa) dan 5 sektor bukan unggulan (sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan). Sedangkan berdasarkan analisis indeks gravitasi diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban adalah dua daerah yang memiliki keterkaitan kuat sehingga dapat dikembangkan sebagai mitra kerjasama dalam pengembangan sektor unggulan yang menitikberatkan pada sektor pertanian serta pertambangan & penggalian. Strategi pengembangan untuk sektor paling unggul yakni sektor pertambangan khususnya subsektor migas daerah tidak mendapatkan kewenangan untuk mengelola migas sehingga daerah hanya memberikan strategi berupa pemberdayaan masyarakat dan penyertaan dana abadi di Bank Jatim. Sementara pada sektor pertanian khususnya komoditas padi adalah pengembangan padi hibrida; pendampingan petani melalui sekolah lapang; optimalisasi kemanfaatan air bendungan solo melalui pompanisasi berbasis listrik; optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik; gerakan taman dengan menggunakan metode jajar legowo; penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam atau *transplanter* dan alat panen yaitu *powerthresher* dan *combain harvester*.

Kata kunci: potensi daerah, sektor unggulan, strategi pengembangan

SUMMARY

Trias Ayu Novitasari, 2014. **Identification of Leading Sector of Bojonegoro Regency and the Development Strategy**. Drs. Heru Ribawanto, MS, Dr. Abdullah Said, M.Si, 255 Page + xx

Bojonegoro Regency is one of regencies in East Java Province which covers 230.706 hectares of land. Bojonegoro Regency has natural resources as its potency. Moreover, the biggest income is from the oil and gas sub-sector. Still, Bojonegoro Regency also has a potency of dominant sector in the non-oil sub-sector which needs to be developed and optimized correctly so that it can stimulate economic growth and accelerate regional development

The objectives of this study are to describe, to explain, and to analyzed Bojonegoro Regency's leading sector actually and also to describe and analyze regional government's strategy in developing the main leading sector in Bojonegoro Regency. To get the answer, this study uses the *Location Quotient* (LQ) method of analysis to know the leading sector/ main leading sector, and index of gravitation to see the proximity distance of Bojonegoro Regency with the regencies around to help doing the agglomeration.

Identification result using LQ method shows that in Bojonegoro Regency there are 4 leading sectors (agricultural sector, mining and quarrying sector, buildings sector, and services sector) and 5 non-leading sectors (industry and processing; electricity, gas, and clean water; trading, hotels, and restaurants; transport and communication; also financing sector, renting, and service company). Based on the index of gravitation analysis, Bojonegoro Regency and Tuban Regency are two region that have strong connectivity to be developed as a partner in developing leading sector that focus on agricultural sector beside mining and quarrying sector. Development strategy to the most leading sector that is sector especially the oil and gas sub-sector, the regional government does not have the authority to manage it so the regional government gives only strategy such as people empowerment and endowment investments in Jatim Bank. While on mining agricultural sector especially on rice commodity is by developing hybrid rice; assisting farmers through field schools; optimizing the using of Bengawan Solo water through electricity-based pumping; optimizing the land use through movement of organic fertilizer use; garden movement using *jajar legowo* method; application of agricultural mechanization through the use of cropping tool or *transplanter* and harvesting tool such as *powerthresher* and *combain harvester*.

Keywords: regional potency, leading sector, development strategy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Thank to ALLAH SWT..karenaMu aku bisa melalui satu per satu tujuan dari kehidupanku..

Thx so much for Mama,papaku tersayang dan kedua kakakku tercinta yg selalu memberikan do'a, nasehat, serta semangat tiada henti buat aku untuk terus menjadi yang terbaik dlm meraih kesuksesanku #bighug



Makasiie buat sahabat"ku tercinta uda datang di ujian komprehensifku



Sahabat"ku tercinta "ThreeLex" yg slalu bersama" di kampus,hhee, lopeyou n missyou



Bakalan kangen sama kalian semua..temen" PP 2010 ilopeeyoupuull ^_^, Cibikust thx somuch muuah, Myplends Citra mkasii ud nampung selama d sulabayah,,hhe ☺

KATA PENGANTAR

Segala puja-puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi yang penulis buat berjudul **“Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dan Strategi Pengembangannya”**.

Penyusunan Skripsi ini dibuat dalam rangka tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuannya baik secara moril maupun materiil berupa bimbingan, dukungan, dorongan, ataupun do'a baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa semua itu penulisan skripsi ini tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan
4. Bapak Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis
5. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Ketua Komisi Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan pengarahan kepada penulis
6. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, menasehati dan mengarahkan penulis
7. Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini
8. Dr. M. Saleh Soeaidy, MA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini
9. Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu penulis dalam pencarian data migas dan telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis
10. Bapak Dadang Aris Subiantoro, ST selaku Kabid Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro yang telah banyak membantu penulis dalam pencarian data migas dan bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis

11. Bapak Bambang Sutopo, SP, M.AP selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu penulis mendapatkan data pertanian serta sudah meluangkan waktunya dalam wawancara dengan penulis
12. Bapak Rohmat Haryanto, SP, MM selaku Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang telah banyak meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis
13. Kedua orang tuaku (mama_ papaku tersayang) yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti hingga penulis benar-benar mampu menyelesaikan skripsi ini
14. Kakak pertamaku Devi Evalin beserta keluarganya yang juga telah memberikan dukungan moril dan semangat kepada penulis
15. Kakak keduaku Retno Dwi Wijayanti beserta keluarganya yang telah memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis
16. Teman-teman “*ThreeLex*” (Emma dan Firdha), teman-teman kos “*Cibikus*” (Vanda, Silvi, Vero, Luluk, Leni, dan Dek Lia), teman-teman PP’2010 (Nelsy, Tian, dll) dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
17. My friend “Citra Diah Putri” Terimakasih sudah menemani dan memberikan tumpangan kos selama penulis berada di Surabaya
18. Kepada pihak yang belum disebutkan oleh penulis terimakasih banyak atas dukungannya selama ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Juli 2014

Penulis.



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
TANDA PERSETUJUAN
TANDA PENGESAHAN
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASANv
SUMMARYvi
HALAMAN PERSEMBAHANvii
KATA PENGANTAR.....viii
DAFTAR ISI.....xii
DAFTAR TABELxvi
DAFTAR GAMBAR.....xviii
DAFTAR LAMPIRANxix
DAFTAR ISTILAHxx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1
B. Perumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian8
D. Kontribusi Penelitian9
E. Kerangka Pemikiran.....10
F. Sistematika Penulisan14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perencanaan16
 1. Pengertian perencanaan.....16
 2. Pendekatan, dan Tahapan Dalam Perencanaan20
 3. Fungsi, Unsur, dan Syarat Perencanaan23
B. Teori Pembangunan.....26
 1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan26
 2. Berbagai Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Pembangunan Daerah30
 3. Paradigma Pembangunan32
 4. Pengertian Perencanaan Pembangunan36
 5. Ciri-ciri, Unsur-unsur dan Tujuan Perencanaan Pembangunan37
C. Pembangunan Ekonomi Daerah.....40
 1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah40
 2. Beberapa Pendekatan Teori Pembangunan Ekonomi Daerah44
 a) Teori Basis Ekonomi45
 b) Teori Lokasi48
 c) Teori Tempat Sentral48
 d) Teori Kausasi Kumulatif49
 e) Model Daya Tarik49



3. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah.....	50
D. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	54
1. Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	54
2. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah.....	55
3. Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah	56
E. Potensi Daerah dan Sektor Unggulan	58
1. Pengertian Potensi Daerah.....	58
2. Pengertian Sektor Unggulan.....	60
3. Kriteria Sektor Unggulan.....	61
F. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	63
1. Pengertian Produk domestik Regional Bruto	63
2. Kegunaan dan Tujuan PDRB	65
3. Manfaat PDRB	66
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	67
B. Fokus Penelitian	68
C. Lokasi dan Situs Penelitian	70
D. Sumber dan Jenis Data	71
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Instrumen Penelitian.....	75
G. Analisis Data	75
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	83
1. Data Umum Kabupaten Bojonegoro	83
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	83
b. Letak dan Kondisi Geografis.....	84
c. Kondisi Topografi	85
d. Kondisi Hidrologgi	86
e. Kondisi Klimatologi	88
f. Kondisi Penggunaan Lahan	88
g. Keadaan Demografi.....	89
h. Kondisi Perekonomian	92
1) Prdoduk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	92
2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	93
i. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro	94
2. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro	96
a. Tugas Pokok dan Fungsi	96
b. Visi dan Misi	97
3. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro	99
a. Tugas Pokok dan Fungsi	99
b. Visi dan Misi	99

B. Penyajian Data Penelitian	101
1. Potensi Daerah/ Sektor-sektor Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	101
a. Potensi/ Sektor-sektor Perekonomian dalam PDRB	101
b. Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dengan Daerah di Sekitarnya (Eks-Karasidenan)	116
2. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sektor Unggulan	128
a. Strategi Dinas ESDM Dalam Mengembangkan Sektor Pertambangan Khususnya Migas Kabupaten Bojonegoro	128
1. Dasar Hukum dan Latar Belakang Dalam Mengembangkan Migas	128
2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Migas	131
3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Migas	133
4. Perencanaan Strategi Pengembangan Migas	135
5. Strategi Pengembangan Migas	136
6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Migas	143
b. Strategi Dinas Pertanian Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian (Komoditas Padi) Kabupaten Bojonegoro	145
1. Dasar Hukum dan Latar Belakang Dinas Pertanian Dalam Mengembangkan Pertanian (Komoditas Padi)	145
2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)	147
3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)	147
4. Perencanaan Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)	148
5. Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)	152
6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)	156
C. Pembahasan	161
1. Potensi Daerah/ Sektor-sektor Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	161
a. Potensi/ Sektor-sektor Perekonomian dalam PDRB	161
b. Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro Dengan Daerah Di Sekitarnya (Eks-Karasidenan)	167
2. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sektor Unggulan	177
a. Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Mengembangkan Sektor Migas Kabupaten Bojonegoro	177
1. Dasar Hukum Dan Latar Belakang dalam Mengembangkan Migas	177
2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pertambangan Migas	180

3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Migas	182
4. Perencanaan Strategi Pengembangan Migas	185
5. Strategi Pengembangan Migas	187
6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Migas	192
b. Strategi Dinas Pertanian Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian (Komoditas Padi) Kabupaten Bojonegoro	193
1. Dasar hukum dan Latar Belakang Dalam Mengembangkan Pertanian (Komoditas Padi).....	193
2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi).....	195
3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi).....	196
4. Perencanaan Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi).....	198
5. Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi).....	205
6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi).....	207
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	214
B. Saran	216

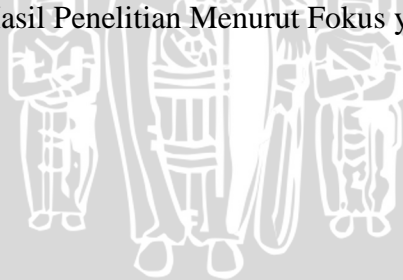
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

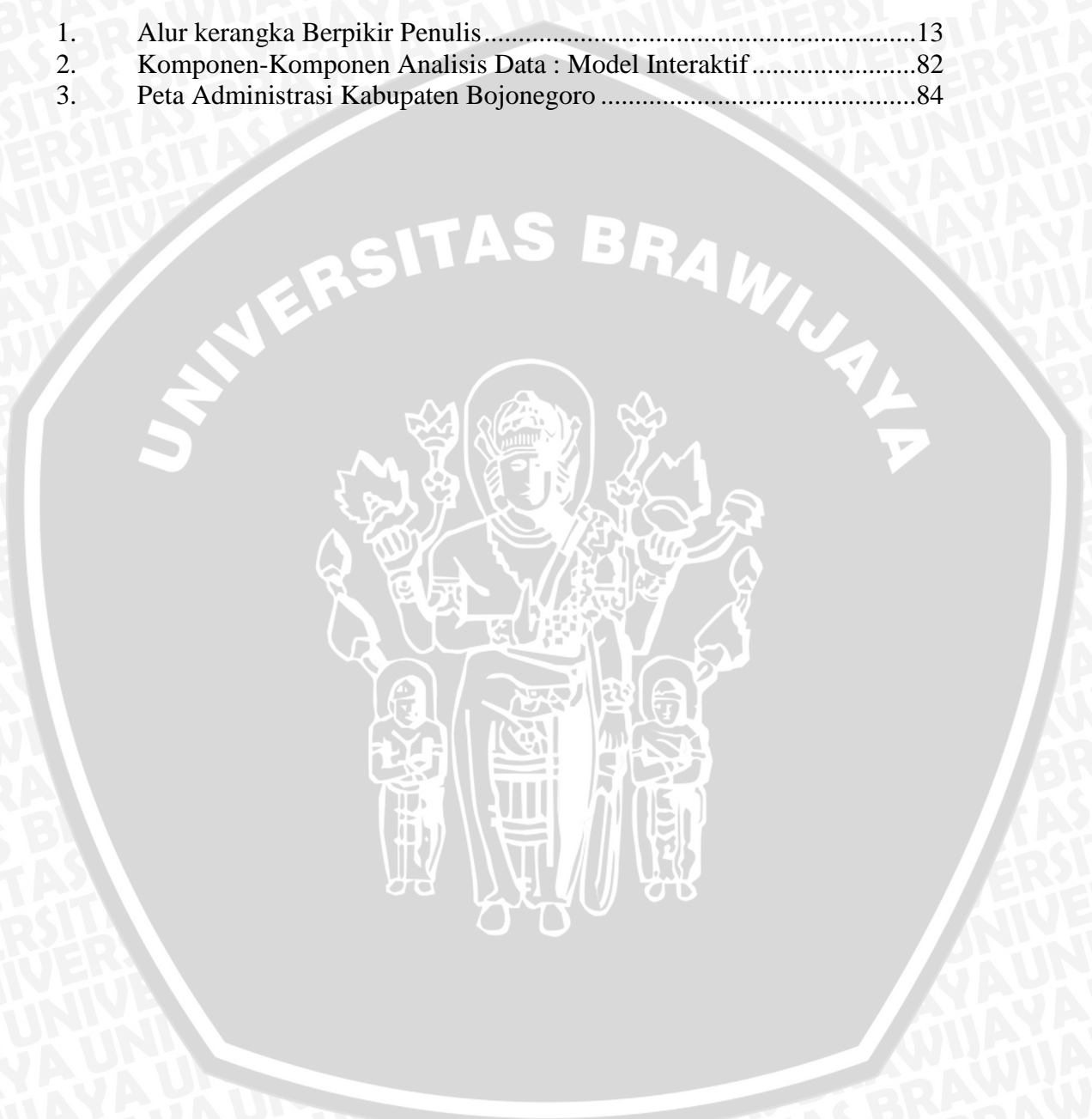
No	Judul	Hal
1.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012.....	6
2.	Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah.....	85
3.	Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012.....	90
4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro.....	91
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Mata Pencaharian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012.....	92
6.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) dan Distribusi Persentase Tiap Sektor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 (%).....	93
7.	PDRB Perkapita Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2012.....	94
8.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	104
9.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	104
10.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	106
11.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	107
12.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	108
13.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	108
14.	Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	109
15.	Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	109
16.	Kontribusi Sektor Bangunan/ Konstruksi Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	110
17.	Kontribusi Sektor Bangunan/ Konstruksi Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	110
18.	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	111
19.	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	111
20.	Kontribusi Sektor Angkutan dan Komunikasi terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	114
21.	Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	114
22.	Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Terhadap	

	PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	115
23.	Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)	115
24.	Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah).....	116
25.	Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah).....	116
26.	Indeks Gravitasi dan Model Interaksi Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Daerah di sekitarnya	117
27.	Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)	119
28.	Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)	123
29.	Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah) .	124
30.	Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)....	125
31.	Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah) .	126
32.	Nilai Rata-rata LQ Daerah Kabupaten Bojonegoro Dengan Daerah di Sekitarnya (Eks Karesidenan) Tahun 2012	127
33.	Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro	134
34.	Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro	142
35.	Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro	157
36.	Matriks Teori dan Hasil Penelitian Menurut Fokus yang diteliti.....	211



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Alur kerangka Berpikir Penulis.....	13
2.	Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif.....	82
3.	Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro	84



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1.	Pedoman wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro	225
2.	Pedoman wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro ..	226
3.	Dokumentasi Foto Wawancara	227
4.	Hasil Analisis rata-rata LQ Kabupaten Bojonegoro dengan daerah di sekitar serta hasil analisis indeks gravitasi	232
5.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan ..	233
6.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	239
7.	Jumlah Penduduk	241
8.	Jarak Antara Kabupaten	246
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro	247
10.	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Jawa Timur	248
11.	Luas Panen Padi Per Kabupaten/ Kota	249
12.	Produksi Padi Per Kabupaten /Kota	250
13.	Surat Keterangan Penelitian	251
14.	Curriculum Vitae	255

DAFTAR ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa
ALSINTAN	: Alat Mesin Pertanian
BAPPEPROP	: Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
Ha	: Hektar
HIPA	: Himpunan pemakai Air
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
IPR	: Ijin Pertambangan Rakyat
IUP	: Ijin Usaha Pertambangan
Kg	: Kilogram
K3S	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KSP	: Kawasan Strategis Propinsi
LQ	: <i>Locatiant Quotient</i>
MIGAS	: Minyak dan Gas
OPT	: Organisme Pengganggu Tumbuhan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PPAH	: Pusat Pengembangan Agensi Hayati
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
POPT	: Penyuluh Organisme Pengganggu Tanaman
RENSTRA	: Rencana Strategi
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKK	: Satuan Kerja Khusus
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLPTT	: Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan nasional Indonesia mempunyai tujuan yaitu berusaha mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Karena pada dasarnya pembangunan harus dipandang suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Sehingga jika cakupan kesemuanya itu terwujud maka baru bisa dikatakan terdapat sebuah perubahan dari proses pembangunan (Todaro, 2000:20).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru (Arsyad, 2010:374). Oleh sebab itu, berlakunya undang-undang mengenai otonomi daerah menjadi bukti bahwa masing-masing daerah diberikan kewenangan tersendiri untuk bisa mengelola dan meningkatkan potensi daerah maupun sumber daya yang dimilikinya sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana peran serta Pemerintah dan Masyarakat sangat penting sekali dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Sehingga upaya pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, berkembang dan terpencil perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya pembangunan daerah secara nasional.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah lokal/ daerah dalam mengelola potensi ekonominya. Pemerintah propinsi telah sepenuhnya mendelegasikan wewenang kepada daerah kabupaten/ kota untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya sendiri-sendiri, sedangkan salah satu daerah yang juga telah mengalami proses desentralisasi adalah Kabupaten Bojonegoro, yakni salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur. Posisi geografis yang sangat menguntungkan membuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak dulu hingga sekarang terus berupaya untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya sendiri yaitu dengan memajukan beberapa sektor perekonomian daerah.

Letak strategis Kabupaten Bojonegoro yang mana dilalui oleh Kabupaten Tuban, Ngawi, Blora memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Apalagi

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) cukup besar misalnya seperti pada sektor pertanian dan hasil tambang minyak bumi dan gas (migas) yang dapat berkontribusi tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sedangkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro ditopang oleh sembilan sektor perekonomian, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian (sektor primer); sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan (sektor sekunder); sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan yang terakhir sektor jasa-jasa (sektor tersier). Dari Sembilan sektor ini kemudian akan diidentifikasi sektor manakah yang akan menjadi sektor unggulan (basis) dan sektor bukan unggulan (non basis). Kemudian dari sektor yang menjadi unggulan tersebut akan dilakukan pengembangan.

Mengingat sektor unggulan memegang peranan yang sangat penting dalam prioritas pembangunan oleh karena itu pengidentifikasian adanya sektor unggulan perlu diketahui agar nantinya bisa dilihat sektor manakah yang menjadi unggulan (basis) ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Dan dengan ditentukannya sektor unggulan/ basis ekonomi, maka pemerintah daerah dapat mengelola dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sektor unggulan/ sektor basis tersebut untuk dikembangkan dan dioptimalkan secara maksimal agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah. Karena pada dasarnya “sektor unggulan merupakan sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena

mempunyai keunggulan-keunggulan/ kriteria” (Sambodo dalam Ghufron, 2008:18). Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar prioritas pembangunan daerah, apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang ini yang mana setiap daerah berhak memiliki peluang/kesempatan untuk mengembangkan sektor unggulan yang menjadi potensi daerah guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Potensi daerah yang menjadi sektor unggulan sekaligus juga akan menjadi basis ekonomi.

Dalam membahas teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan non basis yang berarti:

Sektor basis atau kegiatan basis adalah pada dasarnya kegiatan ekspor yang semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Sedangkan sektor non basis adalah semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk kedalam kegiatan/ sektor non basis. Sektor non basis adalah sektor/ kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal (Tarigan, 2005:56-29)

Sehingga dapat dikatakan sektor basis apabila sektor lapangan usaha di daerah Kabupaten memiliki kontribusi lebih besar/ tinggi daripada di tingkat Propinsi, sedangkan dapat dikatakan sektor non basis apabila sektor di tingkat Kabupaten kontribusinya masih rendah atau di bawah tingkat Propinsi. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan) sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan) berarti sektor tersebut belum mampu untuk melakukan ekspor.

Keberadaan potensi-potensi atau sektor ekonomi menjadi modal dasar yang dimiliki daerah dalam melakukan percepatan pembangunan agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah langkah atau strategi dalam mengembangkan potensi daerah yang telah menjadi sektor unggulan daerah. Sebelum melakukan pengembangan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro harus mengetahui terlebih dahulu sektor manakah yang nantinya dapat dijadikan sebagai sektor unggulan atau basis ekonomi yang dimiliki dan merupakan 'icon' dari Kabupaten Bojonegoro. Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro maka sektor-sektor yang teridentifikasi menjadi unggulan tetap diprioritaskan untuk dilakukan pengembangan berikutnya, sedangkan sektor-sektor yang tidak menjadi unggulan semakin dikelola dengan baik agar sektor non basis ini nantinya bisa menyusul untuk menjadi sektor unggulan/ basis. Dengan begitu, Kabupaten Bojonegoro akan banyak dilirik oleh investor untuk menanamkan modal atau menginvestasikan sebagian sahamnya didalam pengelolaan dan pengembangan sektor unggulan, sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Besarnya distribusi persentase nilai tiap sektor/ lapangan usaha bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan 2012

No	Lapangan Usaha/ Sektor	2012 (persen)
Primer		53,70
1	Pertanian	24,68
2	Pertambangan dan penggalian	29,02
Sekunder		11,48
3	Industri pengolahan	7,53
4	Listrik, gas, dan air bersih	0,64
5	Bangunan	3,51
Tersier		34,63
6	Perdagangan, hotel dan restoran	17,12
7	Angkutan dan komunikasi	3,73
8	Keuangan, persewaan, dan jasa	4,86
9	Jasa-jasa	8,92

Sumber: BAPPEDA Kab.Bojonegoro Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pergeseran nilai sektor yang paling dominan di Kabupaten Bojonegoro adalah sektor primer dan tersier. Pada sektor primer Kabupaten Bojonegoro menyumbang kontribusi ekonominya sebesar 53,70 persen dengan kontribusi sektor pertanian 24,68 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 29,02 persen. Sebaliknya peranan sektor sekunder di Kabupaten Bojonegoro hanya mencapai 11,48 persen dimana sektor industri memiliki peranan 7,53 persen; listrik, gas, dan air bersih 0,64 persen; serta bangunan sebesar 3,51 persen. Sementara dari sektor tersier di Kabupaten Bojonegoro mencapai 34, 63 persen. Sektor tersier di Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 17,12 persen; angkutan dan komunikasi 4,86 persen; serta jasa-jasa sebesar 8,92 persen. Namun besarnya nilai tersebut belum bisa menunjukkan sektor unggulan di Kabupaten Bojonegoro, karena untuk mengetahui manakah yang menjadi unggulan diperlukan alat bantu hitung analisis *Locatient Quotient (LQ)*, yang mana analisis ini membandingkan dengan daerah di atasnya yaitu Propinsi Jawa

Timur dengan menggunakan data PDRB, karena salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012. Sehingga dari kesembilan sektor yang ada pada tabel di atas akan di analisis dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* yang didasarkan pada data PDRB atas harga konstan. Maksud dan tujuan adanya analisis tersebut adalah untuk menganalisis potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro lebih tepatnya mengidentifikasi sektor-sektor yang akan menjadi unggulan sekaligus basis ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Tjokroamidjojo (1987:12) “dalam melakukan perubahan pembangunan juga tak luput didasari dengan adanya perencanaan yang sistematis, karena dengan adanya perencanaan ini maka akan terpilih sebuah proses pilihan alternatif dari berbagai macam pilihan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka setelah pengidentifikasian sektor unggulan untuk selanjutnya adalah diperlukan adanya sebuah rencana strategis dan strategi-strategi pembangunan ekonomi dalam mengembangkan sektor yang paling unggul/ menjadi unggulan di Kabupaten Bojonegoro.

Peranan sektoral terhadap pembangunan ekonomi telah digambarkan oleh nilai pada masing-masing sektor PDRB atas dasar harga konstan. Penjelasan mengenai sektor-sektor/ lapangan usaha tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Bojonegoro dalam mengetahui potensi-potensi tiap sektor sebab sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah dan dapat mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sangat relevan untuk melakukan penelitian berjudul **“Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dan Strategi Pengembangannya”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pokok-pokok pemikiran dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Apa potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa menjadi sektor unggulan?
- 2) Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan pada sektor yang paling unggul di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendiskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa menjadi unggulan

- 2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor paling unggul di Kabupaten Bojonegoro

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perencanaan Pembangunan terutama yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan prioritas sektor unggulan/ basis ekonomi

b. Secara Praktis

1. Masukan dalam pengambilan kebijaksanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas ESDM, serta Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan sektor unggulan sekaligus sebagai sumbangan pikiran dalam menganalisis sektor unggulan daerah/ basis ekonomi.
2. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, pengembangan strategi, serta sebagai sumbangan

informasi bagi peneliti lainnya sepanjang menyangkut obyek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Potensi-potensi di setiap daerah saat ini dapat dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, khususnya dalam penelitian ini adalah dikelola sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro tanpa harus menunggu pengelolaan dari pemerintah pusat. Semenjak berlakunya desentralisasi yang mana wujud dari otonomi daerah saat ini pengelolaan masing-masing potensi daerah dikembalikan ke daerahnya masing-masing artinya di kelola sendiri oleh masing-masing daerah yang bersangkutan. Desentralisasi yang mana wujud dari otonomi daerah telah melahirkan konsep baru yang berbeda dengan konsep sebelumnya yaitu masih tersentralisasi artinya pemerintah pusat masih berwenang dalam mengelola potensi daerah yang ada di setiap daerah-daerah yaitu masih dibebankan pada pemerintah pusat.

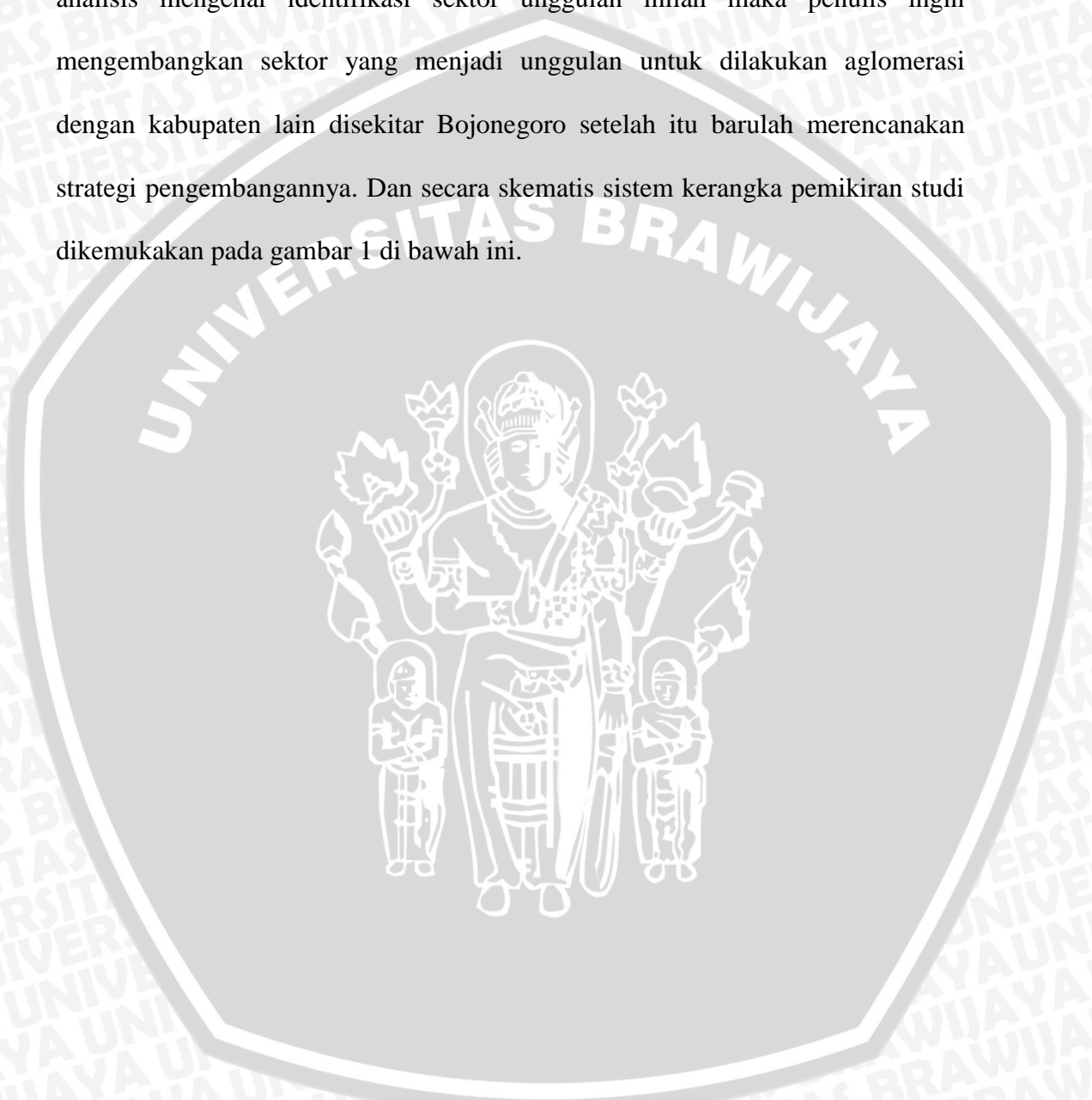
Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dari daerah itu sendiri. Dalam mengelola potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut, pemerintah daerah dirasa perlu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bojonegoro, karena dengan potensi tersebut sangat menentukan dalam prioritas pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Potensi-potensi daerah dapat diwujudkan dalam bentuk sektor-sektor yang ada di setiap daerah. Salah satunya adalah dengan mengetahui sektor unggulan daerah/ basis ekonomi. Mengingat

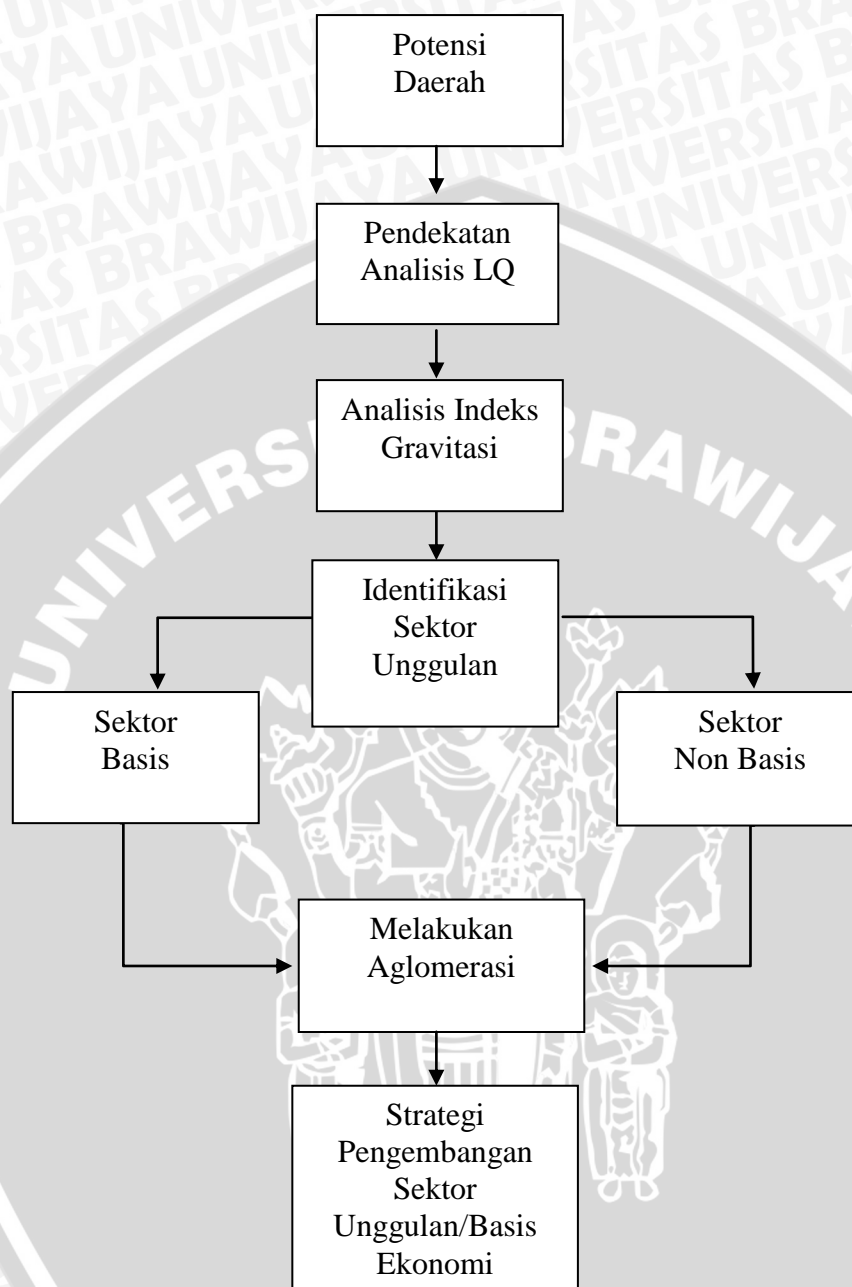
sektor unggulan memegang peranan yang sangat penting dalam prioritas pembangunan oleh karena itu perhitungan adanya sektor unggulan perlu diketahui agar nantinya bisa dilihat sektor manakah yang menjadi unggulan/ basis ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Dan dengan ditentukannya sektor unggulan/ basis ekonomi, maka pemerintah daerah dapat mengelola dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sektor unggulan/ sektor basis tersebut untuk dikembangkan dan dioptimalkan secara maksimal agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, sektor unggulan juga merupakan bagian yang sangat penting di dalam basis ekonomi. Yang artinya menjadi sektor unggulan berarti bisa disebut juga sebagai basis ekonomi yang nantinya sektor ini bisa melakukan ekspor ke luar daerah bahkan ke luar negeri, sehingga bisa menambah pendapatan daerah.

Banyaknya potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal justru akan menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk itu diperlukan dalam identifikasi sektor unggulan agar dapat mengetahui sektor-sektor mana yang nantinya menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Karena potensi daerah dapat berupa sektor-sektor yang ada di daerah, terutama adalah sektor unggulan. Sektor unggulan ini memegang peranan yang sangat penting dalam memprioritaskan pembangunan untuk dilakukan pengembangan selanjutnya dan juga sebagai basis ekonomi yang nantinya bisa melakukan ekspor ke luar daerah sehingga meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun untuk mengetahui sektor unggulan daerah sebagai basis ekonomi dapat dihitung menggunakan pendekatan metode analisis *Locatient Quotient*

(LQ). di dalam pendekatan analisis *LQ* dapat diketahui untuk menentukan sektor manakah yang menjadi unggulan/ sektor basis dan non basis ekonomi. Dari hasil analisis mengenai identifikasi sektor unggulan inilah maka penulis ingin mengembangkan sektor yang menjadi unggulan untuk dilakukan aglomerasi dengan kabupaten lain disekitar Bojonegoro setelah itu barulah merencanakan strategi pengembangannya. Dan secara skematis sistem kerangka pemikiran studi dikemukakan pada gambar 1 di bawah ini.





Gambar 1: Alur Kerangka Berpikir Penulis
 (Sumber : Olahan Penulis)

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi proposal skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan. Pada bab pertama ini, penulis mencoba menjelaskan dan mengemukakan alasan mengenai pemilihan judul, alasan tersebut mencakup teoritis, normatif empirical problem yang tertuang didalam latar belakang sedangkan alasan *empirical problemnya* lebih dituangkan kembali pada kerangka pemikiran.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pernyataan peneliti yang meliputi konsep dan pengertian dari judul dan permasalahan yang diangkat. Teori yang bersangkutan yakni teori perencanaan, teori pembangunan, teori perencanaan pembangunan ekonomi, teori pembangunan ekonomi, teori potensi daerah dan sektor unggulan, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data. Pada bab tiga ini penulis mencoba menjelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dilengkapi dengan wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran lokasi penelitian ini berisikan tiga sub bab, yaitu keadaan umum Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian, profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, serta profil Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sebagai obyek/situs penelitian dari skripsi ini. Selanjutnya penyajian data, berisikan sub bab kondisi potensi atau potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, data PDRB, strategi pengembangan pemerintah daerah, serta pada bagian analisis data berisi hasil analisis LQ untuk dihubungkan dengan teori-teori yang ada pada tinjauan pustaka sehingga dapat ditemukan kesesuaian diantara keduanya.

Bab V : Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang coba ditarik oleh peneliti setelah sebelumnya disajikan didalam penyajian data dan pembahasan serta yang terakhir peneliti mencoba memberikan saran guna perbaikan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Conyers dan Hills sebagaimana dikutip oleh Kuncoro (2012:50) mendefinisikan “perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang”. Sementara disisi yang sama Arsyad (2010:156-157) mengemukakan bahwa:

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sosial atau organisasional yang disengaja untuk mengembangkan suatu strategi optimal dari tindakan nyata di masa depan untuk mencapai suatu kumpulan tujuan yang diinginkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam konteks yang kompleks dan disertai oleh kekuatan dan keinginan untuk menjalankan sumberdaya yang ada dan juga bertindak seperlunya untuk mengimplementasikan strategi terpilih.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat elemen dasar dari suatu perencanaan yaitu (Arsyad, 2010:157):

- a) merencanakan berarti memilih,
- b) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
- c) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
- d) perencanaan untuk masa depan.

Merencanakan berarti memilih. Hal ini dapat diartikan bahwa tahap perencanaan ini adalah proses pemilihan sumber daya-sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan

alat pengalokasian sumber daya. Dengan kata lain, pada tahap perencanaan ini, dilakukan suatu proses alokasi besarnya sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam perwujudan tujuan yang diinginkan (Kuncoro, 2012:50). Maka kaitannya dengan penelitian ini adalah memilih sumberdaya-sumberdaya yang ada di Kabupaten Bojonegoro misalnya seperti sektor yang menjadi unggulan untuk direncanakan dilakukan pengembangan berikutnya (dimasa depan) dengan memilih berbagai alternatif dalam mengembangkan sektor unggulan tersebut.

Sudut Pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Tarigan (2012:4-5):

“Planning is primarily a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program” Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program . Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perlu dicatat bahwa definisi Friedman ini terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah di negara maju, dimana perencanaan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Perencanaan yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan ekonomi ataupun perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Walaupun menyangkut perencanaan ekonomi juga, tetapi Widjojo Nitisastro sebagaimana dikutip oleh Tarigan, (2012:5) memberikan penekanan yang berbeda hampir mirip dengan

Friedman. Beliau mengatakan bahwa “perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal pertama ialah penentuan pilihan secara sadar atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan langkah-langkah paling prioritas dari beberapa alternatif pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan didasarkan pada sumber daya yang ada. Perencanaan berarti memilih beberapa alternatif-alternatif pilihan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien untuk kegiatan di masa yang akan datang. Perencanaan adalah suatu proses menentukan langkah-langkah rencana yang disusun secara sistematis dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian sebelum melakukan sebuah pengembangan pada sektor unggulan terlebih dahulu merencanakan langkah-langkah paling prioritas/ alternatif-alternatif pilihan yang akan diambil dalam mengembangkan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara pendapat lain juga diungkapkan oleh Soekartiwi (1990:4) bahwa perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Suatu perencanaan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas karena perencanaan tersebut dipergunakan sebagai arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (1987:12) juga mengungkapkan pengertian perencanaan, yaitu:

- a) perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.
- b) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c) perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Sehingga didapat kesimpulan bahwa perencanaan tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka perencanaan dilakukan terlebih dahulu sebagai proses mempersiapkan kegiatan sistematis, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Bojonegoro.

Dari berbagai pendapat yang sering dilontarkan oleh para ahli perencanaan pembangunan, maka pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan (*policy*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Soekartiwi, 1990:4-5):

- a) perencanaan berarti “memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada.” Artinya dari sekian banyak alternatif, maka perlu dipilih perencanaan yang didasarkan pada aspek skala prioritas.
- b) perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya alam atau sumberdaya manusia. Bagaimana mengalokasikan sumber daya tersebut yang secara teoritis memang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Namun demikian para pembuat kebijaksanaan (*policy-makers*) atau para peneliti harus mampu mendefinisikan bagaimana suatu sumberdaya dapat dialokasikan secara optimal.
- c) perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak. Bila sebagian besar masyarakat diuntungkan dari pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan itu dapat dikatakan berhasil. Dengan demikian

keresahan dan ketidakpuasan yang mendorong tidak stabilnya stabilitas nasional dapat dicegah.

- d) perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
- e) perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan. Perencanaan yang dikaitkan dengan kepentingan masa depan adalah suatu hal yang baik, agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan di masa depan.

Sehingga didapat kesimpulan bahwa dalam membuat perancangan perencanaan adalah mengambil kebijakan yang didasarkan pada pemilihan sejumlah alternatif yang baik dari yang paling baik artinya memilih berdasarkan skala prioritas atau pilihan-pilihan yang paling utama diprioritaskan. Kemudian yang kedua adalah didasarkan pada pemilihan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, artinya bagaimana nantinya dapat mengalokasikan sumber daya secara maksimal. Yang ketiga didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak, artinya rumusan sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak, sehingga jika pelaksanaan pembangunan tersebut dikatakan berhasil itu karena banyak masyarakat yang diuntungkan. Yang keempat didasarkan pada tujuan dan sasaran yang harus dicapai, artinya bahwa kita merencanakan harus mengetahui tujuan dan sasarannya untuk apa dan oleh siapa. Kemudian yang terakhir perencanaan didasarkan dan dikaitkan pada masa depan, artinya memerlukan beberapa alternatif yang disesuaikan dengan kondisi di masa mendatang.

2. Pendekatan, dan Tahapan Dalam Perencanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikenal empat pendekatan dalam proses

perencanaan, yaitu proses politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom-up* dan *top-down*. Sebagaimana dikutip oleh Kuncoro (2012:53) bahwa keempat proses perencanaan tersebut memiliki pendekatan dan ciri tersendiri yaitu:

- a. proses politik. pemilihan presiden/ kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh setiap calon presiden/ kepala daerah
- b. proses teknokratik. perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/ unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
- c. proses partisipatif. perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholders*) yang antara lain melalui pelaksanaan musrenbang
- d. proses *bottom-up* dan *top-down*. perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan (menurut jenjang pemerintahan)

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka pendekatan yang lebih cocok digunakan adalah proses teknokratik, partisipatif dan proses *bottom-up*. Seperti yang diketahui bahwa proses partisipatif yaitu perencanaan yang melibatkan *stakeholders* termasuk masyarakat terlibat secara penuh, keterlibatan masyarakat itu sendiri menjadikan pembangunan lebih hidup lagi artinya pendapat atau ide dari masyarakat dibutuhkan dalam merencanakan sebuah pembangunan. Dan masyarakatlah yang terkadang lebih mengetahui karakteristik dari potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sementara proses *bottom-up* juga dirasa perlu dalam penelitian ini. Karena sebuah perencanaan tidak hanya dilihat dari perencanaan yang di atasnya namun juga melihat perencanaan dari bawah. Secara singkatnya *bottom up* adalah perencanaan ini dirumuskan oleh badan perencana pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi negara,

dengan menggabungkan rencana daerah/wilayah. Perencanaan ini disebut juga perencanaan dari bawah. Selanjutnya proses teknokratik juga dibutuhkan, karena didalam merencanakan juga membutuhkan seorang perencana yang memang professional di bidangnya dengan menggunakan metode/ berpikir ilmiah yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat biasa.

Sedangkan secara lebih terperinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut (Tjokroamidjojo, 1987:57-59):

a. Penyusun rencana

Penyusun rencana ini terdiri dari unsur-unsur:

- 1) tinjauan keadaan, yaitu dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana atau suatu tindakan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.
- 2) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, dalam hal ini diperlukan data-data statistik berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi
- 3) penetapan tujuan rencanadan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting.
- 4) identifikasi kebijaksanaan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana, suatu kebijaksanaan mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan
- 5) persetujuan rencana, proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan di bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

b. Penyusunan program rencana

dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

c. Pelaksanaan rencana

dalam hal ini perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi, dan tahap operasi

d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana

tujuan daripada pengawasan:

- 1) mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya
- 2) apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya

- 3) dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan
- e. Evaluasi
evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam proses perencanaan yang dikemukakan diatas sudah benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang perencana yaitu dimulai dari penyusunan rencana yang didasarkan pada unsur tinjauan keadaan, perkiraan keadaan, penetapan tujuan, identifikasi kebijaksanaan, dan persetujuan, kemudian tahap selanjutnya adalah penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan evaluasi.

3. Fungsi, Unsur, dan Syarat Perencanaan

Beberapa fungsi perencanaan menurut Arsyad (2010:160):

- a) perencanaan akan menciptakan suatu mekanisme pengarahan kegiatan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan,
- b) perencanaan memungkinkan kita untuk melakukan perkiraan tentang potensi, prospek pertumbuhan, hambatan serta resiko yang mungkin akan dihadapi di masa datang,
- c) perencanaan memberikan suatu peluang untuk dapat melaksanakan pilihan yang terbaik
- d) perencanaan menuntut kita untuk dapat melakukan penyusunan skala prioritas berdasarkan arti pentingnya tujuan,
- e) perencanaan dapat pula dipandang sebagai alat untuk mengukur atau standar yang digunakan untuk mengadakan pengawasan maupun evaluasi

Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa fungsi adanya perencanaan maka dalam melakukan perencanaan pengembangan sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro

dapat menciptakan suatu mekanisme atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa terarah, melakukan perkiraan tentang potensi maupun prospek pertumbuhan, memberikan peluang untuk melaksanakan pilihan terbaik yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Syamsi (1994:81-82) perencanaan yang baik dan lengkap mencakup enam unsur pokok, yaitu :

1. apa (*what*), yakni apa yang dilakukan sehingga perlu direncanakan
2. mengapa (*why*), yaitu alasan memilih dan melakukan kegiatan tersebut dan mengapa perlu diprioritaskan pelaksanaannya.
3. siapa (obyek) dan siapa (subyek) (*who and who*), menentukan obyek atau sasaran dan menentukan subyek pelaksanaannya yaitu orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.
4. di mana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek).
5. kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu/ timing pelaksanaan yang tepat.
6. bagaimana (*how*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan

Dengan demikian unsur-unsur dalam pembangunan tersebut lebih berdasarkan atas pertanyaan 5W + 1H yang mencakup *what, why, who, where, when* dan *how*

Sementara Jhingan dalam Arsyad (2010:164), mengungkapkan ada beberapa syarat atau kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan suatu perencanaan yaitu:

- a) badan perencanaan. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah adanya suatu badan perencanaan yang terorganisir dengan cara tepat.
- b) data statistik. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi dan kendala sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara.
- c) tujuan. Didalam suatu perencanaan, dapat pula ditetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara, seperti kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta derajat polarisasi (pemusatan ekonomi), peningkatan produksi pertanian,

- industrialisasi, pembangunan kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan, dan sebagainya.
- d) penetapan sasaran dan prioritas. Penetapan dan sasaran prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan secara makro dan sektoral
 - e) mobilisasi sumberdaya. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia.
 - f) keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjalin adanya keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindari adanya kondisi defisit maupun surplus pada periode perencanaan

Dengan demikian dalam merencanakan pengembangan sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan berhasil apabila terdapat badan perencanaan, data statistik, data ini dapat berupa data angka seperti data PDRB dan luas wilayah, tujuan artinya memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan sektor unggulan, penetapan sasaran dan prioritas maksudnya menetapkan sasaran dan prioritas yang ingin dilakukan dalam pengembangan sektor unggulan, mobilisasi sumberdaya dimaksudkan sebagai pembiayaan atas pemerintah, serta adanya keseimbangan dalam perencanaan.

Solihin dalam (www.slideshare.net/) mencoba menjelaskan pandangannya mengenai syarat perencanaan yaitu harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

- a) tujuan akhir yang dikehendaki
- b) sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif)
- c) jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut
- d) masalah-masalah yang dihadapi
- e) modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- f) kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya
- g) orang, organisasi, atau badan pelaksananya

h) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Dari beberapa rujukan mengenai syarat perencanaan yang dikemukakan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar syarat perencanaan dilihat dari aspek umum yaitu tujuan, penetapan sasaran-sasaran dan prioritas, sumberdaya, badan perencanaan atau badan pelaksanaannya.

B. Teori Pembangunan

1. Pengertian dan Tujuan Pembangunan

Siagian (2000:4) mengemukakan bahwa “pembangunan didefinisikan sebagai suatu usulan atau rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Todaro (2000:20) bahwa:

Pembangunan harus dipandang suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual.

Todaro (2000:23) menyimpulkan bahwa “pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik”. Sedangkan menurut Kartasasmita

sebagaimana dikutip oleh Riyadi & Bratakusumah (2004:4) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu “pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Dari sisi yang sama di ungkapkan oleh Bryant and White sebagaimana dikutip oleh Suryono (2004:35) yang menganggap bahwa “pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya”, oleh karena itu ada lima implikasi utama yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan yaitu :

- a. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*)
- b. pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*)
- c. pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)
- d. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)
- e. pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualis) dan saling menghormati (*interdependensi*)

Dari beberapa definisi mengenai pembangunan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, penulis berkesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses terencana yang dilakukan secara sadar dengan merubah/ mengadakan suatu perubahan. Proses melakukan perubahan tersebut guna menciptakan keadaan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapita sehingga bisa tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju perubahan yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia kearah kehidupan yang serba lebih baik lagi. Pembangunan berarti memiliki kemampuan optimal manusia baik untuk membangun dirinya sendiri maupun kelompok, adanya pemerataan, adanya kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan memutuskan, dengan mengurangi ketergantungan kepada negara lain.

Siagian (1984:29-30) mengungkapkan pula ada 5 ide pokok pembangunan nasional yaitu:

- a) *pertama*, pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih “baik” dari kondisi yang kini ada.
- b) *kedua*, ide pokok yang kedua adalah *inheren* dalam pengertian pembangunan ialah pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan disini ialah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Berarti, tidak ada satupun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.
- c) *ketiga*, pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan arah jenis berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dan seluruh potensi serta kekuatan nasional diarahkan kesitu.
- d) *keempat*, bahwa pembangunan merupakan rangkaian secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada sesuatu rencana yang tersusun secara rapi untuk kurun waktu tertentu
- e) *kelima*, bahwa pembangunan bermuara kepada suatu “titik akhir” tertentu, yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, ide pokok pembangunan adalah pembangunan merupakan suatu proses yaitu suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dilaksanakan

baik oleh masyarakat, pemerintah, swasta dan *stakeholders* lainnya yang bermuara pada suatu perubahan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan ke arah lebih baik lagi; pembangunan mengarah pada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional yakni mencakup berbagai perubahan mendasar dan struktur sosial; proses dan kegiatan pembangunan juga ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan dan ini merupakan satu betuk cita-cita akhir perjuangan suatu bangsa.

Sedangkan tujuan pembangunan menurut Solihin dalam (slideshare.net) adalah untuk:

- a. mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
- b. memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
- c. menciptakan atau menambah lapangan kerja
- d. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah
- e. mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)

Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas, kesimpulan yang diperoleh bahwa sebenarnya tujuan utama dari pembangunan khususnya dalam penelitian ini adalah untuk mencapai ke arah yang lebih baik yaitu dengan adanya sebuah pembangunan yang mana mengarah pada pengembangan sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro maka diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber

daya alam yang kesemuanya tertuju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain Todaro (2000:23-24) berpendapat bahwa proses pembangunan disemua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

- a. Perluasan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Seperti pangan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup, yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu, serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Sehingga disimpulkan bahwa tujuan pembangunan pada dasarnya semata-mata untuk, memperluas distribusi kebutuhan dasar masyarakat agar tidak banyak masyarakat yang mengalami kekurangan, seperti kekurangan bahan baku pokok, pangan, dll. Selain itu adanya pembangunan memberikan hasil perubahan pada masyarakat menjadi meningkat taraf hidupnya, misalnya pendidikan sekolahnya menjadi lebih baik lagi, adanya kesempatan kerja yang cukup yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Berbagai Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pembangunan

Salah satu norma dalam penyelenggaraan pembangunan nasional ialah bahwa pembangunan harus merata di seluruh wilayah yang dikuasai oleh suatu

negara tertentu. Norma demikian membawa konsekuensi logis yaitu bahwa dalam rangka pembangunan nasional, pembangunan daerah pun mendapat perhatian secara proporsional. Perhatian secara proporsional per definisi antara lain berarti bahwa dalam membangun seluruh daerah di wilayah yang dikuasai oleh suatu negara, Siagian (1984:145) menyatakan berbagai faktor harus diperhitungkan secara matang, seperti:

- a. potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, baik dalam kekayaan alam maupun sumber daya insani
- b. kemampuan daerah untuk membangun dirinya dalam kerangka pembangunan nasional sebagai keseluruhan
- c. prioritas pembangunan di daerah, baik dilihat oleh kacamata nasional maupun dilihat dari kepentingan daerah yang bersangkutan
- d. keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral
- e. keselarasan pembangunan antar seluruh daerah
- f. keselarasan pembangunan dalam suatu daerah tertentu

Faktor-faktor tersebut mutlak perlu diperhitungkan dalam menyusun rencana dan program pembangunan nasional. Siagian (1984:145-146) mengemukakan dalam rencana dan program pembangunan daerah harus jelas terlihat bahwa kepentingan daerah hanya merupakan bagian dari kepentingan nasional sebagai keseluruhan. memperhitungkan faktor-faktor tersebut di atas antara lain berarti bahwa:

- a) pertama, kepentingan nasional berada di atas segala-galanya dalam menyusun rencana dan program pembangunan dan bahwa skala prioritas pembangunan daerah harus mendukung skala prioritas pembangunan nasional sebagai keseluruhan.
- b) kedua, potensi satu daerah, yang mungkin saja berbeda dengan potensi daerah lain, tidak hanya dimanfaatkan demi kepentingan daerah yang bersangkutan, akan tetapi juga demi kepentingan daerah-daerah lain, baik yang potensinya berbeda maupun yang tidak mempunyai potensi besar.
- c) ketiga, dengan potensi yang berbeda-beda itu maka kemampuan berbagai daerah untuk memberikan sumbangannya kepada upaya

pembangunan nasional pasti akan berbeda-beda pula. Dengan perkataan lain, kemampuan untuk memperoleh pendapatan daerah akan berada pada tingkat yang berbeda-beda, yang pada gilirannya akan menentukan apa yang dapat dan mungkin dikerjakan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri dan apa pula yang tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan dan oleh karenanya perlu memperoleh bantuan dari dana pembangunan nasional.

- d) keempat: Pembangunan daerah pun akan sangat dipengaruhi oleh sistem otonomi daerah yang dianut dalam menjalankan roda pemerintahan negara, terlepas dari apakah negara yang bersangkutan menganut bentuk negara kesatuan atau federal.

Dari pendapat diatas didapat kesimpulan bahwa faktor-faktor didalam pembangunan penting untuk diperhitungkan yakni skala pogram prioritas pembangunan daerah harus mendukung skala pembangunan nasional. Kemudian potensi yang dimiliki di tiap daerah itu berbeda-beda sehingga harus bisa memanfaatkan potensi tidak hanya untuk kepentingan daerah itu sendiri tetapi juga untuk daerah lain. Karena potensi yang dimiliki daerah berbeda-beda otomatis pendapatan daerah yang diperoleh akan berada pada tingkat yang berbeda pula.

3. Paradigma Pembangunan

Menurut Suryono (2010:114) mengatakan bahwa paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, model tertentu, dan solusi tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain, pada hakekatnya tidak dapat disamakan (apalagi dipersatukan), tetapi paradigma bisa diperbandingkan. Asumsi berkaitan dengan persoalan keyakinan dan kepercayaan (*meta theory*) sehingga

tidak dapat diuji; sedangkan teori, metodologi, model dan solusi bisa diuji, ditesting, dikritik, dikembangkan, dan disempurnakan.

Pergeseran perkembangan paradigma yang pembangunan di negara Indonesia adalah sebagai berikut (Suryono dan Fernanda, 2010):

- a) **modernization paradigm** (paradigma modernisasi) dasawarsa 1945 s/d 1950-an ini memusatkan pada perubahan sosial sebagai proses evolusi, perubahan masyarakat tradisional (eks jajahan, petani, statis, tertutup, miskin) ke masyarakat modern (emulasi pola perilaku/ budaya barat, industrialisasi, dinamis, terbuka, sejahtera, dan nation building/ pembangunan nasional (Fernanda, 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com).
- b) **growth paradigm** (paradigma pertumbuhan); dimulai pada sekitar dasa warsa 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi capital nasional, dengan GNP sebagai ukuran keberhasilannya. Keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif (Suryono, 2010:16).
- c) **appropriate technology paradigm** (paradigma teknologi tepat guna) yang menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan kebutuhan masyarakat, penciptaan barang-barang produksi, serta melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Namun demikian, pendekatan ini pun pada akhirnya juga dianggap tidak dapat memuaskan usaha-usaha penciptaan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi jurang kesenjangan ekonomi, dan sosial (Suryono, 2010:19).
- d) **dipendensia paradigm** (paradigma ketergantungan), yakni proses pembangunan dengan bantuan asing (modal, maupun tenaga ahli) hanya menguntungkan pihak asing dan menambah keterpurukan dan eksploitasi masyarakat dan sumber daya nasional/lokal. (Fernanda, 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com).
- e) **basic needs development paradigm** (paradigma kebutuhan dasar pembangunan), pendekatan ini merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan. Paradigma ini lahir karena adanya kekecewaan yang makin besar terhadap pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) yang semakin rendah dan atas pengurangan kemiskinan di banyak negara-negara berkembang. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin (Suryono, 2010:20). Pada

pendekatan ini rakyat merupakan obyek, bukan subyek pembangunan.

- f) **liberalization paradigm/ structural adjustment** (paradigma liberalisasi/ perbaikan struktural) adalah paradigma dasawarsa 1970-an sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia telah menyebabkan masalah makro ekonomi di berbagai negara pengimpor minyak bumi, terutama yang juga terlibat kewajiban hutang terhadap world bank maupun IMF. Adanya privatisasi dan perdagangan bebas (Fernanda,. 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com).
- g) **growth with distribution paradigm** (paradigma pertumbuhan dengan pemerataan) muncul pada dasawarsa 1970 s/d 1980-an, digunakan untuk menggambarkan empat pendekatan dasar yang apabila digunakan tersendiri atau dalam kombinasi dapat diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan golongan paling miskin. Keempat pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat miskin itu adalah: (1) meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat, (2) mengalihkan investasi ke golongan-golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya, (3) mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan-golongan miskin. fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional. Namun, pendekatan ini pada akhirnya memang juga terbukti gagal karena hanya orang-orang yang berpendidikan dan berketerampilan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang diciptakan (Suryono, 2010:17-18).
- h) **social capital paradigm and social development** (paradigma sosial capital dan pembangunan sosial) memprioritaskan pembangunan pada perbaikan kelembagaan sosial dalam masyarakat, perhatian pada pertumbuhan dan hak-hak sosial, anak-anak, perubahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas yang mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Paradigma pembangunan sosial berorientasi pada pencapaian kondisi-kondisi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat sebagai dampak positif hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. (Fernanda, 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com).
- i) **sustainable development paradigm** (paradigma pembangunan berkelanjutan) *sustainability* diartikan sebagai suatu pembangunan yang untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa mendatang”. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya

diwariskan kepada generasi mendatang. Melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang (Suryono, 2010:21). *Sustainable development* menekankan agar proses pembangunan dapat meminimalkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan efek rumah kaca yang berakibat pemanasan global yang mengancam kehidupan bangsa-bangsa di dunia (Fernanda, 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com).

- j) **human development paradigm** (paradigma pembangunan manusia), dipromosikan oleh UNDP dan telah menjadi komitmen global sebagai kerangka pembangunan di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun, paradigma ini dilandasi oleh keyakinan dan pengakuan atas kekuatan *people choices* (pilihan rakyat), dalam arti rakyat harus diberi kesempatan untuk menggunakan kapabilitas dan kapasitasnya untuk membangun dirinya sendiri dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup generasi penerusnya dengan sumber daya dan lingkungan hidup yang lestari secara berkelanjutan. Paradigma ini bersifat *universal*, memperhatikan antara *means* dan *ends*, *non diskriminatif*, menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, mendorong peningkatan kapabilitas maupun penggunaannya, dan mengurangi *deprivasi* (penderitaan), dan berorientasi pada *sustainability* atau keberlanjutan kesejahteraan generasi penerus (Fernanda, 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com).

Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat sepuluh pergeseran paradigma pembangunan yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan yaitu paradigma modernisasi, paradigma pertumbuhan, paradigma teknologi tepat guna, paradigma ketergantungan, paradigma kebutuhan dasar pembangunan, paradigma liberalisasi/ perbaikan struktural, paradigma pertumbuhan dan pemerataan, paradigma sosial capital dan pembangunan sosial, paradigma pembangunan berkelanjutan, sampai paradigma pembangunan manusia. Namun dari kesepuluh paradigma ini yang masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah paradigma "*human development*". Paradigma pembangunan manusia ini lebih menekankan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan,

mendorong peningkatan kapabilitas maupun penggunaannya, dan mengurangi deprivasi (penderitaan), dan berorientasi pada *sustainability* atau keberlanjutan kesejahteraan generasi penerus.

4. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Menurut Albert Waterson sebagaimana dikutip oleh Tjokroamidjojo (1987:12) menyebutkan bahwa “perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Tjokroamidjojo (1987:12) juga mengemukakan bahwa “perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif”.

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/ penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan menurut Riyadi & Bratakusumah (2004:7) dapat diartikan sebagai :

Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktivitas

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik mental/ spiritual, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Jenssen sebagaimana dikutip oleh Riyadi & Baratakusumah (2004:8) merekomendasikan bahwa “perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya”. Sementara disisi lain (Solihin, 2009 melalui hayda.wordpress.com) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara:

- a) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah,
- b) merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah,
- c) menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
- d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

Penulis berkesimpulan bahwa keempat aspek tersebut memang harus dijalankan dan diwujudkan, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

5. Ciri-ciri, Unsur-unsur dan Tujuan Perencanaan Pembangunan

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah

sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang. Hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak negara-negara lain terutama negara-negara sosialis, bahkan juga negara-negara maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan suatu perencanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (1987:49-52) menyebutkan beberapa ciri-ciri dari perencanaan pembangunan yaitu:

- a) ciri pertama dari suatu perencanaan pembangunan adalah adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap
- b) ciri kedua adalah adanya usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. ciri ini adalah kelanjutan saja dari ciri pertama.
- c) ciri yang ketiga adalah adanya usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- d) ciri yang kelima adalah adanya usaha pemerataan pembangunan.
- e) ciri yang keenam adalah adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan
- f) ciri yang ketujuh adalah adanya usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional
- g) ciri yang kedelapan adalah adanya usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi
- h) ciri yang kesembilan adalah adanya negara-negara yang menyantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau bersifat jangka panjang.

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ciri dari perencanaan pembangunan didasarkan pada adanya usaha yang dicerminkan rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap, adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, adanya usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi, adanya perluasan kesempatan kerja, adanya usaha pemerataan pembangunan, adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, adanya usaha

yang didasarkan pada kemampuan nasional, adanya usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi serta adanya tujuan yang bersifat jangka panjang

Secara umum unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut (Tjokroamidjojo, 1987:62-64):

- 1) kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan sering juga disebut sebagai tujuan, arah, dan prioritas-prioritas pembangunan. Perumusan tujuan perencanaan dapat dikemukakan hal-hal berikut:
 - a. perumusan tujuan perencanaan/pembangunan adalah komponen pertama
 - b. perumusan tujuan perencanaan tergantung dari preferensi-preferensi nasional dan tingkat perkembangan pembangunan
 - c. dalam penetapan tujuan seringkali terdapat kelemahan
 - d. penetapan tujuan rencana/pembangunan pada umumnya perlu merupakan suatu putusan politik
 - e. perkembangan akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan untuk memperluas tujuan-tujuan rencana/pembangunan
- 2) adanya kerangka rencana
- 3) perkiraan sumber-sumber pembangunan
- 4) uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten
- 5) program investasi
- 6) administrasi pembangunan

Dengan demikian unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan terdiri atas adanya kebijakan atau strategi dasar dalam perencanaan pembangunan, kerangka perencanaan di tataran makro, perkiraan sumber-sumber pembangunan, kerangka kebijakan yang konsisten, program investasi, dan administrasi pembangunan.

Tujuan praktis perencanaan pembangunan dikemukakan oleh (Solihin, 2009 melalui hayda.wordpress.com) adalah untuk:

1. menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/ pelaku (stakeholders)
2. membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan
3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

4. memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya.

Dengan demikian tujuan adanya suatu perencanaan pembangunan akan menghasilkan dokumen perencanaan misalnya seperti RPJMD, RENSTRA SKPD, yang berfungsi sebagai alat koordinasi disetiap *stakeholders*. Adanya perencanaan pembangunan juga bertujuan dalam membuat strategi dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan misalnya dalam penelitian ini membuat strategi dalam mengembangkan sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro.

C. Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang amat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1994:58) bahwa “keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain”. Sedangkan Todaro & Smith dalam Arsyad (2010:11-12) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu:

- a) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*)
- b) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia,
- c) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat di atas adalah keberhasilan suatu pembangunan ekonomi akan tercapai jika ditandai dengan berkembangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, artinya pembangunan ekonomi ini dapat dikatakan berhasil apabila kemauan, kemampuan, keterampilan dari masyarakat terus meningkat, misalnya masyarakat bisa memanfaatkan adanya potensi daerah untuk dijadikan atau dibuka sebuah usaha agar menambah pendapatan mereka. Dengan berkembangnya kemampuan dan keterampilan dari masyarakat sehingga dengan sendirinya mampu meningkatnya rasa harga diri masing-masing individu.

Menurut Albert O Hirschman sebagaimana dikutip oleh Siagian (1982:33) menyatakan bahwa “pembangunan ekonomi berarti proses perubahan dari suatu tipe perekonomian menjadi tipe lain yang lebih maju”. Sedangkan Meier & Baldwin sebagaimana dikutip oleh Siagian (1982:34) juga mengatakan bahwa “pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses mana pendapatan nasional riil suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang”. Sedangkan menurut Arsyad (2010:11) “pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya”. Dengan adanya batasan diatas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Sementara dari sisi yang berbeda, Sukirno (1985:13) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting. “pembangunan ekonomi merupakan : (i) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus, (ii) usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, dan (iii) kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang”. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Siagian (1982:37) bahwa “terdapat dua tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu untuk menaikkan pendapatan riil per kapita dan pertumbuhan pendapatan nasional riil”. Dari pendapat para ahli mengenai pembangunan ekonomi, sehingga didapat kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan pendapat perkapita juga tidak hanya dilihat dari satu aspek saja namun dari beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat karena pembangunan ekonomi bersifat multidimensional.

Dari pengertian di atas berkesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut (Arsyad, 2010:11-12):

- a) suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu
- b) usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan
- c) peningkatan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang
- d) perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the games*), baik aturan formal maupun informal, dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita dalam jangka yang cukup panjang juga didasari dengan perbaikan struktur sosial/ perbaikan sistem kelembagaan serta

menjalin hubungan saling terkait di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sedangkan menurut Arsyad (2010:374) mendefinisikan bahwa :

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tertentu.

Sehingga didapat kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja yang diperuntukkan kepada masyarakat daerah. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

2. Beberapa Pendekatan dalam Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu kita dalam memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hekatatnya, inti dari teori-teori pada pembangunan ekonomi daerah tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 2004:300). Kemungkinan dua hal ini yang dapat menjelaskan dan membantu kita dalam memahami pembangunan ekonomi pada suatu daerah.

Pengembangan metoda yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Namun menurut (Arsyad, 2004:300) harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena:

- a. data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal. dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah
- b. data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional

- c. data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh
- d. bagi negara sedang berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah

Apabila analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembangunan daerah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan ekonomi daerah sangat ketinggalan, baik ditinjau dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Disamping itu, analisis regional yang ada bertitik-tolak dari analisis permasalahan dan kebijaksanaan pembangunan daerah di negara maju, padahal struktur perekonomian negara-negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomian negara sedang berkembang, demikian juga dengan struktur perekonomian daerahnya. Perbedaan struktur ini mengakibatkan perlunya analisis dan cara pendekatan yang berbeda pula. Berikut adalah macam-macam teori pembangunan ekonomi daerah yaitu:

a) Teori Basis Ekonomi

Menurut (Arsyad, 2010:376) mengemukakan bahwa:

Pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan tingkat permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) baru.

Disisi yang sama coba diungkapkan oleh Tarigan (2005:28) yaitu “teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut dan hanya kegiatan basis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah”. Menurut Tarigan (2005:29) “sektor basis atau kegiatan basis adalah pada dasarnya kegiatan ekspor yang semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah”. Sehingga sektor basis dianggap satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah. Jadi pada pokoknya, kegiatan basis/sektor basis adalah kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah (Tarigan, 2005:56).

Ambardi dan Socia sebagaimana dikutip oleh Ghufron (2008:20) mengatakan hal yang sama yaitu:

Dalam membahas teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Teori ini dapat memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal. Disamping itu, teori ini juga dapat digunakan sebagai indikasi dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi kegiatan perekonomian suatu wilayah

Sebaliknya mengenai sektor non basis Tarigan (2005:29) mengungkapkan bahwa:

Sektor non basis adalah semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/ sektor nonbasis. Sektor nonbasis adalah sektor/kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor basis adalah sektor atau kegiatan yang mengekspor barang dan jasa, memasarkan barang dan jasa ke luar daerah sedangkan sektor nonbasis adalah kebalikan dari sektor basis yaitu sektor yang tidak mengekspor barang dan jasa keluar daerah namun hanya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk masyarakat setempat/ lokal itu sendiri.

Tarigan mengungkapkan bahwa bagian yang cukup sulit dalam menggunakan analisis basis ekonomi adalah memilih antara kegiatan basis dan nonbasis. Sebagaimana telah diuraikan bahwa analisis basis ekonomi dapat menggunakan variabel lapangan kerja, pendapatan, atau ukuran lain, tetapi yang umum dipakai adalah lapangan kerja atau pendapatan. Berikut beberapa metode untuk memilah antara kegiatan basis dan kegiatan nonbasis (Tarigan, 2005:32) yaitu:

1. Metode Langsung

Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Akan tetapi, apabila kita melakukan survei langsung ke pelaku ekonomi, perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha, variabel yang lebih mudah diperoleh adalah lapangan kerja.

2. Metode Tidak Langsung

Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode asumsi,

berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis.

3. Metode Campuran

Penggunaan metode asumsi murni aka memberikan kesalahan yang besar. Akan tetapi, penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, yang sering dilakukan orang adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data seperti BPS. Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang nonbasis.

4. Metode Analisis LQ

Metode lain yang tidak langsung adalah dengan menggunakan *Location Quotient* (metode LQ). metode LQ membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.

Teori pembangunan ekonomi daerah berikutnya adalah teori lokasi, teori tempat sentral, teori kausasi kumulatif, serta teori model daya tarik seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2010:376-378) yaitu:

b) Teori Lokasi.

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya nya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang

c) Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah,

baik didaerah perkotaan maupun pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

d) Teori Kausasi Kumulatif

Gunnar Myrdal dalam satu tulisannya, *Economic Theory and Underdeveloped Regions* mengungkapkan sebuah konsep yang kemudian sekarang kita kenal sebagai proses kausasi kumulatif. Dalam konsepnya tersebut, Myrdal dengan gambling menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Menurut Myrdal, pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai *backwash effects*. Disisi lain, perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin. Suatu keadaan yang akan mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang lebih miskin ini dinamakan sebagai *spread effects*

e) Model Daya Tarik (*Attraction*)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya para industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

Dari beberapa teori pembangunan ekonomi daerah di atas, teori yang cocok dan digunakan dalam penelitian ini adalah adalah teori basis ekonomi. Karena didalam teori basis ekonomi terdapat dua (2) asumsi yaitu sektor basis dan non basis, sedangkan untuk mengetahui basis atau non basis maka penulis lebih memilih menggunakan metode analisis LQ, karena Glasson sebagaimana dikutip oleh Budiharsono (2005:35) menyarankan untuk menggunakan metode *Locatient Quotient* dalam menentukan apakah sektor tersebut basis atau tidak. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang

mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Teori ini dapat memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal.

3. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Strategi dimaksudkan sebagai seni dan ilmu untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu. Strategi sebagai sebuah seni memerlukan kepekaan institusi atau filing. Sedangkan strategi sebagai ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang terus menerus berkembang untuk menemukan cara-cara baru (inovasi) terutama dalam kaitannya dengan perkembangan penggunaan teknologi. Suryono (2010:114) mengemukakan bahwa “pengertian strategi pada prinsipnya berkait dengan persoalan: (a) kebijaksanaan pelaksanaan, (b) penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan (c) penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut. Strategi selalu berkait dengan 3 hal utama, yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*), dan cara (*way*)”.

Sementara Tjokroamidjojo (1982:13) mendefinisikan strategi sebagai “keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Selain itu

strategi merupakan rangkaian kebijaksanaan dan pelaksanaan (*policy decision and execution*) dalam mencapai tujuan atau memecahkan persoalan tertentu.

Secara garis besar Arsyad sebagaimana dikutip oleh (Danantyo, 2012:13-17) menggambarkan strategi pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

1. Strategi Pembangunan Fisik (*locality of physical development strategy*)

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik. Lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (*civic center*) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu:

- a. pembuatan bank tanah (*land bankig*), dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal
- b. penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya, dsb.
- c. pengendalian perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.
- d. penataan kota (*townscaping*), dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan dan penetapan standar fisik suatu bangunan
- e. pengaturan tata ruang (*zoning*) dengan baik untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah
- f. penyediaan perumahan dan permukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja
- g. penyediaan infrastruktur seperti; sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, tempat olahraga, dsb.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*business development strategy*)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk

mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain:

- a. penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan
- b. pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah
- c. pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan
- d. pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis
- e. pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar baru.

3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*)

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara;

- a. pelatihan dengan sistem *customized training*, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja
- b. pembuatan bank keahlian (*skill banks*), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di daerah
- c. penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan daerah
- d. pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

4. Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community-Based Development Strategy*)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan memberdayakan (*empowerment*) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini

berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan usahanya.

Sehingga didapat kesimpulan bahwa strategi pembangunan daerah terdiri dari empat diantaranya strategi pembangunan fisik, (melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik, lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, berpengaruh positif bagi pembangunan fisik yaitu menciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat); strategi pengembangan dunia usaha (yaitu dengan daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.); strategi pengembangan sumber daya manusia (yang mana ini merupakan aspek paling penting karena melakukan sebuah pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan kualitas keterampilan manusia maka akan sia-sia); dan strategi pengembangan masyarakat yang dimaksudkan untuk menciptakan manfaat sosial, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan usahanya. Melihat beberapa strategi di atas, maka dapat dipilih strategi yang nantinya akan digunakan untuk disesuaikan pula dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2004:303) “pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu proses perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta (misalnya petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial) serta harus mempunyai peran dalam proses perencanaan”. Arsyad (2004:303) juga berargumen bahwa “perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Kuncoro (2004:46) mengemukakan bahwa:

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah menitikberatkan pada perencanaan perbaikan penggunaan sumberdaya antara publik dan swasta yang didalamnya terdapat unsure yang berinteraksi satu sama lain yang berguna dalam menciptakan nilai sumberdaya secara bertanggungjawab.

1. Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Setidaknya ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah yang diungkapkan oleh Kuncoro (2004:46-47) yaitu:

- a) perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
- b) sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional
- c) perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas-biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan pada dua tingkat tersebut. oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang soyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan berbagai sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu (Kuncoro, 2004:47):

- a) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya;
- b) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sekitar industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah.

2. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Blakely yang dikutip oleh Kuncoro (2004:48-49), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Tahapan yang berurutan tersebut meliputi (a) pengumpulan dan analisis data; (b) pemilihan strategi pembangunan daerah; (c) pemilihan proyek-proyek pembangunan; (d) pembuatan rencana tindakan; (e) penentuan rincian proyek; (f) persiapan

perencanaan secara keseluruhan dan implementasi. Pengumpulan dan analisis data disini dimaksudkan untuk data-data apa saja yang akan dibutuhkan dalam membuat perencanaan dipersiapkan terlebih dahulu baru setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut, setelah tahap analisis selesai maka tahap berikutnya adalah menetapkan strategi pembangunan daerah untuk dipilih strategi apa yang akan dipaki dan disesuaikan pula dengan proyek-proyek yang dipilih, kemudian setelah pemilihan proyek maka tahap selanjutnya adalah pembuatan rencana tindakan, hal ini dimaksudkan untuk rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan dalam menjalankan proyek pembangunan tersebut, setelah pembuatan rencana tindakan tahap selanjutnya adalah menentukan rincian proyek yang akan dilaksanakan dan implementasikan.

3. Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Bintoro dan Mustopadidjaja yang dikutip oleh Riyadi & Bratakusumah (2004:68) mengungkapkan bahwa yang disebut dengan strategi adalah “keseluruhan langkah (kebijakan-kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan”. Sementara pendapat berbeda dikemukakan oleh Siagian yang dikutip oleh Riyadi & Bratakusumah (2004:69) bahwa “strategi adalah cara menentukan misi pokok suatu organisasi, strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar”. “Strategi merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan. Tentu untuk keseluruhannya ada metode dan tekniknya. Apabila kita artikan strategi sebagai suatu rangkaian kebijakan,

menjadi penting untuk mengetahui cara atau teknik tentang perumusan kebijakan” (Riyadi & Bratakusumah, 2004:68). Dengan demikian kata strategi sama artinya dengan rangkaian kebijakandan juga langkah-langkah pelaksanaan dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

Lawton dan Rose sebagaimana dikutip oleh Riyadi & Bratakusumah (2004:69) juga mengemukakan bahwa *“in order for strategic planning and decision making to be effective, a different set of values needs to be held by senior officials. Vision, leadership, the ability to be proactive, flexible and forward thinking are the essential qualities that need to be present”*. Yang diterjemahkan bahwa “supaya perencanaan strategis dan pengambilan keputusan menjadi efektif, serangkaian nilai-nilai yang berbeda perlu dimiliki oleh pimpinan senior. Visi, kepemimpinan, kemampuan untuk bertindak proaktif, fleksibel, dan berpikiran ke depan adalah persyaratan mendasar yang perlu ada”.

Menurut Olsen dan Eadie sebagaimana dikutip oleh Riyadi & Bratakusumah (2004:280). mendefinisikan perencanaan strategis (RENSTRA) sebagai “upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal-hal seperti itu”. Sehingga didapat kesimpulan bahwa strategi perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya atau suatu cara dalam menentukan langkah-langkah atau suatu kebijakan yang berguna dalam mengatasi sebuah permasalahan atau persoalan yang ada pada suatu daerah demi mencapai tujuan yang diinginkan dengan didasari oleh

pengambilan keputusan yang efektif. Strategi perencanaan pembangunan daerah didasarkan dan disesuaikan pula dengan visi misi daerah. Sementara Bryson (2007:55) mengemukakan terdapat delapan langkah dalam merumuskan perencanaan strategi diantaranya adalah:

- a) memrakarsasi dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
- b) mengidentifikasi mandat organisasi
- c) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
- d) menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman
- e) menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan
- f) mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi
- g) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
- h) menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Dari kedelapan langkah perumusan perencanaan strategi tersebut yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 6 langkah karena langkah yang pertama memrakarsasi dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis serta langkah yang kedua mengidentifikasi mandat organisasi tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Jadi langsung menuju kepada langkah ketiga hingga langkah kedelapan.

E. Potensi Daerah dan Sektor Unggulan

1. Pengertian Potensi Daerah

Potensi daerah menunjuk pada penyelenggaraan ekonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Konsep potensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, proses dan moral. Pendekatan yang dipakai untuk pengembangan potensi daerah

adalah dengan menelaah Produk Domestik regional Bruto untuk bidang ekonomi, komponen sumber daya manusia dan teknologi untuk pengembangan manusia, dan kelembagaan untuk pengembangan pemerintahan (Muktianto dalam Sumihardjo, 2008:12).

“Potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan, dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. (Sumihardjo, 2008:12). Sedangkan potensi ekonomi merupakan salah satu bagian dari banyak potensi daerah. Potensi ekonomi ini ditujukan untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan bermuara pada tujuan akhir yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Potensi bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor-sektor yang ada dalam PDRB.

Menurut Sumihardjo (2008:12) potensi daerah pada umumnya meliputi:

- a. potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan, dan peternakan
- b. potensi kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman kelautan
- c. potensi energi dan sumber daya mineral seperti pembangkit listrik tenaga air skala desa
- d. potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi, dan pariwisata
- e. potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak

Sehingga disimpulkan bahwa potensi daerah pada umumnya terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan, potensi bidang energi dan sumber daya mineral dan perdagangan, serta potensi bidang transmigrasi. Yang kesemua bidang tersebut bisa dikelola dan dimanfaatkan menjadi potensi unggulan.

2. Pengertian Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan faktor anugerah (*endowment factors*). Menurut Sambodo sebagaimana dikutip oleh (Ghufron, 2008:18) sektor unggulan adalah :

Sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/ kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu sektor unggulan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi wilayah. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi.

Sedangkan menurut Rachbini sebagaimana dikutip oleh (Ebtian, 2011 melalui repository.usu.ac.id) sektor unggulan “adalah satu grup sektor/ subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan”, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Manfaat mengetahui sektor unggulan menurut Rachbini sebagaimana dikutip oleh (Ebtian, 2011 melalui repository.usu.ac.id) bahwa sektor unggulan:

Mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Sementara Tarigan (2005:79-80) berpendapat bahwa:

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah.

Disisi yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Tumenggung sebagaimana dikutip oleh (Ebtian, 2011 melalui repository.usu.ac.id) bahwa sektor unggulan adalah:

Sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki peranan paling potensial terhadap perkembangan suatu perekonomian daerah. Sektor unggulan juga dapat dikatakan basis ekonomi yaitu merupakan suatu sektor yang mampu mendorong dalam kegiatan ekonomi untuk mengekspor ke luar daerah yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan disuatu daerah.

3. Kriteria Sektor Unggulan

Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya (Sambodo dalam Ghufron, 2008:18):

pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; *kedua*, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; *ketiga*, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang; *keempat*, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi

Sedangkan menurut Ambardi dan Socia sebagaimana dikutip oleh Ghufron (2008:18-20) kriteria mengenai sektor unggulan daerah lebih ditekankan pada komoditas-komoditas unggulan yang bisa menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah, di antaranya:

- a. komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
- b. komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.
- c. komoditas unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
- d. komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (*complementarity*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
- e. komoditas unggulan memiliki status teknologi (*state of the art*) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
- f. komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
- g. komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) hingga penurunan (*decreasing*). begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
- h. komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
- i. pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.

- j. pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat sepuluh kriteria komoditas sektor unggulan yaitu komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian; komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat; komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional; komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain; komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat; komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal; komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu; komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal; pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan; serta pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

F. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Kusmadi sebagaimana dikutip oleh (Ebtian, 2011 melalui repository.usu.ac.id) bahwa “produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan satu indikator ekonomi untuk mengukur kemajuan pembangunan di suatu wilayah”. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro adalah jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten

Bojonegoro dalam kurun waktu satu tahun dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk Kabupaten Bojonegoro. Dengan kata lain, PDRB adalah jumlah semua nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha di suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun (BPS Kab.Bojonegoro, 2013).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah (output) akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan yaitu sektoral dan penggunaannya. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan dari seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya (BPS Kab.Bojonegoro, 2013).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB yang digunakan dalam

penelitian ini adalah didasarkan pada PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012 (BPS Kab.Bojonegoro, 2013).

2. Kegunaan dan Tujuan PDRB

Adapun kegunaan dari PDRB menurut antara lain :

- a. untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah baik secara sektoral maupun keseluruhan, pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu (kenaikan produksi barang dan jasa).
- b. mengetahui gambaran struktur perekonomian daerah, struktur ekonomi digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian suatu daerah serta untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi suatu daerah.
- c. mengetahui potensi ekonomi daerah, besaran PDRB digunakan sebagai dasar analisis mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) nya.
- d. tingkat perubahan harga yang terjadi
- e. perkembangan pendapatan regional perkapita di Kabupaten Bojonegoro selama satu tahun. pendapatan perkapita, digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.

3. Manfaat Produk Domestik Regional Bruto

Manfaat Produk Domestik Regional Bruto diantaranya adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai bahan perencanaan bidang ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi pemerintahan, dunia usaha maupun masyarakat luas.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2012:3)

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendiskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau kelompok, dan menggunakan angka-angka. Dalam studi ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Penggunaan data angka-angka di dalam pendekatan kualitatif hanya sebagai pelengkap data kualitatif. Penelitian deskriptif dapat dilakukan pada saat ini atau dalam kurun waktu yang singkat, tetapi dapat juga dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Penelitian yang berlangsung saat ini disebut penelitian deskriptif (Sukmadinata, 2006:18).

Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukkann untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual

maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif: peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). (Sukmadinata, 2006:60).

Dengan demikian tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi Kabupaten Bojonegoro dan mendiskripsikan, menjelaskan serta menganalisis potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa dijadikan sebagai sektor unggulan, serta mendiskripsikan strategi-strategi yang harus dilakukan dalam mengembangkan sektor unggulan khususnya pada Kabupaten Bojonegoro.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting bagi penulis, karena dapat memudahkan dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan atau data mana yang tidak diperlukan dalam penelitian ini.

Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus, bahwa fokus itu pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian. (Moleong, 2007:386). Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus

secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk (Moleong, 2007:386).

Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Potensi daerah/ Sektor-sektor Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro

dilihat dari :

a. Potensi/ Sektor-sektor Perekonomian dalam PDRB diantaranya:

- 1) sektor pertanian
- 2) sektor pertambangan dan penggalian
- 3) sektor industri pengolahan
- 4) sektor listrik, gas, dan air bersih
- 5) sektor bangunan
- 6) sektor perdagangan, hotel dan restoran
- 7) sektor angkutan dan komunikasi
- 8) sektor keuangan, persewaan, dan jasa
- 9) sektor jasa-jasa

b. Identifikasi sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro dengan daerah disekitarnya (eks-karasidenan) yang meliputi sektor-sektor perekonomian pada PDRB dengan menggunakan analisis *Locatient Quotient (LQ)*

2. Strategi pemerintah daerah didalam mengembangkan sektor unggulan, dalam penelitian ini sektor paling unggul adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian yakni :

a. Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didalam mengembangkan sektor Migas ditinjau dari

- 1) Dasar hukum dan latar belakang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengembangkan Migas
 - 2) Organisasi yang terlibat dalam strategi pengembangan Migas
 - 3) Tujuan dan sasaran pengembangan Migas
 - 4) Perencanaan strategi pengembangan Migas
 - 5) Strategi pengembangan Migas
 - 6) Perencanaan pelaksanaan dan sosialisasi pengembangan Migas
- b. Strategi Dinas Pertanian dalam mengembangkan pertanian (komoditas padi) ditinjau dari:
- 1) Dasar hukum dan latar belakang Dinas Pertanian dalam mengembangkan pertanian (komoditas padi)
 - 2) Organisasi yang terlibat dalam strategi pengembangan pertanian (komoditas padi)
 - 3) Tujuan dan sasaran pengembangan pertanian (komoditas padi)
 - 4) Perencanaan strategi pengembangan pertanian (komoditas padi)
 - 5) Strategi pengembangan pertanian (komoditas padi)
 - 6) Perencanaan pelaksanaan dan sosialisasi pengembangan pertanian (komoditas padi)

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Pemilihan lokasi atau *site selection* berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti. Pemilihan lokasi perlu dirumuskan dengan jelas.

(Sukmadinata, 2006:102). Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian berhubungan erat dengan pemilihan dan penentuan sumber data. Dalam penelitian kualitatif tidak bisa dilakukan pemilihan lembaga atau orang secara acak (Sukmadinata, 2006:286). Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten Bojonegoro.

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat yang sebenarnya peneliti menangkap keadaan atau obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro
4. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan. Tidak setiap orang yang ada di dalam lembaga yang diteliti menjadi informan, sebab yang diteliti hanya sebagai informan ekspert. “Informan ekspert adalah orang-orang yang bertanggung jawab, benar-benar mengetahui, menguasai dan banyak terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Informan ini diurut menurut keekspert-annya dalam kegiatan atau masalah yang diteliti” (Sukmadinata, 2006:285).

Disisi lain Menurut Lofland dalam (Moleong, 2007:157) mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lailainnya”. Berkaitan dengan hal itu jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Sedangkan jenis data yang digunakan disini bersumber dari 2 data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005:122). Sumber data ini seperti kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro
- b) Kepala Seksi Bidang Produksi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro
- c) Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro
- d) Ketua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro
- e) Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan Dinas Perhubungan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005:122). Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data tertulis yaitu seperti buku, disertasi, tesis, arsip-arsip, dokumen resmi pada instansi-instansi, dan karya ilmiah lainnya.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB Kabupaten Bojonegoro atas dasar harga konstan tahun 2012 dan data PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan pada waktu/ tahun yang sama, Kabupaten Dalam Angka 2013, Produk Domestik Regional Bruto, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Rencana Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Rencana Strategi Dinas Pertanian kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013. Data diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumenter.

1. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individual (Sukmadinata, 2006:216-217). Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan narasumber Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, Kepala Seksi Bidang Produksi Migas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Ketua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, serta Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2006:221-222). Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian penulis disini adalah dokumen seperti data PDRB ADHK dan PDRB perkapita Kabupaten Bojonegoro, PDRB ADHK dan PDRB perkapita daerah eks-karisedenan/ daerah sekitar Bojonegoro yakni (PDRB Kabupaten Tuban, PDRB Kabupaten Lamongan, PDRB Kabupaten Jombang, dan PDRB Kabupaten Mojokerto), dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013.

3. Studi Kapustakaan

Studi kapustakaan maksudnya adalah mempelajari literatur-literatur, mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Yang menjadi instrumen disini adalah peneliti sendiri

2. Pedoman wawancara

sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen penelitian wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian (Sukmadinata, 2006:216).

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan (*field notes*) yaitu merupakan catatan-catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun pengamatan di lapangan yang bisa dikembangkan

G. Analisis Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dan Bikle yang dikutip oleh (Moleong, 2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknik analisis data kualitatif digunakan (Bungin:2005:83).

Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif, karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Data kuantitatif dapat digunakan pada analisis ini sampai pada batas-batas tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam analisis kualitatif. Karena sifat data kuantitatif umumnya kaku dan belum bermakna, maka ketika data tersebut digunakan seluwes mungkin dan yang terpenting pula peneliti harus memaknakaninya sebagaimana yang diinginkan dalam kaidah-kaidah penelitian kualitatif (Bungin:2005:83).

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga analisis data bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dari fenomena. Analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman (1992:16-20) mencakup:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles dan Huberman, 1992:16).

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang mau dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut (Miles dan Huberman, 1992:17)

Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analitis (hal itu juga merupakan kegiatan reduksi data) (Miles dan Huberman, 1992:18). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya (Sugiyono, 2007:95).

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui sektor unggulan atau basis ekonomi yang dimiliki kabupaten Bojonegoro maka dibantu dengan menggunakan rumus LQ. rumus dari teknik LQ adalah sebagai berikut (Arsyad dalam Basuki dan Gayatri, 2009:42):

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus LQ, maka akan dapat diinterpretasikan kategori dari tiap-tiap sektor yang diselidiki dan dihitung, sehingga dapat diklasifikasikan sektor yang menjadi unggulan pada wilayah tersebut. Berikut adalah klasifikasi yang dilakukan berdasarkan nilai LQ (Arsyad dalam Basuki & Gayatri, 2009:42):

$LQ > 1$: maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur)

$LQ < 1$: maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur)

$LQ = 1$: artinya produk yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut

Sedangkan untuk mengetahui jarak kedekatan Kabupaten Bojonegoro dengan kabupaten disekitarnya maka digunakan rumus indeks gravitasi dan interaksi ruang yaitu $I_{1,2} = a (W_1P_1) (W_2P_2) / J^b_{1,2}$. berikut adalah keterangannya (Sabana, 2007:66):

Keterangan:

$I_{1,2}$: interaksi dalam wilayah 1 dan 2

W_1 : PDRB perkapita wilayah 1 (rupiah)

P_1 : jumlah penduduk wilayah 1

W_2 : PDRB perkapita wilayah 2 (rupiah)

P_2 : jumlah penduduk wilayah 2

$J_{1,2}$: jarak antara wilayah 1 dan 2 (meter)

a : konstanta yang nilainya 1

b : konstanta yang nilainya 2

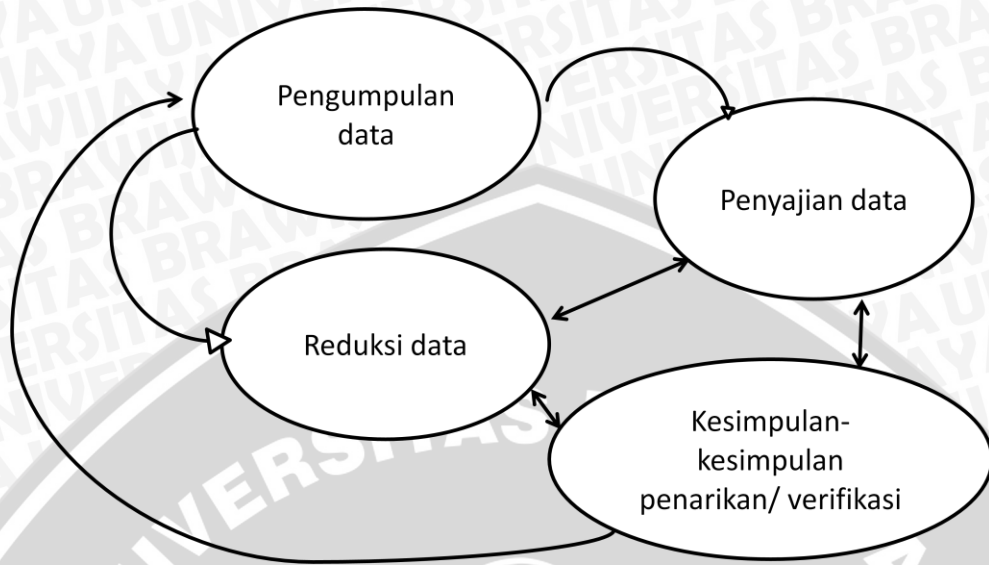
3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif” (Miles dan Huberman, 1992:18-19).

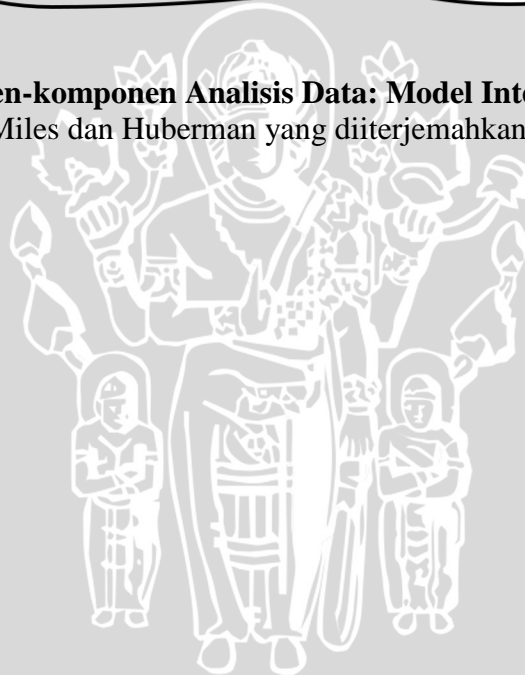
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga

upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya (Miles dan Huberman, 1992:19).

Telah dikemukakan tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Tiga hal utama ini dapat dilihat pada gambar 2 dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Pencatatan data mempersyaratkan reduksi data selanjutnya. Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik, tetapi hal itu menggiring pada pengambilan keputusan (misalnya) untuk menambah kolom lagi pada matriks itu untuk dapat menguji kesimpulan tersebut (Miles dan Huberman, 1992:19-20).



Gambar 2 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif
 (Sumber: Miles dan Huberman yang diiterjemahkan oleh Rohidi, 1992:20)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kondisi Umum Kabupaten Bojonegoro

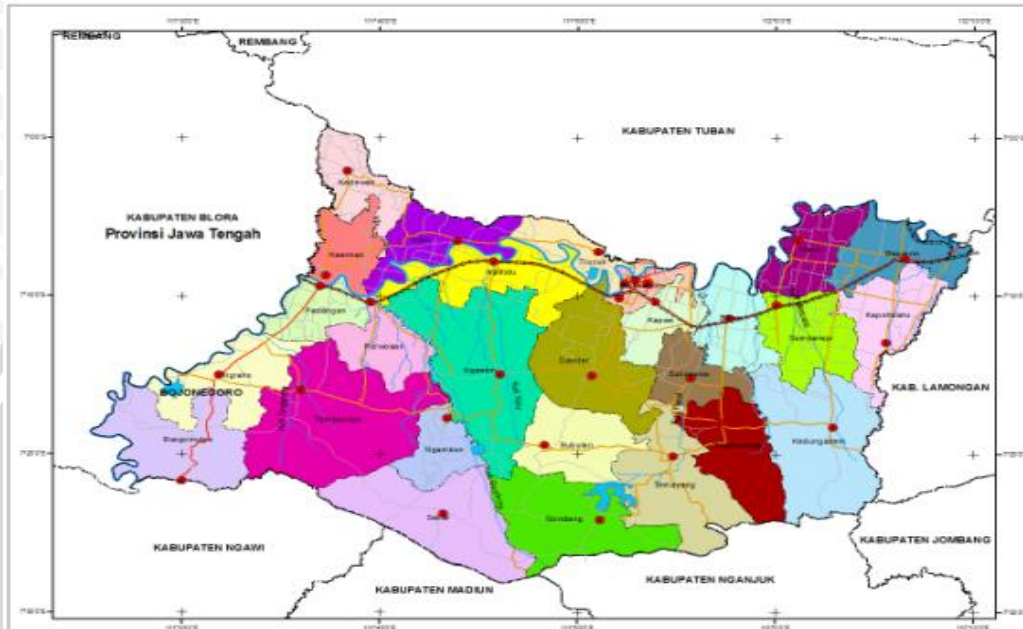
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 38 daerah yang berada di Propinsi Jawa Timur. Berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah, kurang lebih berjarak 110 Km atau dua jam perjalanan darat ke arah barat dari Surabaya, Ibu Kota Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Tuban
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

Sebelum tahun 2011 wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 Kecamatan, kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran 1 Kecamatan baru di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Gayam yang terdiri dari 12 desa yang sebelumnya merupakan bagian dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kalitidu dan Ngasem. Pemekaran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga secara administratif Kabupaten Bojonegoro saat ini

terbagi menjadi 28 Kecamatan dengan 419 desa dan 11 Kelurahan. Berikut adalah gambar peta administrasi Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 3: Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro
(Sumber: BAPPEDA Kab. Bojonegoro)

b. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada di bagian paling barat wilayah Propinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat $6^{\circ} 59'$ sampai $7^{\circ} 37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 25'$ sampai $112^{\circ} 09'$ Bujur Timur, dengan jarak ± 110 km dari ibu kota propinsi. Secara Geografis, Kabupaten Bojonegoro dilalui oleh sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Propinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara.

c. Kondisi Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Lebih jelas kondisi topografi Kabupaten Bojonegoro, disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah

No	Kemiringan Tanah (%)	Luas (Ha)	(Persen)
1	0-2 %	127.109	55,10
2	2-15 %	83.429	36,16
3	15-40 %	17.312	7,50
4	> 40 %	2.856	1,24
	Jumlah	230.706	100

(Sumber: RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018)

Dari tabel tersebut dapat dilihat wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan dengan kemiringan yang relatif datar. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel bahwa 91,26 % wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki kemiringan antara 0-15 %. Kabupaten Bojonegoro tergolong wilayah dengan dataran rendah, namun masih ada daerah yang merupakan dataran

tinggi yaitu termasuk dalam Zona Pegunungan Kendeng bagian barat. Menurut Van Bemmelen (1949), Pegunungan Kendeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat yang terletak di antara Gunung Unggaran dan Solo (sebelah utara Ngawi), bagian tengah yang membentang hingga Jombang dan bagian timur mulai dari timur Jombang hingga Delta Sungai Brantas dan menerus ke Teluk Madura.

d. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Bojonegoro dijelaskan berdasarkan sumber air yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro yaitu air sungai, mata air, air tanah. Selain itu jenis sumber daya alam diatas juga terdapat sumber daya alam air yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah dan Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan waduk dan saluran irigasi. Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi hidrologi Kabupaten Bojonegoro.

1) daerah aliran sungai

daerah aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam beberapa ordo sungai yang membedakan antara sungai besar, sungai kecil, dan anak sungai, dimana pada kabupaten wilayah Bojonegoro terdapat satu sungai yang menjadi hulu dari semua sungai yaitu Sungai Bengawan Solo. Sungai ini merupakan sungai besar yang menjadi induk sungai dari seluruh sungai di Kabupaten Bojonegoro. Sementara sungai lainnya terklasifikasi sebagai anak sungai.

2) debit mata air

sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro berada di 11 lokasi yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Dander, Gondang, Sekar, Baureno, Padangan, Temayang, dan Bubulan. Besaran debit dari mata air tersebut bervariasi dengan *range* antara 1 hingga 825 liter per detik

3) air tanah

dilihat dari sudut pandang geomorfologi, terdapat tiga sistem air tanah di Kabupaten Bojonegoro yakni Sistem Akuifer Perbukitan Selatan (SAPS), Sistem Akuifer Dataran Bojonegoro (SADB) dan Sistem Akuifer Perbukitan Utara (SAPU). Sistem akuifer SAPS dan SAPU secara hidrogeologis sebenarnya lebih sesuai disebut sebagai akuitard.

4) waduk

pada wilayah kabupaten Bojonegoro terdapat 36 waduk yang berfungsi untuk mengatur sumber air dan untuk menampung air pada waktu surplus air sehingga dapat digunakan pada waktu terjadi kekurangan air. Selain itu waduk juga berfungsi untuk mengairi sawah dengan mencukupi kebutuhan air pada setiap masa tanam sehingga dapat berproduksi secara optimal. Terkait dengan keberadaan waduk pacal sebagai pusat suplai air untuk irigasi kawasan sawah kabupaten Bojonegoro maka terdapat saluran irigasi dengan kelas primer yang ditetapkan menjadi kawasan lindung setempat. Saluran irigasi primer ini secara keseluruhan memiliki panjang saluran sepanjang 47,157 km.

e. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang beriklim tropis terdiri atas dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim hujan (November-Maret). Untuk memonitor curah hujan yang jatuh, hingga tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro terdapat 22 buah stasiun penangkar hujan yang tersebar di 16 kecamatan. Dari pantauan tersebut hari hujan pada tahun 2009 sebesar 92 hari dengan curah hujan rata-rata 150 mm, sedangkan pada tahun 2010 naik menjadi 134 hari dengan curah hujan mencapai 221 mm dan pada tahun 2011 turun menjadi 99 hari dengan curah hujan rata-rata sebesar 146 mm.

f. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2011-2031 yang peneliti peroleh dari RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 menyebutkan bahwa, penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2010 didominasi oleh guna lahan hutan yaitu seluas 93.833,36 Ha atau 40,67 % dari luas keseluruhan lahan. Penggunaan tanah lainnya berupa sawah dan permukiman. Pada pemanfaatan lahan sering terjadi perubahan tata guna lahan yang disebabkan oleh proses perkembangan wilayah dan kebutuhan pergerakan masyarakat. Tutupan lahan atau penggunaan lahan merupakan salah satu unsur indikator yang berpengaruh terhadap laju perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah sebesar 1.474 km² atau 230.706 Ha.

g. Keadaan Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012 mencapai 1.472.865 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 742.181 jiwa dan perempuan mencapai 730.684 jiwa, dengan *sex ratio* mencapai 101,57 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bojonegoro mencapai 638,42 jiwa per km². Lebih jelas kondisi kependudukan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 dilihat pada tabel 3 di bawah ini.



Tabel 3 Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah (jiwa)	Sex Ratio	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan			
1	Margomulyo	12.678	12.808	25.486	98,99	182,46
2	Ngraho	26.317	25.733	52.050	102,27	728,18
3	Tambakrejo	30.738	30.447	61.185	100,96	292,02
4	Ngambon	6.716	6.613	13.329	101,56	273,98
5	Sekar	15.407	15.287	30.694	100,78	235,67
6	Bubulan	8.483	8.527	17.010	99,48	200,76
7	Gondang	14.408	14.239	28.647	101,19	267,70
8	Temayang	20.788	20.453	41.241	101,64	330,80
9	Sugihwaras	26.878	26.250	53.128	102,39	609,62
10	Kedungadem	47.393	46.627	94.020	101,64	647,74
11	Kepohbaru	37.496	36.015	73.511	104,11	923,04
12	Baureno	45.368	43.933	89.301	103,27	1.345,50
13	Kanor	33.621	33.246	66.867	101,13	1.118,55
14	Sumberrejo	39.981	39.541	79.522	101,11	1.038,42
15	Balen	36.186	35.652	71.838	101,50	1.187,01
16	Sukosewu	24.487	23.651	48.138	103,53	1.013,86
17	kapas	29.045	28.066	57.111	103,49	1.231,37
18	Bojonegoro	49.576	49.950	99.526	99,25	3.871,10
19	Trucuk	22.563	22.349	44.912	100,96	1.223,43
20	Dander	47.567	46.757	94.324	101,73	796,92
21	Ngasem	52.635	33.830	104.145	204,49	527,96
22	Kalitidu	27.977	27.464	55.441	101,87	840,65
23	Malo	18.014	17.959	35.973	100,31	549,96
24	Purwosari	16.883	16.985	33.868	99,40	543,45
25	Padangan	25.818	25.540	51.358	101,09	1.222,81
26	Kasiman	17.836	17.687	35.523	100,84	685,77
27	Kedewan	7.325	7.392	14.717	99,09	260,43
28	Gayam	-	-	-	-	-
Total		742.180	730.682	1.472.865	101,57	638,42

(Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2013)

Keterangan: km² = kilometer persegi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persebaran jumlah penduduk maupun kepadatan di masing-masing wilayah. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 99.526 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Ngambon dengan jumlah penduduk hanya mencapai 13.329 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012 adalah 639 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Bojonegoro yaitu mencapai 3.871 jiwa/km².

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sex ratio, dan kepadatan masing-masing kecamatan, jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu aspek penting dalam aspek demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif dan non produktif di suatu wilayah. Lebih jelas jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro

Kelompok Umur	Jumlah Total
0-5	93.393
6-10	101.670
11-16	130.021
17	22.751
18	22.297
19-25	153.826
26-30	128.676
31-35	135.308
36-40	121.868
41-45	118.400
46-50	106.339
51-55	92.568
56-59	58.890
>/ 60	186.868
Jumlah/ Total	1.472.865

(Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2013)

Adapun jumlah penduduk berdasarkan latar belakang mata pencaharian yaitu banyaknya penduduk di Kabupaten Bojonegoro yang bekerja diberbagai lapangan usaha pada tahun 2012 sebanyak 731.893 jiwa. Sebanyak 318.648 terserap disektor pertanian, sebanyak 19.090 terserap disektor pertambangan, sebanyak 55.337 jiwa terserap disektor industri, sebanyak 6.365 jiwa terserap disektor listrik, sebanyak 46.390 terserap disektor bangunan, sebanyak 124.216 jiwa terserap disektor perdagangan, sebanyak 12.533 jiwa terserap disektor perhubungan, sebanyak 11.725 jiwa terserap disektor

keuangan, dan sebanyak 137.589 jiwa terserap disektor jasa-jasa (Lihat Tabel 5 di bawah ini).

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Mata Pencapaian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012

No	Lapangan Usaha	Tahun 2012 (jiwa)
1	Pertanian	318.648
2	Pertambangan	19.090
3	Industri	55.337
4	Listrik	6.365
5	Bangunan	46.390
6	Perdagangan	124.216
7	Perhubungan	12.533
8	Keuangan	11.725
9	Jasa-jasa	137.589
Jumlah/ Total		731.893

(Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2013)

h. Kondisi Perekonomian

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah (*output*) akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu sektoral dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan dari seluruh komponen nilai tambah bruto uang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. PDRB yang ada di Kabupaten Bojonegoro baru disisi sektoral saja.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data PDRB yang disajikan adalah data PDRB tahun 2012 atas harga konstan tahun 2000. Besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusi persentase tiap sektor di Kabupaten Bojonegoro menurut harga konstan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) dan Distribusi Persentase Tiap Sektor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 (%)

No	Lapangan Usaha/ Sektor	Nilai (juta rupiah)	(%)
1	Pertanian	2.314.455,46	25%
2	Pertambangan dan penggalian	2.721.579,17	29%
3	Industri pengolahan	705.912,22	8%
4	Listrik, gas, dan air bersih	60.341,71	1%
5	Bangunan	329.658,31	4%
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	1.605.566,98	17%
7	Pengangkutan dan komunikasi	349.461,99	4%
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	455.597,64	5%
9	Jasa-jasa	837.007,85	9%
Total		9.379.581,33	100%

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan bagian terpenting dalam mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Secara riil PDRB perkapita menunjukkan kemampuan daya beli penduduk. Pada tahun 2010 PDRB perkapita Kabupaten Bojonegoro atas dasar harga konstan tahun 2000 senilai 6.714.624, pada tahun 2011 senilai 7.293.922, dan pada tahun 2012 senilai 7.701.754 (Lihat Tabel 7).

Tabel 7 PDRB Perkapita Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2012

No	Tahun	PDRB Perkapita
1	2010	6.714.624
2	2011	7.293.922
3	2012	7.701.754

(Sumber: PDRB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

i. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi dari Kabupaten Bojonegoro adalah “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”. Adapun makna yang dimiliki dari visi yaitu Bojonegoro, lumbung pangan negeri bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan. Sedangkan Bojonegoro, sebagai lumbung energi negeri bermakna bahwa Bojonegoro sebagai Kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumberdaya energi minyak dan gas bumi serta sumberdaya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang

tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.

Adanya visi tersebut tidak luput dari sebuah misi dalam mencapai sebuah visi Kabupaten Bojonegoro. Guna mencapai sebuah visi tersebut maka Kabupaten Bojonegoro menetapkan 6 misi diantaranya:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah. Dengan tujuan meningkatnya perkembangan ekonomi sesuai dengan potensi migas dan agroindustri yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehat, terpelajar, dan sejahtera lahir dan batin.
- 3) Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas. Dengan tujuan meningkatnya infrastruktur barang dan jasa yang handal dan berdaya saing
- 4) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Dengan tujuan terwujudnya Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat hunian yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.
- 5) Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan ketertiban dan kebahagiaan masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis. Dengan tujuan terciptanya

modal sosial masyarakat madani dan partisipatif sebagai dasar bagi terbentuknya kondisi yang kondusif untuk pembangunan.

- 6) Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

2. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral”. Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral;
- 5) Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang energi dan sumber daya mineral;
- 6) Pemberian rekomendasi teknis sebagai persyaratan pengajuan perizinan dibidang energi dan sumber daya mineral;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan, sehingga pada gilirannya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi dinamisor dan akselator pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan khususnya di bidang sumber daya mineral dan energi. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut serta berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, maka visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro adalah “Terwujudnya pemantapan tata kelola energi dan sumber daya mineral

secara lestari guna meningkatkan daya guna dan daya saing Kabupaten Bojonegoro”.

2. Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan. Oleh karenanya, misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a) memantapkan kebijakan strategis tata kelola energi dan sumber daya mineral yang dapat menunjang upaya perkuatan struktur perekonomian daerah;
- b) meningkatkan koordinasi dan sinergi penanganan/ pengelolaan/ pengawasan energi dan sumber daya mineral dengan menitikberatkan pada pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta;
- c) mendorong keberdayaan daerah dalam memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal guna kesejahteraan masyarakat;
- d) meningkatkan upaya pengkajian, pengendalian dan evaluasi kinerja secara akuntabel
- e) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan *clean and good governance* serta pelayanan prima pada masyarakat

3. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Bupati Bojonegoro No. 12 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian. Untuk melaksanakan tugas di atas maka Dinas Pertanian Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian
- 4) pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang pertanian
- 5) pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pertanian
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya

b. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro

1. Visi

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan manajemen pembangunan pertanian yang modern dan meningkatkan keberpihakan kepada petani yang tinggi untuk memanfaatkan peluang yang ada selanjutnya dirumuskan dalam bentuk visi pembangunan pertanian Kabupaten Bojonegoro dimasa

mendatang adalah “Mewujudkan petani yang maju, mandiri, berdaya saing, dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkesinambungan guna mendukung Bojonegoro sebagai lumbung pangan”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan pertanian tersebut diperlukan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya. Adapun misi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a) mengoptimalkan produktivitas komoditas pertanian dengan memperhatikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial bidang pertanian secara seimbang berkesinambungan dan bertanggung jawab
- b) meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) petani dalam upaya mengelola komoditas pertanian
- c) membangun infrastruktur bidang pertanian sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- d) mengupayakan ketersediaan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat dosis, dan tersedia secara merata sesuai kebutuhan petani
- e) memanfaatkan peran teknologi informasi dalam upaya menjembatani proses alih teknologi pertanian, penyuluhan pertanian, dan komunikasi antar stakeholder bidang pertanian.

B. Penyajian Data Penelitian

1. Potensi Daerah/ Sektor-sektor Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro

a. Potensi/ Sektor-Sektor Perekonomian dalam PDRB

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Adapun sektor-sektor yang membentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup dimana hasilnya akan digunakan memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi saja. Kegiatan pertanian pada umumnya berupa cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan, penebangan kayu, dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar. Sektor pertanian meliputi sub sektor diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain serta hasil-hasil produk ikutannya. Kapasitas produksi padi pada tahun 2012 mencapai 803.059 ton; jagung pada tahun 2012 mencapai 174.697 ton; ubi kayu pada tahun 2012 mencapai 99.180 ton dan ubi jalar pada tahun 2012 mencapai 7.728 ton.

b) Tanaman perkebunan

Komoditi yang dicakup disini adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapuk, kapas, tebu, tembakau, dan sebagainya. pada tanaman perkebunan tembakau Virginia pada tahun 2012 luas areal tanaman mencapai 9.441 Ha dengan kapasitas produksi 7.977 ton sedangkan tembakau jawa luas areal tanaman 2.892 Ha dengan kapasitas produksi 2.892 ton Seperti yang dikatakan oleh Ibu E.S (p, 53 tahun) bahwa:

“Pada tahun 2011 tembakau mencapai produksi 14.509 ton, tahun 2012 menurun menjadi 7.977 ton. Hasil tembakau kering pada waktu sebelum tahun 2012 sering dijual kepada perusahaan rokok milik PT. Gudang Garam namun karena pada waktu saat ini yaitu mulai tahun 2012 sampai sekarang tahun 2014 perusahaan PT. Gudang Garam sudah tutup dan tidak buka. Akibat dikarenakan PT. Gudang Garam pada saat ini sudah tidak buka mungkin menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah produksi tembakau di tahun 2012, karena pemasok terbanyak tembakau kering sebelumnya adalah dari PT. Gudang Garam. Akan tetapi, meskipun PT. Gudang Garam sudah tidak buka para petani Bojonegoro masih bisa menjual hasil tembakau kering mereka kepada perusahaan rokok lain misalnya PT. Djarum, Sadana, dan

UD.Soponyono meski bahan baku yang diserap oleh perusahaan rokok tersebut tidak terlalu banyak” (wawancara di kantor Dinas Perhubungan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro).

sementara luas areal tanaman tebu 663 hektar dengan produksi kristal gula mencapai 2.483 ton. Selain itu juga masih terdapat sejumlah tanaman hortikultura seperti belimbing (5.574 kwintal) dengan sentra utama di Desa Nringin Rejo Kalitidu, Mangga dengan sentra di Kecamatan Padangan, salak (8.580 kwintal) dengan sentra di Desa Wedi Kapas, Pisang Raja dengan sentra di Kecamatan Ngasem dan Purwosari.

c) Peternakan dan hasil-hasilnya

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti sapi, kerbau, kambing, susu, telur, kulit, dan hasil ternak lainnya.

d) Kehutanan

Subsektor kehutanan mencakup pengusaha hutan kayu, pengusaha hutan bukan kayu, jasa kehutanan dan usaha kehutanan lainnya. Kegiatan pengusaha hutan kayu meliputi pengusaha hutan jati, pinus, mahoni, sonokeling, cendana, dan lainnya. Pengusaha hutan bukan kayu meliputi komoditas damar, getah, jelutung, arang, bambu dan lainnya. Sedangkan usaha kehutanan lainnya berupa jasa kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi, perburuan satwa liar dan sejenisnya. Kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro masih memiliki vegetasi dengan kerapatan tinggi dengan

kerapatan tinggi seluas 25.119 hektar. Lokasinya berada di Kecamatan Kasiman, Margumulyo, Bubulan, Ngambon, dan Gondang. Untuk hutan dengan kerapatan vegetasi rendah mencapai 72.599,18 hektar. Adapun komoditas utama hutan di Bojonegoro adalah kayu jati dan kayu rimba.

e) Perikanan

Komoditas yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan darat, perairan umum, kolam, serta pembibitan ikan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 di bawah ini.

Tabel 8 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Tanaman bahan makanan	1.605.596,21
Tanaman perkebunan	146.463,54
Peternakan	396.558,70
Kehutanan	128.025,15
Perikanan	37.811,86
Total	2.314.455,45

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 9 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Tanaman bahan makanan	29.602.961,48
Tanaman perkebunan	7.632.728,73
Peternakan	9.341.723,33
Kehutanan	975.927,5
Perikanan	6.910.601,73
Total	54.463.942,77

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Komoditas yang dicakup dalam sektor ini adalah minyak mentah dan gas alam untuk subsektor migas. Tambang minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Bojonegoro terdapat di Blok Wilayah Cepu dan Wilayah Sukowati. Di Blok Cepu (Kecamatan Ngasem, Desa Mojodelik, Brabohan, Wonorejo) diperkirakan terdapat potensi minyak bumi dan gas alam sebanyak 250 juta barel dengan estimasi produksi puncak 160.000 sampai 170.000 barel per hari dan masa produksi selama 20 tahun. Untuk wilayah Sukowati diperkirakan terdapat potensi minyak bumi dan gas alam 35 MMBOE dengan estimasi produksi puncak 25.000 barel per hari. Dan hingga saat ini, eksplorasi yang telah dilakukan menggunakan 125 sumur yang meliputi 106 sumur produksi, 18 sumur injeksi air, dan 2 sumur injeksi gas. Selain penambangan migas tersebut terdapat penambangan minyak secara tradisional. Penambangan tradisional dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana untuk pengambilan minyak (sumur) dengan rata-rata kedalaman 500 meter dan dengan sumur pompa tangan (penemuan baru) dengan kedalaman 28 m, sedangkan sebagian lagi menggunakan teknologi yang memanfaatkan mesin mobil sebagai penggerak.

Untuk subsektor penggalian meliputi penggalian komoditas pasir, batu kali, tanah, koral, tanah liat dan lainnya. Potensi hasil tambang yang telah dapat digali antara lain bahan tambang Galian C (pasir, tanah urug, batu-batuan) dan tambang minyak bumi yang saat ini dalam proses eksplorasi.

Selain itu, wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi Galian C yang cukup beragam meliputi *gypsum*, bentonit, fosfat, batu gamping, dan pasir serta tanah urug. Disamping itu terdapat juga batu gunung, batu onyx, dan batu lempung. Deposit yang dimiliki masing-masing bahan tambang cukup besar. Gypsum diperkirakan memiliki cadangan seluas 446 Ha di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Ngasem. Bentonit tersebar di Kecamatan Temayang, Bubulan, dan Dander dengan jumlah luasan mencapai 466 Ha. Sepanjang Sungai Bengawan solo merupakan cadangan pasir yang tidak terukur jumlahnya. Sedangkan tanah urug dengan cadangan 14,5 Ha tersebar di beberapa wilayah, salah satunya Desa Geneng Kecamatan Margomulyo. Data penggalian diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro. Adapun rincian kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 10 dan 11 di bawah ini.

Tabel 10 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Pertambangan migas	2.605.616,51
Pertambangan non migas	-
Penggalian	115.962,66
Total	2.721.579,17

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 11 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Pertambangan migas	1.798.951
Pertambangan non migas	754.210,34
Penggalian	5.866.345,97
Total	8.419.507

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

3) Sektor Industri Pengolahan

Kegiatan industri adalah kegiatan untuk mengubah bentuk baik secara mekanis maupun kimiawi dari bahan organik atau anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan mesin atau tangan, baik dibuat didalam sebuah pabrik atau rumah tangga. Menurut kegiatan utama yang dihasilkan kegiatan sektor industri pengolahan dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok komoditi sebagai berikut:

- a. industri makanan, minuman, dan tembakau
- b. industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki
- c. industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya
- d. industri kertas dan barang cetakan
- e. industri pupuk, barang kimia dan barang dari karet
- f. industri semen dan barang galian bukan logam
- g. industri logam dasar, besi dan baja
- h. industri alat angkutan, mesin dan peralatannya
- i. industri pengolahan lainnya

Adapun rincian kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 di bawah ini.

Tabel 12 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Makanan, minuman, dan tembakau	432.217,47
Tekstil, barang dari kulit & alas kaki	4.541,59
Barang dari kayu & hasil hutan lainnya	84.254,48
Kertas & barang cetakan	50.617,20
Pupuk kimia & barang dari karet	13.909,88
Semen & barang galian bukan logam	66.227,03
Logam dasar besi & baja	-
Alat angkutan mesin & peralatannya	1.319,71
Barang lainnya	52.824,86
Total	705.912,22

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 13 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Makanan, minuman, dan tembakau	53.809.756,63
Tekstil, barang dari kulit & alas kaki	2.823.991,38
Barang dari kayu & hasil hutan lainnya	2015165,51
Kertas & barang cetakan	16749735,74
Pupuk kimia & barang dari karet	9918950,24
Semen & barang galian bukan logam	3208264,78
Logam dasar besi & baja	3962094,37
Alat angkutan mesin & peralatannya	3190012,34
Barang lainnya	3190012,34
Total	98.017.056,57

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sektor ini meliputi tiga subsektor yaitu subsektor listrik, subsektor gas, dan subsektor air bersih. Sejauh ini kegiatan pada subsektor gas di Kabupaten Bojonegoro belum ada sehingga yang dibahas pada sektor ini hanya subsektor listrik dan air bersih.

a. Listrik

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan kelistrikan baik yang diusahakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun non PLN.

b. Gas

Komoditas ini tidak dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro

c. Air Bersih

Subsektor air minum mencakup semua kegiatan yang diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Adapun rincian kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 14 dan 15 di bawah ini.

Tabel 14 Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Listrik	57.024,72
Gas	-
Air Bersih	3.316,99
Total	60.341,71

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 15 Kontribusi Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Listrik	3.869.377,14
Gas	1.037.149,12
Air Bersih	331.905,43
Total	5.238.431,69

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

5) Sektor Bangunan/ Konstruksi

Sektor bangunan/ konstruksi mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, air minum, telepon dan sebagainya.

Adapun rincian kontribusi sektor bangunan/ konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 16 dan 17 di bawah ini.

Tabel 16 Kontribusi Sektor Bangunan/ Konstruksi Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Bangunan/ Konstruksi	329.658,31

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 17 Kontribusi Sektor Bangunan/ Konstruksi Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Bangunan/ Konstruksi	12.840.565,41

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

6) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor ini terdiri dari tiga subsektor yaitu perdagangan, subsektor hotel, dan subsektor restoran. Pada dasarnya kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan perdagangan, penyediaan akomodasi, hotel, serta penjualan makanan dan minuman seperti restoran, warung makan, kedai, pedagang keliling dan sejenisnya.

a. Perdagangan

Perhitungan nilai tambah subsektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang (*commodity flow*), yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta komoditi impor yang diperdagangkan.

b. Hotel

Kegiatan subsektor ini mencakup semua hotel dan berbagai jenis penginapan.

c. Restoran

Data jumlah restoran, depot, rumah makan, warung, dan sebagainya diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bojonegoro.

Adapun rincian kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 18 dan 19 di bawah ini.

Tabel 18 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Perdagangan	1.494.688,96
Hotel	12.634,28
Restoran	98.243,74
Total	1.605.566,98

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 19 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Perdagangan	105.151.262,62
Hotel	3.589.853,75
Restoran	19.634.382,24
Total	128.375.498,61

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

7) Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan angkutan umum untuk barang dan penumpang melalui darat, laut, sungai/ danau, dan udara baik bermotor

maupun tidak bermotor. Sektor ini mencakup pula jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

a. Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor pengangkutan terdiri atas jasa angkutan kereta api, angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan

b. Angkutan Rel

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kereta api melalui jalan lintas khusus kereta api (rel).

c. Angkutan Jalan Raya

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor seperti bus, truk, MPU, ojek, becak, dokar, dan sebagainya.

d. Jasa Penunjang Angkutan

Subsektor ini meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan seperti terminal, parkir, keagenan barang, dan penumpang, ekspedisi, biro perjalanan dan jasa penunjang angkutan lainnya.

e. Komunikasi

Subsektor ini terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu Pos dan Giro, Telekomunikasi dan Jasa Penunjang Komunikasi yaitu:

1) Pos dan giro

Kegiatan ini meliputi pemberian jasa dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya.

2) Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegrap, dan teleks.

3) Jasa penunjang komunikasi

Kegiatan subsektor ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan komunikasi seperti wartel, warnet, dan telepon seluler.

Adapun rincian kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 20 dan 21 di bawah ini.

Tabel 20 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Angkutan rel	33.837,72
Angkutan jalan raya	222.656,44
Angkutan laut	-
Angkutan penyeberangan	-
Angkutan udara	-
Jasa penunjang angkutan	15.873,10
Pos & telekomunikasi	69.967,67
Jasa penunjang komunikasi	7.127,06
Total	349.461,99

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 21 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Angkutan rel	175.240,83
Angkutan jalan raya	4.595.499,74
Angkutan laut	1.033.556,67
Angkutan penyeberangan	55.844,61
Angkutan udara	3.459.203,39
Jasa penunjang angkutan	5.640.418,57
Komunikasi	15.681.149,51
Total	30.640.913,32

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

8) Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor ini meliputi subsektor Bank, lembaga keuangan bukan Bank, sewa bangunan, dan jasa perusahaan.

a. Bank

Angka nilai tambah bruto subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia cabang Surabaya. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode deflasi.

b. Lembaga keuangan bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi, yayasan dan pegadaian.

c. Sewa bangunan

Subsektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah/ bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumah tangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah bangunan itu milik sendiri atau disewa.

d. Jasa perusahaan

Subsektor ini meliputi persewaan alat transportasi darat tanpa operator, persewaan lainnya, jasa pengacara, jasa akuntan, jasa pengolahan data, serta jasa periklanan.

Adapun rincian kontribusi sektor keuangan, persewaan, & jasa perusahaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 22 dan 23 di bawah ini.

Tabel 22 Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Bank	95.465,79
Lembaga keuangan bukan Bank	97.911,22
Jasa penunjang keuangan	-
Sewa bangunan	227.072,92
Jasa perusahaan	35.147,71
Total	455.597,64

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 23 Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Bank	5.689.640,29
Lembaga keuangan bukan Bank	3.028.945,58
Jasa penunjang keuangan	-
Sewa bangunan	8.173.806,71
Jasa perusahaan	4.889.947,4
Total	21.782.339,98

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

9) Sektor Jasa-jasa

Sektor ini dibagi menjadi dua subsektor yaitu subsektor jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Subsektor jasa pemerintahan umum meliputi administrasi pemerintah dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya.

Sedangkan subsektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Adapun rincian kontribusi sektor jasa-jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 24 dan 25 di bawah ini.

Tabel 24 Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)

Subsektor	Kabupaten Bojonegoro
Adm. pemerintahan & pertahanan	491.799,68
Jasa pemerintahan lainnya	-
Jasa sosial kemasyarakatan	93.633,65
Jasa hiburan dan kebudayaan	29.881,05
Jasa perorangan dan RT	221.693,47
Total	837.007,85

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012)

Tabel 25 Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB ADHK Tahun 2012 Propinsi Jawa Timur (juta rupiah)

Subsektor	Propinsi Jawa Timur
Pemerintahan umum	10.474.699,67
Jasa sosial kemasyarakatan	2.956.494,73
Jasa hiburan dan kebudayaan	1.379.648,59
Jasa perorangan dan RT	19.073.748,33
Total	33.884.591,32

(Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur Tahun 2012)

b. Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dengan Daerah di Sekitarnya (Eks Karesidenan)

Sebelum menentukan atau mengidentifikasi sektor unggulan, peneliti menyajikan data indeks gravitasi dan model interaksi terlebih dahulu, dapat

dilihat pada tabel 26. Adanya indeks gravitasi tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa kuat keterkaitan (*inter linkage*) antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten lain di sekitar (Eks-Karasidenan) Bojonegoro. Rumus dari indeks gravitasi adalah $I_{1,2}=a(W_1P_1)(W_2P_2)/J_{1,2}^b$ (Sabana, 2007:66).

Keterangan:

$I_{1,2}$: interaksi dalam wilayah 1 dan 2

W_1 : PDRB perkapita wilayah 1 (rupiah)

P_1 : jumlah penduduk wilayah 1

W_2 : PDRB perkapita wilayah 2 (rupiah)

P_2 : jumlah penduduk wilayah 2

$J_{1,2}$: jarak antara wilayah 1 dan 2 (meter)

a : konstanta yang nilainya 1

b : konstanta yang nilainya 2

Tabel 26 Indeks Gravitasi Dan Model Interaksi Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Daerah di sekitarnya Tahun 2012

No	Kabupaten	Jarak dari Kabupaten Bojonegoro (km)	Nilai Indeks Gravitasi
			Tahun 2012
1	Tuban	65	29,497,285,826,180,877.09
2	Lamongan	63	21,827,634,747,051,164.05
3	Jombang	85	13,311,678,734,540,480.70
4	Mojokerto	115	8,557,979,957,593,602.57

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

Dari hasil perhitungan diatas terlihat interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban memiliki indeks gravitasi tertinggi. Sedangkan untuk mengetahui potensi-potensi sektor ekonomi yang mendukung PDRB Kabupaten Bojonegoro maka digunakan alat bantu hitung analisis LQ yaitu untuk mengetahui apakah sektor ekonomi tersebut termasuk sektor basis

atau non basis. Tahun analisis yang digunakan adalah tahun 2012. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang tergolong sektor unggulan dan termasuk ke dalam sektor basis (*economic basic*) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan merupakan sektor basis (*non basic sector*). Adapun rumus dari LQ menurut Arsyad dalam basuki dan gayatri (2009:42) adalah sebagai berikut:

Keterangan :

- vi : pendapatan (PDRB) sektor tertentu pada suatu daerah (Kabupaten Bojonegoro)
- vt : pendapatan total (PDRB) daerah (Kabupaten Bojonegoro)
- Vi : pendapatan sektor tertentu pada daerah referensi (Propinsi Jawa Timur)
- Vt : pendapatan total (PDRB) daerah referensi (Propinsi Jawa Timur)

Apabila hasil perhitungan tersebut menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan *Locatient* (*LQ*) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27 Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun 2012		LQ	Ranking
		Kabupaten Bojonegoro	Propinsi Jawa Timur		
1	Pertanian	2.314.455,46	54.463.942,77	1,78	2
2	Pertambangan dan penggalian	2.721.579,17	8.419.507,31	13,57	1
3	Industri pengolahan	705.912,22	98.017.056,57	0,30	9
4	Listrik, gas, dan air bersih	60.341,71	5.238.431,69	0,48	7
5	Bangunan	329.658,31	12.840.565,41	1,08	3
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	1.605.566,98	128.375.498,61	0,52	6
7	Pengangkutan dan komunikasi	349.461,99	30.640.913,32	0,48	8
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	455.597,64	21.782.339,98	0,88	5
9	Jasa-jasa	837.007,85	33.884.591,32	1,04	4
Total		9.379.581,33	393.662.846,98	20,13	

Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014

(Keterangan: kolom warna kuning = sektor unggulan)

Berdasarkan tabel 27 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien LQ untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan bahkan basis yang cenderung untuk mengekspor ke daerah lain. Hal ini didukung dengan program yang baik yang bersifat intensifikasi lahan pertanian yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

2) Sektor pertambangan dan penggalian

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan dan basis yang cenderung mengekspor ke daerah lain. Hal ini terbukti dengan adanya potensi migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

3) Sektor industri pengolahan

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Hal ini terbukti dengan belum banyaknya industri yang tersebar secara merata

4) Sektor listrik, gas, dan air bersih

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Hal ini diakibatkan karena lebih dari 60% lokasi dusun gelap dalam kawasan hutan termasuk kategori terisolir berat

5) Sektor bangunan/ konstruksi

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan dan basis. Hal ini terbukti dengan adanya program pavingisasi, pembangunan jalur kereta api ganda, perbaikan jalan, dan pembangunan ruko merupakan upaya pemerintah dalam rangka perbaikan infrastruktur.

6) Perdagangan, hotel, dan restoran

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis dan cenderung melakukan impor dari daerah lain. Hal ini juga diakibatkan oleh peranan pasar yang belum maksimal dalam pertumbuhan ekonomi serta belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau.

7) Sektor angkutan dan komunikasi

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Seperti yang diketahui bahwa di Kabupaten Bojonegoro tidak ada laut, maka alat pengangkutan yang ada seperti kapal pun tidak ada.

8) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Hal ini dapat terlihat karena kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bojonegoro dirasa kurang yakni masih terbatas pada sarana dan prasarana penunjang kegiatan terutama yang berhubungan dengan IT.

9) Jasa-jasa

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini masuk kedalam sektor unggulan dan basis. Hal ini terbukti misalnya pada jasa kesehatan jumlah puskesmas dengan perawatan bertambah satu di tahun 2012 yaitu menjadi sebanyak 12 buah, poliklinik desa juga mengalami penambahan yaitu dari 329 buah menjadi 335 buah ditahun 2012. Sementara pada jasa pendidikan rasio guru mulai bertambah. Serta pada tingkat pengangguran juga mengalami penurunan di tahun 2012 .

Penjelasan mengenai identifikasi sembilan sektor pada PDRB di atas juga berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 serta dokumen Statistik Daerah kabupaten Bojonegoro Tahun 2013, sementara kalau dilihat dari pengidentifikasian tersebut sektor yang unggul di Kabupaten

Bojonegoro dan mempunyai nilai lebih dari satu apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; serta sektor jasa-jasa. Pada sektor pertambangan dan penggalian khususnya minyak bumi dan gas bumi sendiri, saat ini telah memberikan peranan yang cukup besar dalam perekonomian daerah. seperti yang telah dikatakan oleh Bapak D.A.S (L, 32 tahun) selaku Kepala Seksi Bidang Minyak dan Gas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

“untuk saat ini saja penyumbang migas secara nasional terbesar di Jawa Timur ada pada Kabupaten Bojonegoro yaitu menyumbang sebesar 20 % migas untuk nasional” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, 24 April 2014 pukul 10.35 WIB).

Sedangkan untuk melihat potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah di wilayah sekitar (eks-karesidenan) Kabupaten Bojonegoro yakni meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan dengan membandingkan pula PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu wilayah (kabupaten) dengan sumbangan sektor tersebut secara keseluruhan terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari wilayah yang lebih luas di atasnya (propinsi). Apabila nilai LQ lebih besar dari 1 maka sektor di wilayah tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Dan apabila ada beberapa sektor yang memiliki nilai LQ diatas 1 maka sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor yang memiliki LQ tertinggi. Hasil analisis LQ Kabupaten sekitar Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28 Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun 2012		LQ
		Kabupaten Tuban	Propinsi Jawa Timur	
1	Pertanian	2.573.301,11	54.463.942,77	1,93
2	Pertambangan dan penggalian	1.803.907,37	8.419.507,31	8,75
3	Industri pengolahan	2.177.779,71	98.017.056,57	0,91
4	Listrik, gas, dan air bersih	299.867,25	5.238.431,69	2,34
5	Bangunan	51.813,76	12.840.565,41	0,16
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	1.583.754,60	128.375.498,61	0,50
7	Pengangkutan dan komunikasi	197.567,25	30.640.913,32	0,26
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	497.738,86	21.782.339,98	0,93
9	Jasa-jasa	451.203,53	33.884.591,32	0,54
Total		9.636.933,44	393.662.846,98	16,34

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

Keterangan: kolom warna kuning = sektor unggulan

Sektor yang unggul di Kabupaten Tuban dan mempunyai nilai lebih dari satu apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor listrik, gas, dan air bersih.

Tabel 29 Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun 2012		LQ
		Kabupaten Lamongan	Propinsi Jawa Timur	
1	Pertanian	3.382.337,18	54.463.942,77	3,44
2	Pertambangan dan penggalian	10.644,38	8.419.507,31	0,07
3	Industri pengolahan	387.507,69	98.017.056,57	0,22
4	Listrik, gas, dan air bersih	78.205,69	5.238.431,69	0,83
5	Bangunan	191.212,95	12.840.565,41	0,83
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	2.012.724,35	128.375.498,61	0,87
7	Pengangkutan dan komunikasi	124.738,94	30.640.913,32	0,23
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	279.848,73	21.782.339,98	0,71
9	Jasa-jasa	630.948,83	33.884.591,32	1,03
Total		7.098.168,74	393.662.846,98	8,23

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

Keterangan: kolom warna kuning = sektor unggulan

Sektor yang unggul di Kabupaten Lamongan dan mempunyai nilai lebih dari satu apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.

Tabel 30 Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun 2012		LQ
		Kabupaten Jombang	Propinsi Jawa Timur	
1	Pertanian	1.965.898,20	54.463.942,77	1,97
2	Pertambangan dan penggalian	109.250,20	8.419.507,31	0,71
3	Industri pengolahan	780.291,65	98.017.056,57	0,43
4	Listrik, gas, dan air bersih	73.828,91	5.238.431,69	0,77
5	Bangunan	133.959,11	12.840.565,41	0,57
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	2.667.715,78	128.375.498,61	1,13
7	Pengangkutan dan komunikasi	341.637,35	30.640.913,32	0,61
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	321.625,66	21.782.339,98	0,80
9	Jasa-jasa	836.097,50	33.884.591,32	1,34
Total		7.230.304,36	393.662.846,98	8,33

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

Keterangan: kolom warna kuning = sektor unggulan

Sektor yang unggul di Kabupaten Jombang dan mempunyai nilai lebih dari satu apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa-jasa.

Tabel 31 Hasil Analisis LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (2000) (juta rupiah)

No	Sektor	Tahun 2012		LQ
		Kabupaten Mojokerto	Propinsi Jawa Timur	
1	Pertanian	1.956.272,50	54.463.942,77	1,56
2	Pertambangan dan penggalian	127.934,18	8.419.507,31	0,66
3	Industri pengolahan	3.293.642,72	98.017.056,57	1,46
4	Listrik, gas, dan air bersih	81.997,63	5.238.431,69	0,68
5	Bangunan	137.312,15	12.840.565,41	0,46
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	2.332.325,08	128.375.498,61	0,79
7	Pengangkutan dan komunikasi	331.367,49	30.640.913,32	0,47
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	149.549,09	21.782.339,98	0,30
9	Jasa-jasa	657.344,06	33.884.591,32	0,84
Total		9.067.744,90	393.662.846,98	7,22

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

Keterangan: kolom warna kuning = sektor unggulan

Sektor yang unggul di Kabupaten Mojokerto dan mempunyai nilai lebih dari satu apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur adalah sektor pertanian serta sektor industri pengolahan.

Tabel 32 Nilai Rata-rata LQ Daerah Kabupaten Bojonegoro Dengan Daerah di Sekitarnya (Eks Karesidenan) Tahun 2012

No	Sektor	Rata-rata LQ Kabupaten Tahun 2012				
		Bojonegoro	Tuban	Lamongan	Jombang	Mojokerto
1	Pertanian	1,78	1,93	3,44	1,97	1,56
2	Pertambangan dan penggalian	13,57	8,75	0,07	0,71	0,66
3	Industri pengolahan	0,30	0,91	0,22	0,43	1,46
4	Listrik, gas, dan air bersih	0,48	2,34	0,83	0,77	0,68
5	Bangunan	1,08	0,16	0,83	0,57	0,46
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	0,52	0,50	0,87	1,13	0,79
7	Pengangkutan dan komunikasi	0,48	0,26	0,23	0,61	0,47
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	0,88	0,93	0,71	0,80	0,30
9	Jasa-jasa	1,04	0,54	1,03	1,34	0,84
Total		20,13	16,34	8,23	8,33	7,22

(Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis, 2014)

Keterangan: kolom warna kuning = sektor unggulan

Sehingga berdasarkan perhitungan dan nilai rata-rata dari rumus LQ diatas telah didapatkan kesimpulan bahwa secara rinci sektor-sektor yang merupakan sektor basis / unggul (sektor dengan nilai LQ > 1) pada masing-masing daerah adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Bojonegoro : sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; serta sektor jasa-jasa
- Kabupaten Tuban : sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor listrik, gas, dan air bersih
- Kabupaten Lamongan : sektor pertanian serta sektor jasa-jasa
- Kabupaten Jombang : sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa-jasa
- Kabupaten Mojokerto : sektor pertanian serta sektor industri pengolahan

2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Sektor Unggulan

a. Strategi Dinas ESDM dalam Mengembangkan Sektor Pertambangan khususnya Migas (Minyak dan Gas Bumi) Kabupaten Bojonegoro

1. Dasar Hukum Dan Latar Belakang dalam Mengembangkan Migas

Dalam melakukan pengembangan migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- a) UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3 yang secara jelas menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
- b) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya Bagian Kedua Tentang Pengawasan Pasal 41 ayat 2 menjelaskan bahwa “Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”, sementara pada pasal 45 ayat 1 berbunyi “Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara”.
- c) Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas
- e) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif

Pertambangan dan Perminyakan adalah 2 (dua) hal yang berbeda, baik dari sudut keberadaan sebagai sumber daya alam, maupun dari sisi tata kelolanya. Pertambangan secara umum diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba sedangkan perminyakan diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tata kelola antara 2 (dua) unsur sumber daya alam tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat berbeda sehingga tidak dapat dijadikan dalam satu regulasi, karena nantinya dapat menimbulkan bias implementasi kewenangan dan tata kelola. Sebagai contoh riil adalah adanya pelimpahan kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (diikuti indikator tata kelola lain seperti pengawasan, pembinaan dan pengaturan), hal ini berbeda dengan pengelolaan minyak dan gas bumi bahwa segala tata kelola minyak dan gas bumi baik pengaturan, pengawasan maupun pembinaan harus sesuai ketentuan perundangan, kewenangannya tidak dilimpahkan ke daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro yang memaparkan bahwa:

“Pertambangan dan Perminyakan adalah 2 (dua) hal yang berbeda, baik dari sudut keberadaan sebagai sumber daya alam, maupun dari sisi tata kelolanya. Pertambangan secara umum diatur melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba sedangkan perminyakan diatur melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tata kelola antara 2 (dua) unsur sumber daya alam tersebut memiliki ruang lingkup yang amat berbeda sehingga tidak dapat dijadikan dalam satu regulasi karena dapat menimbulkan bias implementasi kewenangan dan tata kelola. Sebagai contoh riil adalah adanya pelimpahan kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (diikuti indikator tata kelola lain seperti pengawasan, pembinaan dan pengaturan), sedangkan

untuk minyak dan gas bumi tidaklah demikian karena segala tata kelola minyak dan gas bumi baik pengaturan, pengawasan maupun pembinaan (sesuai ketentuan perundangan) kewenangannya tidak dilimpahkan ke daerah” (wawancara melalui via email, 16 April 2014 pukul 08.00 WIB).

Adanya dasar hukum yang mengikat tersebut pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola potensi minyak dan gas bumi diantaranya:

- a. eksplorasi dan eksploitasi migas *onshore* di wilayah Kabupaten Bojonegoro berada di lingkungan permukiman penduduk yang rata-rata terkategori penduduk miskin. Sehingga sangat rentan terhadap munculnya gejala sosial masyarakat.
- b. belum optimalnya implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 yang disebabkan bebarapa faktor:
 - 1) masih rendahnya kepedulian K3S dan kontraktor pelaksanaannya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat sekitar proyek
 - 2) dalam beberapa sisi masih muncul ambigu implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, khususnya dalam menterjemahkan domain negara atas tata kelola migas

Pernyataan di atas didukung dengan adanya wawancara yang peneliti lakukan secara via email dengan Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang masih dihadapi dalam tata kelola potensi minyak dan gas bumi adalah bahwa eksplorasi dan eksploitasi migas *onshore* di wilayah Kabupaten Bojonegoro berada di lingkungan permukiman penduduk yang rata-rata terkategori penduduk miskin. Sehingga sangat rentan terhadap munculnya gejala sosial masyarakat. Selanjutnya belum optimalnya implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 yang disebabkan beberapa faktor yaitu masih rendahnya kepedulian K3S dan kontraktor pelaksanaanya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat sekitar proyek, serta dalam beberapa sisi masih muncul ambigu implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, khususnya dalam menterjemahkan domain negara atas tata kelola migas” (wawancara melalui via email, 16 April 2014 pukul 08.00 WIB).

2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Migas

Didalam mengerjakan pengembangan pertambangan migas terdapat beberapa pihak/ organisasi yang terlibat diantaranya:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Strategic Planning Tools*, yaitu SKPD / Unit Kerja yang menangani perencanaan pembangunan strategis daerah, dalam konteks ini adalah strategi umum perencanaan dan pengembangan potensi migas.
- b) Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Operational Tools*, yaitu SKPD / Unit Kerja yang menangani proses perijinan pemanfaatan potensi migas baik, dalam rangka penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).
- c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Operational Tools*, yaitu SKPD / Unit Kerja yang menangani sektor hilir ataupun sektor industri dan perdagangan lain sebagai *multiplier effect*

industri migas. Seperti yang di jabarkan oleh Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro menerangkan bahwa:

“Organisasi yang terlibat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Strategic Planning Tools*, yaitu SKPD / Unit Kerja yang menangani perencanaan pembangunan strategis daerah, dalam konteks ini adalah strategi umum perencanaan dan pengembangan potensi mineral maupun migas. Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Operational Tools*, yaitu SKPD / Unit Kerja yang menangani proses perijinan pemanfaatan potensi mineral maupun migas baik, dalam rangka penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Operational Tools*, yaitu SKPD / Unit Kerja yang menangani sektor hilir ataupun sektor industri dan perdagangan lain sebagai *multiplier effect* industri mineral dan migas” (wawancara via email, 16 April 2014 pukul 08.00 WIB).

Sementara peran penting yang dilakukan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro diantaranya adalah sebagai:

- a) penggerak sumber penerimaan daerah
- b) penggerak pembangunan daerah
- c) penggerak investasi didaerah
- d) memberikan implikasi timbulnya efek berantai (*multiplier effect*) industri turunan sektor hilir
- e) membuka lapangan kerja yang cukup besar

Hal ini didukung dengan adanya jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti lewat via email dengan Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa:

“Peran penting dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro diantaranya sebagai penggerak sumber penerimaan daerah, sebagai penggerak pembangunan daerah, sebagai penggerak investasi didaerah, memberikan implikasi timbulnya efek berantai (multiplier effect) industri turunan sektor hilir, serta membuka lapangan kerja yang cukup besar” (wawancara via email, 16 April 2014 pukul 08.00 WIB).

3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Migas

Dikarenakan pengembangan migas tidak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro maka pihak Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro hanya memberikan tujuan dan sasaran secara umum yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro dalam pemanfaatan migas tersebut. Tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro dalam kebijakan adanya migas adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a) mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari
- b) mengendalikan pengelolaan & pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) & pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari

Sasaran :

- a) meningkatnya pemantapan perencanaan sektor sumber daya alam secara terarah
- b) meningkatnya kualitas penataan dan pemanfaatan sumber daya energi

- c) meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dan energi

Hal tersebut didukung dengan adanya wawancara yang dilakukan peneliti melalui via email dengan narasumber yaitu Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro yang mengatakan bahwa:

“Tujuan dalam melakukan pengebangan pada sektor migas ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta untuk mengendalikan pengelolaan & pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) & pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Kemudian sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatnya pemantapan perencanaan sektor sumber daya alam secara terarah; meningkatnya kualitas penataan dan pemanfaatan sumber daya energi; meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dan energi” (wawancara via email, 16 April 2014 pukul 08.00 WIB).

Sementara tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RENSTRA Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dalam menjalankan misi Dinas ESDM dapat dilihat pada tabel 33 di bawah ini.

Tabel 33 Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro

Misi	Tujuan	Sasaran
a) Memantapkan kebijakan strategis tata kelola energi dan sumber daya mineral yang dapat menunjang upaya perkuatan struktur perekonomian daerah	Mewujudkan akuntabilitas regulasi tata kelola dan ketersediaan data energi dan sumber daya mineral	a) Terumuskannya tata kelola energi dan sumber daya mineral dalam regulasi daerah dan juknis operasionalnya b) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap data energi dan sumber daya mineral c) Meningkatnya status data dasar geologi, sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologi
b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi penanganan /pengelolaan/ pengawasan energi	Melaksanakan tata kelola energi dan sumber daya mineral serta air tanah guna mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi	a) Meningkatnya pengembangan sumber daya mineral dan migas b) Meningkatnya investasi sektor energi dan sumber daya mineral c) Meningkatnya peran pemanfaatan secara

dan sumber daya mineral dengan menitik beratkan pada pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta	secara serasi, seimbang dan lestari	lestari sektor energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan daerah d) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan dan informasi geologi dan air tanah bagi masyarakat
c) Mendorong keberdayaan daerah dalam memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal guna kesejahteraan masyarakat	a) Meningkatkan nilai tambah energi dan sumber daya mineral bagi keberdayaan masyarakat b) Meningkatkan efek berantai (<i>multiplier effect</i>) industrialisasi sektor energi dan sumber daya mineral	a) Meningkatnya dayaguna dan daya hasil migas bagi kesejahteraan masyarakat b) Meningkatnya industri yang berbahan baku dari sektor migas (<i>forward linkage</i>)
a) Meningkatkan upaya pengkajian, pengendalian dan evaluasi kinerja secara akuntabel	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	a) Terwujudnya efektifitas indikator kinerja hasil pembangunan b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
b) Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan <i>clean and good governance</i> serta pelayanan prima pada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas tenaga aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya kapabilitas dan tata kelola sektor ESDM dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat

(Sumber: RENSTRA Dinas ESDM Tahun 2013-2018 Kab. Bojonegoro)

4. Perencanaan Strategi Pengembangan Migas

Perencanaan strategi pengembangan migas secara teknis dan bisnis merupakan domain pemerintah pusat, sehingga tahapan perencanaan teknis dan bisnis migas tidak menjadi tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro. Karena seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan dilakukan oleh pusat dan SKK (Satuan Kerja Khusus) migas. Pihak Pemerintah Daerah khususnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro tidak diberikan kewenangan karena potensi migas adalah milik pusat. Pemerintah daerah hanya sebatas rekon lifting dan memberikan ijin (IMB) saja. Hal ini sesuai dengan jawaban wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak D.A.S (L, 32 tahun) selaku Kepala Seksi Bagian Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, Beliau menerangkan:

“mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pusat. Artinya pemerintah daerah sama sekali tidak ada kewenangan untuk ini. Kami hanya sebatas rekon lifting, memberikan ijin (IMB), serta menerima Dana Bagi Hasil (DBH) saja” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, 11 April 2014 pukul 10.35 WIB).

5. Strategi Pengembangan Migas

Strategi dan kebijakan tata kelola pertambangan dan migas dalam implementasinya mengacu pada visi Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 yakni “Terwujudnya Pondasi Kabupaten Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera Dan Berkelanjutan”. Dari visi yang ditetapkan tersebut dirumuskan misi yang salah satunya berbunyi “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis strategi Migas dan Agroindustri meliputi peningkatan sumberdaya air dan infrastrukturnya”. Sedangkan strategi umum bidang minyak dan gas bumi yang didasarkan sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a) perluasan lapangan kerja di sektor Migas
- b) kawasan industri Migas dan turunannya
- c) produksi gas bisa dimanfaatkan oleh daerah
- d) sektor Migas dan pertambangan lainnya mendukung *sustainable environment*
- e) dukungan program CSR sektor Migas yang tepat sasaran

Strategi secara teknis dan bisnis tetap dikelola dan dipegang secara penuh oleh pusat, kewenangan daerah disini hanya memberikan strategi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu strategi kebijakan tata kelola migas yang bertumpu pada *empowering society*. Meski pemanfaatan kekayaan migas tidak sepenuhnya *public oriented* (faktor domain pusat dan minimnya porsi tingkat keterlibatan serta porsi pemberdayaan masyarakat lokal), namun sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam memberikan perlindungan pada masyarakat, adalah meletakkan strategi melalui rumusan kebijakan daerah yang harus mampu menjawab beberapa poin penting di antaranya :

- a) mengarahkan pendayagunaan potensi migas yang ada di daerah, nantinya juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui perwujudan kemandirian dan keunggulan daerah.
- b) masyarakat mendapatkan *intended impact* (bukan *unintended impact*) dari implementasi kebijakan pendayagunaan potensi migas. Singkatnya agar masyarakat di daerah turut berdaya dengan kepemilikan keunggulan kompetitif potensi migas.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Selanjutnya apabila memperhatikan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, maka yang paling berkepentingan secara primer dengan pengelolaan migas sesungguhnya adalah masyarakat. Tentu masyarakat yang hidup di wilayah eksploitasi migas berkeinginan untuk tidak menjadi pihak yang banyak dirugikan dan berdaya dalam konstelasi politik lokal dan nasional. Hal ini sesuai dengan jawaban wawancara pada saat peneliti memberikan pertanyaan lewat via email dengan Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro yang mengatakan bahwa:

“Strategi secara teknis dan bisnis tetap dikelola dan dipegang secara penuh oleh pusat, kewenangan daerah disini hanya memberikan strategi dalam pemberdayaan masyarakat jadi strategi kebijakan tata kelola migas yang bertumpu pada *empowering society*. Meski pemanfaatan kekayaan migas tidak sepenuhnya *public oriented* (faktor doain pusat dan minimnya porsi tingkat keterliatan serta porsi pemberdayaan masyarakat lokal), naun sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam memberikan perlindungan pada masyarakat, adalah meletakkan strategi melalui rumusan kebijakan daerah yang harus mampu menjawab beberapa point penting diataranya : Bagaimana mengarahkan pendayagunaan potensi migas yang ada di daerah, nantinya juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui perwujudan kemandirian dan keunggulan daerah serta Bagaimana masyarakat mendapatkan *intended impact* (bukan *unintended impact*) dari implementasi kebijakan pendayagunaan potensi migas. Singkatnya bagaimana masyarakat di daerah turut berdaya dengan kepemilikan keunggulan kompetitif potensi migas. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Selanjutnya apabila memperhatikan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, maka yang

paling berkepentingan secara primer dengan pengelolaan migas sesungguhnya adalah masyarakat. Tentu masyarakat yang hidup di wilayah eksploitasi migas berkeinginan untuk tidak menjadi pihak yang banyak dirugikan dan berdaya dalam konstelasi politik lokal dan nasional” (wawancara via email, 16 April 2014 pukul 08.00 WIB).

Meskipun migas menjadi domain pusat namun dalam hal ini migas tidak tergantung pada DBH (Dana Bagi Hasil) sehingga Pemkab dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menempuh jalan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara:

- a) menerbitkan Perda Konten Lokal Nomor 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan potensi lokal baik ketenagakerjaan maupun pelaku usaha lokal dan merupakan satu-satunya di Indonesia
- b) menerbitkan Perbub (peraturan bupati) tentang ADD (Alokasi Dana Desa) dan juga satu-satunya di Indonesia
- c) *endowmentfund*, maksudnya kita tidak ingin Bojonegoro nanti habis manis sepah dibuang artinya kalau minyak sudah habis tereksplorasi nantinya kita tidak dapat apa-apa, kita tidak ingin seperti itu. Oleh sebab itu Pemkab menyertakan dana abadi di Bank Jatim dan DBH sebagai dana abadi. Dahulu Bojonegoro sempat menjadi 5 pengutang terbesar di Jawa Timur sedangkan sekarang Bojonegoro menjadi lima penyandang saham terbesar di Jawa Timur. Jadi penyertaan modalnya seperti itu.

Sehingga langkah yang dilakukan oleh Pemkab dalam rangka memanfaatkan keunggulan kompetitif hasil migas adalah seperti yang tersebutkan diatas tersebut. hal ini didukung pula oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, Beliau mengatakan:

“Meskipun migas menjadi domain pusat namun dalam hal ini migas tidak tergantung pada DBH (Dana Bagi Hasil) sehingga Pemkab dal hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menempuh jalan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara yang pertama menerbitkan perda konten lokal nomor 23 tahun 2011 yang bertujuan melindungi dan memberdayakan potensi lokal baik ketenagakerjaan maupun pelaku usaha lokal dan merupakan satu-satunya di Indonesia, yang kedua menerbitkan Perbub (peraturan bupati) tentang ADD (Alokasi Dana Desa) dan juga satu-satunya di Indonesia, kemudian yang ketiga adalah *endowmentfund*, maksudnya kita tidak ingin Bojonegoro nanti habis manis sepah dibuang artinya kalau minyak sudah habis tereksplorasi nantinya kita tidak dapat apa-apa, hanya dapat kerusakannya saja, kita tidak ingin seperti itu. Makanya Pemkab menyertakan dana abadi di Bank Jatim dan DBH sebagai dana abadi. Maksudnya kalau minyaknya sudah habis tapi kita kita masih punya dana abadi untuk anak cucu kita. Dahulu lima tahun yang lalu Bojonegoro sempat menjadi 5 penghutang terbesar di Jawa Timur sedangkan sekarang Bojonegoro menjadi lima penyandang saham terbesar di Jawa Timur. Ini dalam rangka *endowmentfund* tadi jadi penyertaan modalnya seperti itu” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014 pukul 10.00 WIB).

Adanya perda konten lokal yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan sebagai pemberdayaan potensi lokal dalam pembangunan berbasis migas di Kabupaten Bojonegoro. Perda konten lokal ini merupakan senjata

pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengusahakan agar masyarakat Bojonegoro tidak menjadi penonton di rumah sendiri akibat adanya eksploitasi migas. Sebab dengan hadirnya perda konten lokal ini mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) untuk merekrut sebagian besar tenaga kerjanya dari masyarakat lokal meskipun bukan direkrut sebagai tenaga ahli (*unskill*). Perda konten lokal tersebut juga merupakan satu-satunya perda di Indonesia yang mengatur sumber daya alam berbasis konten lokal. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak D.A.S (L, 32 tahun) selaku Kepala Seksi Bagian Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

“Disini jangan sampai masyarakat jadi penonton sehingga pemerintah pun tidak tinggal diam. Disini pemerintah tetap memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberlakukan adanya Perda Konten Lokal Nomor 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Adanya perda konten lokal tersebut merupakan antisipasi daerah jangan sampai masyarakat nanti nggak menjadi apa-apa, perekrutan yang dimaksudkan disini adalah tenaga kerja *unskill* artinya tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian seperti *office boy* (OB) ataupun satpam” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, 11 April 2014 pukul 10.35 WIB).

Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro menambahkan sebagai berikut:

“Perda konten lokal ini satu-satunya di daerah dan hanya Kabupaten Bojonegoro yang memilikinya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini nantinya juga bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal, melindungi unit usaha lokal ekonomi, serta memperkuat pertumbuhan daerah, didalam perda konten lokal juga terdapat perjanjian bahwa K3S harus mempekerjakan tenaga kerja *unskill* dari dalam daerah bukan luar

daerah” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, 04 Mei 2014 pukul 13.00 WIB).

Sementara, dilihat pada RENSTRA Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, dapat diuraikan pada tabel 34 di bawah ini.

Tabel 34 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
a) Mewujudkan akuntabilitas regulasi tata kelola dan ketersediaan data energi dan sumber daya mineral	a) Terrumuskannya tata kelola energi dan sumber daya mineral dalam regulasi daerah dan juknis operasionalnya b) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap data energi dan sumber daya mineral c) Meningkatnya status data dasar geologi, sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologi	a) Meningkatkan akuntabilitas tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral dan air tanah b) Meningkatkan akuntabilitas data base sektor energi dan sumber daya mineral c) Mengantisipasi dampak negatif akibat bencana geologi
b) Melaksanakan tata kelola energi dan sumber daya mineral serta air tanah guna mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari	a) Meningkatnya pengembangan sumber daya mineral dan migas b) Meningkatnya investasi sektor energi dan sumber daya mineral c) Meningkatnya peran pemanfaatan secara lestari sektor energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan daerah d) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan dan informasi geologi dan air tanah bagi masyarakat	a) Meningkatkan kemanfaatan potensi keunggulan kompetitif daerah b) Meningkatkan upaya perkuatan struktur perekonomian daerah berbasis migas dan agrobis c) Menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan d) Mengelola sumber daya geologi dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi / rehabilitasi lahan e) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat
c) Meningkatkan nilai tambah energi dan sumber daya mineral bagi keberdayaan masyarakat	a) Meningkatnya dayaguna dan daya hasil migas bagi kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan transparansi dan tata kelola hasil migas kesejahteraan masyarakat

d) Meningkatkan efek berantai (<i>multiplier effect</i>) industrialisasi sektor energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya industri yang berbahan baku dari sektor migas (<i>forward linkage</i>)	Meningkatkan pertumbuhan daerah melalui investasi industri hilir sektor migas
e) Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	a) Terwujudnya efektifitas indikator kinerja hasil pembangunan b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas ESDM sesuai TUPOKSI yang telah ditentukan
f) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas tenaga aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya kapabilitas dan tata kelola sektor ESDM dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat	Meningkatkan kinerja pelayanan bidang energy dan sumber daya mineral Dinas ESDM

(Sumber : RENSTRA Dinas ESDM Tahun 2013-2018 Kab. Bojonegoro)

6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Migas

Karena pertambangan migas merupakan kewenangan pusat maka pemerintah daerah tidak bisa ikut campur dalam hal mengelola atau melaksanakan adanya pengembangan migas tersebut. Walaupun bidang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah disampaikan bahwa migas adalah domain pemerintah pusat, namun dalam rangka pengendalian masalah sosial (khususnya area ring lokasi eksplorasi dan eksploitasi) maka pemerintah daerah menitikberatkan pada upaya pengendalian sosial melalui strategi pemberdayaan masyarakat, baik melalui piranti perijinan (IMB dan HO) maupun upaya legal melalui penerbitan perda konten lokal sebagai langkah perlindungan kepada tenaga kerja dan unit usaha lokal. Selain itu kegiatan lain yang dilakukan adalah memperjuangkan industri pengolahan turunan migas di Kabupaten Bojonegoro, seperti mini *refinery* (kilang pengolahan minyak), serta industri lain yang bersumber dari pengolahan gas seperti

pabrik pupuk, etanol, LPG, serta LNG. Sementara bentuk sosialisasi yang diberikan adalah berupa program CSR, mengadakan diklat (pendidikan dan latihan), beasiswa AK migas cepu (maksudnya adalah beasiswa yang diberikan kepada anak-anak daerah yang disekolahkan ke sekolah khusus migas). Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak D.A.S (L, 32 tahun) selaku Kepala Seksi Bagian Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro memaparkan sebagai berikut:

“Jangan sampai masyarakat jadi penonton sehingga pemerintah pun tidak tinggal diam. Disini pemerintah tetap memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberlakukan adanya Perda Konten Lokal Nomor 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk sosialisasi tetap diberikan yaitu berupa adanya program CSR, diklat, beasiswa AK migas” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro, 11 April 2014 pukul 10.35 WIB).

Bapak F.Y.H (L, 46 tahun) selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro juga menambahkan bahwa:

“Pekab dalam hal ini tidak tergantung pada DBH, sehingga pekab menempuh jalan dengan pemberdayaan yaitu caranya dengan menerbitkan perda konten lokal yang inti isinya adalah untuk melindungi dan memberdayakan potensi lokal baik ketenagakerjaan maupun pelaku usaha lokal. Bidang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah disampaikan bahwa migas adalah domain pemerintah pusat. Namun dalam rangka pengendalian masalah sosial (khususnya area ring lokasi eksplorasi dan eksploitasi) maka pemerintah daerah menitikberatkan pada upaya pengendalian sosial melalui strategi pemberdayaan masyarakat, baik melalui piranti perijinan (IMB dan HO) maupun upaya legal melalui penerbitan perda konten lokal sebagai langkah perlindungan kepada tenaga kerja dan unit usaha lokal. Selain itu kegiatan lain yang dilakukan adalah memperjuangkan industri pengolahan turunan migas di Kabupaten Bojonegoro, seperti mini *revenery* (kilang pengolahan minyak), serta industri lain yang bersumber dari pengolahan gas seperti pabrik pupuk, etanol, LPG,

serta LNG” (wawancara di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 14 April 2014 pukul 11.00 WIB).

b. Strategi Dinas Pertanian dalam Mengembangkan Sektor Pertanian

(Komoditas Padi) Kabupaten Bojonegoro

1. Dasar Hukum Dan Latar Belakang Dinas Pertanian Dalam Mengembangkan Pertanian (Komoditas Padi)

Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pertanian di Kabupaten Bojonegoro saat ini yang telah menjadi unggulan. Hal ini dipicu karena besarnya nilai produksi tanaman bahan makanan khususnya pada komoditas padi. Sehingga adanya strategi pengembangan perlu dibuat dan dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Dalam membuat perencanaan strategi pengembangan pertanian komoditas padi diperlukan adanya langkah-langkah dan bentuk-bentuk perencanaan yang tepat. Dimana dengan perencanaan yang tepat akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pengembangan pertanian, khususnya pada komoditas padi ini yakni mengacu pada RPJMD (Rencana Jangka menengah Daerah) Kabupaten dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari Dinas Pertanian tersebut yang tertuang dalam Perbub (Peraturan Bupati) Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014.

Strategi pengembangan pertanian dilatarbelakangi oleh keberadaan sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro yang pada saat ini memang masih tetap menjadi unggulan. Hal ini dikarenakan karena potensi luas lahan sawah di Kabupaten Bojonegoro mencapai lebih dari ± 77.000 Ha. Dengan luas lahan tersebut, potensi yang menjadi unggulan adalah komoditas padi. Rata-rata produksi 1 (satu) tahun mencapai ≥ 840.000 ton gabah kering giling. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, beliau mengatakan:

“Karena potensi luas lahan sawah di Bojonegoro lebih dari ± 77.000 Ha dengan luas lahan itu potensi unggulannya padi, rata-rata 1 tahun mencapai ≥ 840.000 ton gabah kering giling” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

Bapak B.S (L, 49 tahun) selaku Sekretaris Dinas Pertanian juga menambahkan:

“Produksi padi kita saat ini secara keseluruhan di tingkat Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro masuk dalam urutan nomor 3 (tiga) setelah Kabupaten Lamongan dan Jember dengan total produksi mencapai 850.112 ton. Dengan produksi segitu artinya kita sudah bisa menyumbang terhadap pangan nasional. karena untuk konsumsi masyarakat Bojonegoro sendiri kurang lebih hanya sekitar 400.000 ton, sisanya diekspor ke luar daerah” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 28 April 2014 pukul 11.00 WIB).

2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Organisasi yang terlibat dalam pengembangan pertanian komoditas padi selain Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, terdapat organisasi dari pihak lain pula yang terlibat diantaranya adalah:

- a) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani
- b) HIPA (Himpunan Petani Pemakai Air)
- c) Unit pelayanan jasa ALSINTAN (Alat Mesin Pertanian)
- d) PPAH (Pusat Pengembangan Agensi hayati)

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mengatakan sebagai berikut:

“Tentu ada organisasi yang mendukung yaitu misalnya kelompok train/ gabungan kelompok tani, HIPA, unit pelayanan jasa ALSINTAN, Pusat Pengembangan Agensi hayati (PPAH) (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Tujuan dan sasaran dalam melakukan strategi pengembangan yang di adakan oleh Dinas Pertanian dalam mengembangkan komoditas padi adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a) meningkatkan produksi padi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan bagi negeri

- b) meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi padi
- c) optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian
- d) pemberdayaan petani atau kelompok tani dalam melaksanakan usaha tani

Sasaran :

- a) petani atau kelompok tani atau gabungan dari kelompok tani
- b) penyuluh swakarsa atau petani perintis
- c) petugas pertanian

Hal tersebut didukung oleh adanya wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mengatakan bahwa:

“Tujuan dilakukannya pengembangan pertanian khususnya pada komoditas padi ini adalah untuk meningkatkan produksi padi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan bagi negeri, meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi padi, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, serta pemberdayaan petani atau kelompok tani dalam melaksanakan usaha tani. Sedangkan yang menjadi sasaran adalah petani atau kelompok tani atau gabungan dari kelompok tani, penyuluh swakarsa atau petani perintis, serta petugas pertanian” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

4. Perencanaan Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Untuk tahap perencanaan pengembangan sektor pertanian yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro khususnya pada komoditas padi adalah dengan membuat target tanam, membuat target panen, dan membuat target produksi. Hal ini juga yang telah dikatakan oleh Bapak

R.H (L, 42 tahun) selaku Ketua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura bahwa:

“Untuk tahap perencanaan dilalui oleh 3 tahap yang pertama adalah membuat target tanam, target panen, dan target produksi. Target tersebut nantinya di *breakdown* per wilayah kecamatan sesuai dengan potensinya masing-masing” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014 pukul 08.30 WIB).

Sebelum merencanakan pengembangan pertanian khususnya pada komoditas padi, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro perlu mengkaji faktor eksternal dan internal dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Faktor internal merupakan kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal adalah peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Faktor internal dan eksternal tersebut telah tertera dalam dokumen Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013 diantaranya sebagai berikut:

Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian
- 2) adanya dukungan teknologi di bidang pertanian yang memadai
- 3) adanya dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program
- 4) pencapaian program sebelumnya
- 5) tersedianya teknologi informasi

- 6) tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung baik asset dinas pertanian maupun dukungan masyarakat
- 7) terjalannya kemitraan antara petani, pemerintah, dan pengusaha yang harmonis sehingga mendukung kelancaran pembangunan pertanian

b. Kelemahan

- 1) masih belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia pertanian dari aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan pertanian
- 2) masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian
- 3) masih belum mantapnya penerapan pengelolaan sarana prasarana dan penerapan prinsip-prinsip tata kerja pertanian dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian
- 4) ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah
- 5) masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian
- 6) tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi
- 7) infrastruktur di bidang pertanian masih terbatas

Faktor eksternal

a. Peluang

- 1) berkembangnya teknologi pertanian yang semakin mempercepat pembangunan pertanian
- 2) pasar komoditas tanaman pangan yang terbukti luas
- 3) peluang investasi di bidang agroindustri dan agribisnis cukup besar

- 4) tersedianya fasilitas permodalan dari bank/ lembaga keuangan non bank
- 5) berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/ kelompok tani dengan pengusaha/ produsen

b. Ancaman

- 1) berkembangnya pembangunan industri dan perumahan mengakibatkan penurunan sumber daya alam pertanian dan tenaga kerja di bidang pertanian
- 2) rusaknya sumber daya alam dan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan
- 3) masih tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan anomali iklim
- 4) kebijakan ekonomi makro yang kurang mendukung pembangunan pertanian

Kemudian selain adanya faktor internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Bojonegoro, adanya isu-isu strategi juga penting untuk diperhatikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertanian. Yang menjadi su-isu strategi diantaranya adalah adanya:

- a) tuntutan kebutuhan pangan yang semakin meningkat akibat penambahan penduduk, sementara lahan pertanian makin lama makin berkurang akibat tuntutan pembangunan baik perumahan maupun industri migas

- b) kondisi pertanian yang semakin menurun tingkat kesuburannya
- c) semakin menurunnya jumlah petani
- d) perubahan iklim akibat dari global warming
- e) masih rendahnya akses permodalan petani, teknologi informasi, dan pasar
- f) nilai tambah hasil petani masih belum dinikmati petani

Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari Bapak B.S (L, 49 tahun) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Beliau mengatakan:

“Kebetulan saya kemaren sudah selesai membuat isu strategi terkait pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Jadi yang menjadi isu adalah yang pertama adalah adanya tuntutan kebutuhan pangan yang semakin meningkat akibat pertambahan penduduk ,sementara lahan pertanian makin lama makin berkurang akibat tuntutan pembangunan baik perumahan maupun industri migas, yang kedua kondisi pertanian yang semakin menurun tingkat kesuburannya, kemudian yang ketiga semakin menurunnya jumlah petani, yang keempat perubahan iklim akibat dari *global warming*, lalu yang kelima masih rendahnya akses permodalan petani, teknologi informasi, dan pasar, serta yang keenam dan terakhir adalah nilai tambah hasil petani masih belum dinikmati petani” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 28 April 2014 pukul 11.00 WIB).

5. Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Sedangkan untuk menjalankan 3 (tiga) target tersebut adalah dengan melakukan strategi pengembangan. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah dengan mengadakan beberapa program pengembangan pertanian khususnya pada komoditas padi yaitu melalui:

- a) pengembangan padi hibrida
- b) pendampingan petani melalui sekolah lapang (sekolah yang dilaksanakan di kelompok tani langsung di sawah, jadi maksudnya ini adalah di praktekkan secara langsung, kemudian mengadakan pengamatan yang didampingi oleh petugas PPL dan POPT)
- c) optimalisasi kemanfaatan air bendungan solo melalui pompanisasi berbasis listrik
- d) optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik
- e) gerakan taman dengan menggunakan metode jarak legowo atau jarak tanam yang bervariasi diikuti dengan pemupukan berimbang yakni dengan pemakaian pupuk urea 200 kg/Ha, ponska 300 kg/Ha, organik 500 kg/Ha.
- f) penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam atau *transplanter* dan alat panen yaitu *powerthresher* dan *combine harvester*.

Hal tersebut sesuai yang telah disebutkan oleh Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menjelaskan bahwa :

“Target di *breakdown* per wilayah kecamatan sesuai dengan potensinya masing-masing dengan melakukan pengembangan program melalui beberapa strategi pengembangan padi hibrida; pendampingan petani melalui sekolah lapang dan pengamatan yang didampingi petugas PPL dan POPT; optimalisasi kemanfaatan air bendungan solo melalui pompanisasi berbasis listrik; optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik; gerakan tanam dengan menggunakan metode jarak legowo diikuti dengan pupuk berimbang (urea 200 kg/Ha, ponska 300 kg/Ha, organik 500 kg/Ha); penerapan mekanisasi pertanian melalui

penggunaan alat tanam/ *transplanter* dan alat panen yaitu *powerthresher* dan *combine harvester*” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

Selain itu, Bapak B.S (49 tahun) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro juga menambahkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Bojonegoro juga meliputi :

- a) perbaikan intensifikasi pertanian dalam hal pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul dan pupuk organik; ketersediaan pupuk an-organik tepat waktu, tepat tempat dan tepat dosis; ketersediaan sarana prasarana; serta pengendalian hama penyakit
- b) mengupayakan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan
- c) peningkatan pengetahuan sdm mulai dari petani, penyuluh, maupun insan pertanian secara umum sesuai dengan teknologi yang berkembang
- d) membangun fasilitas teknologi informasi dalam upaya pengontrol, pemantau, dan mengevaluasi program-program dan kebijakan bidang pertanian. misalnya dengan membangun fasilitas *sms center*.

Hal ini didukung oleh adanya wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak B.S (L, 49 tahun) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang menjelaskan bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian disini adalah perbaikan intensifikasi pertanian yang meliputi mulai dari pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul dan pupuk organik dengan harapan nantinya bahan organik tanah kita bisa meningkat; ketersediaan pupuk an-organik (MPA, urea, SP 36, ZA) tepat waktu, tepat tempat, dan tepat dosis, misalnya anjuran pemakaian 200 kg maka harus tercukupi sesuai anjuran tersebut; ketersediaan sarana prasarana produksi, misalnya untuk pengelola tanah Pemda

memberikan stimulasi traktor setiap tahun, memberikan *transplanter*, pembangunan jalan usaha tani, dan membangun saluran irigasi; strategi selanjutnya adalah pengendalian hama penyakit dalam hal ini Pemda berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan hama hayati dan melakukan program-program sekolah lapangan, pengendalian, hama erpadu, di beberapa kelompok tani diadakan sekolah lapang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan petani dalam upaya mengendalikan hama dan penyakit di lahan mereka; strategi selanjutnya adalah mengupayakan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan, selanjutnya adalah SDM mulai dari petani, penyuluh, maupun insan pertanian secara umum ditingkatkan terus pengetahuannya sesuai dengan teknologi yang berkembang; strategi berikutnya adalah Pemda dalam upaya untuk manajemen dari bidang pertanian membangun fasilitas teknologi informasi dalam upaya pengontrol, pemantau, dan mengevaluasi program-program kebijakan bidang pertanian, misalnya membangun fasilitas sms *center* sebagai cara kalau ada keluhan dari petani” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 28 April 2014 pukul 11.00 WIB).

Sementara di dalam dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2013 juga terdapat beberapa strategi dalam peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan secara keseluruhan yang dapat ditempuh melalui:

- a. Pengembangan sarana prasarana
- b. Akselerasi peningkatan produktivitas
- c. Perluasan areal tanam
- d. Pengamanan produksi
- e. Pengolahan dan pemasaran hasil
- f. Penguatan kelembagaan

Dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian disertai dengan penguatan lembaga pendukungnya, utamanya di pedesaan, guna meningkatkan akses petani kepada sumber daya produktif
- b. Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi, dan meningkatkan ketersediaan pangan
- c. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu, pemberian insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- d. Optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan agrobisnis dan agroindustri dalam pemberdayaan ekonomi petani

6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Pertanian Komoditas Padi

Dalam merencanakan pelaksanaan strategi pengembangan pertanian (komoditas padi) terdapat pula adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sudah tercantum pada dokumen RENSTRA Dinas Pertanian tahun 2009-2013 Kabupaten Bojonegoro yaitu dapat dilihat pada tabel 35 di bawah ini.

Tabel 35 Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro

Program	Kegiatan
1) Peningkatan ketahanan pangan	1) Pengamanan ketersediaan pangan melalui pengamanan lahan sawah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian 2) Pengembangan kualitas dan mutu produk pertanian 3) Optimalisasi dan pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana 4) Pengembangan komoditas pertanian substitusi pangan 5) Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produktivitas dan produksi hasil pertanian 6) Peningkatan distribusi pangan 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan mutu hasil dan menurunkan tingkat kehilangan hasil 8) Pengankaragaman pangan kepada keluarga miskin 9) Peningkatan mutu dan keamanan pangan 10) Pengembangan kawasan sentra pertanian 11) Pengembangan desa mandiri pangan 12) Pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha mandiri 13) Pengendalian hama terpadu 14) Pemanfaatan pupuk organik
2) Pengembangan agrobisnis	1) Pengembangan komoditas ekspor pertanian unggulan 2) Pembinaan pemasaran hasil pertanian 3) Pengembangan kemitraan usaha tani tanaman pangan 4) Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 5) Mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara petani dengan pengusaha serta melindungi petani dari persaingan usaha yang tidak sehat 6) Peningkatan kualitas SDM petani melalui kegiatan pelatihan 7) Pemberdayaan kelompok tani produktif melalui perluasan jenis usaha di pedesaan 8) Pemberdayaan kelompok tani, wanita tani, dan masyarakat pertanian dalam pengolahan hasil pertanian

(Sumber: RENSTRA Dinas Pertanian Tahun 2009-2013 Kab. Bojonegoro)

Selain berdasarkan kegiatan yang ada pada RENSTRA Dinas Pertanian tahun 2009-2013 tersebut kegiatan yang akan dilakukan dalam mengembangkan pertanian (komoditas padi) menurut data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- a) petani secara swadaya melakukan budidaya tanaman padi
- b) pelaksanaan demplot atau percontohan dibeberapa lokasi sentra padi
- c) pelaksanaan program SLPTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu)

- d) pelaksanaan demvarietas padi unggul baik, padi hibrida maupun padi non hibrida

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan yaitu petani secara swadaya melakukan budidaya tanaman padi, pelaksanaan demplot atau percontohan di beberapa lokasi sentra padi, pelaksanaan program SLPTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu), serta pelaksanaan demvarietas padi unggul baik padi hibrida maupun padi non hibrida” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014 pukul 08.30 WIB).

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan seperti itu bukan tanpa alasan, mereka memilih melakukan dan memprioritaskan kegiatan tersebut karena adanya pertimbangan utama yaitu dikarenakan potensi lahan mendukung untuk produksi padi yang cukup baik, dengan pengalaman dan penerapan teknologi pertanian yang ada diharapkan akan tercapai produksi padi yang maksimal, sehingga petani memperoleh pendapatan yang layak. Hal ini diperjelas dengan jawaban saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Beliau mengatakan:

“Mengapa memilih kegiatan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan utama adalah potensi lahan mendukung untuk produksi padi yang cukup baik, dengan pengalaman dan penerapan teknologi pertanian yang ada diharapkan akan tercapai produksi padi yang maksimal, sehingga petani memperoleh pendapatan yang layak”. (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

Untuk teknis pelaksanaannya didasarkan pada usulan dari petugas yang ada di kecamatan yang kemudian diverifikasi oleh Tim Teknis dari

Kabupaten Bojonegoro sehingga lokasi yang terpilih betul-betul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan pemilihan tempat dan waktu, dimana akan terlaksananya kegiatan-kegiatan di atas adalah dengan memilih lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi demplot/ percontohan yang letaknya berada dipinggir jalan/ mudah diakses ke lokasi itu dengan tujuan agar para petani bisa dengan mudah melihat dan mengamati kegiatan percontohan tersebut. Sementara pemilihan waktunya pun disesuaikan dengan musim tanam atau rencana tanam yang ada di lokasi tersebut. Sesuai dengan pernyataan Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Ketua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura memaparkan bahwa:

“Teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan usulan dari petugas yang ada di Kecamatan diverifikasi oleh Tim Teknis di Kabupaten sehingga lokasi yang terpilih betul-betul sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan. Sedangkan lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi demplot/ percontohan yang letaknya di pinggir jalan/ mudah akses menuju lokasi itu dengan tujuan para petani bisa dengan mudah melihat/ mengamati kegiatan percontoha tersebut. Sementara pemilihan waktu kegiatan disesuaikan dengan musim tanam/ rencana tanaman yang ada di lokasi tersebut”. (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

Pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengembangan tersebut adalah petugas pertanian, baik dari tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan dengan kelompok tani/ petani. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, terlebih dahulu sosialisasi telah diberikan kepada masyarakat kelompok tani. Sosialisasi diberikan dalam bentuk pertemuan secara langsung, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran program/ kegiatan apa yang akan dilakukan di lokasi tersebut. Hal ini sesuai dengan

yang diutarakan oleh Bapak R.H (L, 42 tahun) selaku Ketua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Beliau mengatakan:

“Yang melaksanakan kegiatan pengembangan tersebut yakni petugas pertanian baik ditingkat kabupaten/ kecamatan sama para kelompok tani/ petani. Untuk sosialisasi diberikan dalam bentuk pertemuan, untuk memberikan gambaran program/ kegiatan apa yang akan dilakukan di lokasi tersebut” (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2014, pukul 08.30 WIB).

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro juga menambahkan bahwa sosialisasi yang diberikan juga berupa penyuluhan lewat Dinas atau kader-kader lewat kelompok swadaya, ketua kelompok tani untuk memberikan informasi kepada petani lainnya, sosialisasi lainnya adalah memanfaatkan radio yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk menyiarkan secara langsung tayangan/ penyuluhan tentang pertanian, kemudian pihak Dinas Pertanian juga memberikan sosialisasi lewat *sms center*. Hal ini didukung oleh jawaban dari Bapak B.S (L, 49 tahun) selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro saat peneliti melakukan wawancara, Beliau mengemukakan bahwa:

“Sosialisasi yang diberikan berupa penyuluhan lewat Dinas/ kader-kader lewat kelompok swadaya, ketua kelompok tani yang sudah pensiun tua untuk memberikan informasi kepada petani lainnya, kemudian memanfaatkan radio malwopati FM, Istana FM untuk siaran tentang penyuluhan pertanian, sosialisasi lewat *sms center*, namun ini baru akan dijalankan (wawancara di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 28 April 2014 pukul 11.00 WIB)”.

C. Pembahasan

Analisa dan intrepetasi data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan gambaran secara menyeluruh, apa adanya tentang data yang diperoleh, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dan telah diolah berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Pada penelitian ini terdapat pula data-data angka berupa jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan perkapita, dan PDRB yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, serta Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut berupa data sekunder, serta dibantu juga dengan penggunaan rumus-rumus angka yang ada di dalam penyajian data. Sedangkan Intrepetasi data dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengintrepetasikan setiap permasalahan yang diangkat dalam data fokus penelitian yang terdapat di dalam penyajian data.

1. Potensi Daerah/ Sektor-sektor Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro

a. Potensi/ Sektor-sektor Perekonomian PDRB

Potensi ekonomi satu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lainnya, karena masing-masing daerah mempunyai ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumberdaya manusia, struktur alam, dan letak geografisnya. Namun, potensi ekonomi suatu daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Potensi

ekonomi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Sumihardjo (2008:12) bahwa “potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan, dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Sama halnya dengan pendapat Sumihardjo tersebut bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro itu sendiri juga meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan maupun sumber daya manusia. Aneka jenis sumber daya alam yang tersimpan di Kabupaten Bojonegoro, yakni mulai dari tambang minyak dan gas hingga aneka bahan tambang galian C. Selain itu lapisan tanahnya yang terdiri dari jenis alluvial, grumosol, latosol, dan mediteran serta adanya DAS Bengawan Solo, menjadikan tanaman-tanaman pertanian tumbuh subur. Pada sektor pertanian yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan tembakau virginia merupakan tanaman pertanian utama. Selain aneka produk hortikultura, seperti pisang, mangga, belimbing, dan salak. Berdasarkan tata guna lahan, wilayah Bojonegoro terbagi menjadi lahan sawah 74.801 Ha, lahan kering 48.358 ha, hutan 89.822 Ha, perkebunan 70 Ha, lain-lain 17.659 Ha.

Berikut adalah penjelasan mengenai potensi-potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Kabupaten Bojonegoro:

1) Sektor Pertanian

Komoditas pertanian tanaman pangan yang diproduksi wilayah ini meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Kapasitas produksi padi pada tahun 2012 mencapai 803.060 ton, jagung 174.697 ton, ubi kayu 99.180 ton, ubi jalar 7.728 ton, kedelai 29.520 ton, kacang tanah 3.550 ton, dan kacang hijau 3.591 ton. Untuk tanaman perkebunan meliputi tembakau virginia dengan luas areal tanaman pada tahun 2012 mencapai 9.441 Ha dengan kapasitas produksi 7.977 ton. Tembakau jawa luas areal tanaman pada tahun 2012 mencapai 2.892 Ha dengan kapasitas produksi 3.239 ton sedangkan luas areal tanaman tebu pada tahun 2012 mencapai 1.671 Ha. Selain itu juga masih terdapat sejumlah tanaman hortikultura seperti Belimbing (total produksi 1.920 kwintal tahun 2012) dengan sentra utama di desa Nringinrejo Kalitidu, Mangga (total produksi 76.779 kwintal tahun 2012) dengan sentra di Kecamatan Padangan, salak (total produksi 15.288 kwintal) dengan sentra di Desa Wedi Kapas, Pisang Raja (total produksi 469.947 kwintal) dengan sentra di Kecamatan Ngasem dan Purwosari.

2) Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro yang masih memiliki vegetasi dengan kerapatan tinggi dengan kerapatan tinggi seluas 25.119 Ha. Lokasinya berada di Kecamatan Kasiman, Margumulyo, Bubulan,

Ngambon, dan Gondang. Untuk hutan dengan kerapatan vegetasi rendah mencapai 72.599,18 Ha. Adapun komoditas utama hutan di Bojonegoro adalah kayu jati dan kayu rimba.

3) **Pertambangan dan Galian C**

Aneka bahan tambang yang tersimpan di perut bumi Kabupaten Bojonegoro adalah karunia Tuhan yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan. Potensi hasil tambang yang telah dapat digali antara lain bahan tambang Galian C (pasir, tanah urug, batu-batuan) dan tambang minyak bumi yang saat ini dalam proses eksplorasi. Selain itu, wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi Galian C yang cukup beragam meliputi *gypsum*, bentonit, fosfat, batu gamping, dan pasir serta tanah urug. Disamping itu terdapat juga batu gunung, batu onyx, dan batu lempung. Deposit yang dimiliki masing-masing bahan tambang cukup besar. Gypsum diperkirakan memiliki cadangan seluas 446 Ha di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Ngasem. Bentonit tersebar di Kecamatan Temayang, Bubulan, dan Dander dengan jumlah luasan mencapai 466 Ha. Sepanjang Sungai Bengawan solo merupakan cadangan pasir yang tidak terukur jumlahnya. Sedangkan tanah urug dengan cadangan 14,5 Ha tersebar di beberapa wilayah, salah satunya Desa Geneng Kecamatan Margomulyo.

4) **Minyak Bumi dan Gas Alam**

Tambang minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Bojonegoro terdapat di Blok Wilayah Cepu dan Wilayah Sukowati. Di Blok Cepu (Kecamatan

Ngasem, Desa Mojodelik, Brabohan, Wonorejo) diperkirakan terdapat potensi minyak bumi dan gas alam sebanyak 250 juta barel dengan estimasi produksi puncak 160.000 sampai 170.000 barel per hari dan masa produksi selama 20 tahun. Untuk wilayah Sukowati diperkirakan terdapat potensi minyak bumi dan gas alam 35 MMBOE dengan estimasi produksi puncak 25.000 barel per hari. Dan hingga saat ini, eksplorasi yang telah dilakukan menggunakan 125 sumur yang meliputi 106 sumur produksi, 18 sumur injeksi air, dan 2 sumur injeksi gas.

Sedangkan potensi ekonomi merupakan salah satu bagian dari banyak potensi daerah. Potensi-potensi bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor-sektor yang ada di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumihardjo (2008:12) juga berpendapat bahwa potensi daerah pada umumnya meliputi:

- a. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan, dan peternakan
- b. Potensi kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman kelautan
- c. Potensi energi dan sumber daya mineral seperti pembangkit listrik tenaga air skala desa
- d. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi, dan pariwisata.
- e. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak.

Apabila dilihat dari macam-macam potensi daerah tersebut, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BAPPEDA dan BPS Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa data PDRB (Produk Domestik regional Bruto), maka potensi daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar telah sesuai dengan teori Sumihardjo tersebut, yaitu mencakup potensi pada sektor

pertanian yang didalamnya terdapat subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan; sektor pertambangan dan penggalian didalamnya terdapat subsektor pertambangan migas, penggalian; sektor industri pengolahan didalamnya terdapat subsektor makanan minuman dan tembakau, tekstil, barang dari kulit & alas kaki, barang dari kayu & hasil hutan lainnya, kertas & barang cetakan, pupuk kimia & barang dari karet, semen & barang galian bukan logam, alat angkutan mesin & peralatannya, serta barang lainnya; untuk sektor listrik, gas, dan air bersih didalamnya hanya terdapat subsektor listrik dan air bersih sedangkan subsektor gas sementara belum ada; sektor bangunan; sektor perdagangan dan komunikasi didalamnya terdapat subsektor angkutan rel, angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan, pos dan telekomunikasi, serta jasa penunjang komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan didalamnya terdapat subsektor bank, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan, serta jasa perusahaan; sementara pada sektor jasa-jasa didalamnya terdapat subsektor pemerintahan umum yang terdiri dari administrasi pemerintahan & pertahanan serta subsektor swasta yang terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan, dan jasa perorangan rumah tangga. Yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro adalah potensi kelautan seperti terumbu karang, wisata kedalaman kelautan, dan pantai pasir putih.

Potensi-potensi/ sektor-sektor tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Potensi ekonomi ini ditujukan untuk dimanfaatkan dalam

rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan perekonomian tersebut otomatis akan bermuara pada tujuan akhir dari pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b. Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro dengan Daerah Disekitarnya (eks-karasidenan)

Untuk melihat mana-mana saja sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Bojonegoro dapat diketahui dengan menggunakan alat bantu hitung rumus *Locatient Quotient (LQ)* yang mana alat ini digunakan untuk mengetahui potensi atau sektor yang menjadi unggulan (basis) di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Tarigan (2005:32) yang menyebutkan bahwa “analisis basis ekonomi dapat menggunakan variabel lapangan kerja, pendapatan, atau ukuran lain, namun yang lebih umum dipakai disini adalah lapangan kerja”. Sedangkan metode untuk menentukan basis dan non basis ekonomi bisa menggunakan metode langsung, metode tidak langsung, metode campuran, dan metode analisis LQ. Begitupula pada penelitian ini, alat analisis yang dipakai adalah analisis LQ yaitu digunakan untuk membandingkan porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita yaitu Kabupaten Bojonegoro dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional dalam lingkup ini adalah Propinsi Jawa Timur.

Sehingga adanya perbandingan alat hitung LQ tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien LQ untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan bahkan basis yang cenderung untuk mengekspor ke daerah lain. Hal ini didukung dengan program yang baik yang bersifat intensifikasi lahan pertanian yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

2) Sektor pertambangan dan penggalian

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan dan basis yang cenderung mengekspor ke daerah lain. Hal ini terbukti dengan adanya potensi migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

3) Sektor industri pengolahan

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Hal ini terbukti dengan belum banyaknya industri yang tersebar secara merata

4) Sektor listrik, gas, dan air bersih

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Hal ini diakibatkan karena lebih dari 60% lokasi di dusun gelap dalam kawasan hutan termasuk kategori terisolir berat

5) Sektor bangunan/ konstruksi

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan dan basis. Hal ini terbukti dengan adanya program pavingisasi, pembangunan jalur kereta api ganda, perbaikan jalan, dan pembangunan ruko merupakan upaya pemerintah dalam rangka perbaikan infrastruktur.

6) Perdagangan, hotel, dan restoran

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis dan cenderung melakukan impor dari daerah lain. Hal ini juga diakibatkan oleh peranan pasar yang belum maksimal dalam pertumbuhan ekonomi serta belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau.

7) Sektor angkutan dan komunikasi

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Seperti yang diketahui bahwa di Kabupaten Bojonegoro tidak ada laut, maka alat pengangkutan yang ada seperti kapal pun tidak ada.

8) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ < 1$, artinya bahwa sektor ini bukan ke dalam sektor unggulan atau bukan basis. Hal ini dapat terlihat karena kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bojonegoro dirasa kurang yakni masih terbatas pada sarana dan prasarana penunjang kegiatan terutama yang berhubungan dengan IT.

9) Jasa-jasa

Pada tahun 2012 lalu nilai koefisien $LQ > 1$, artinya bahwa sektor ini masuk kedalam sektor unggulan dan basis. Hal ini terbukti misalnya pada jasa kesehatan jumlah puskesmas dengan perawatan bertambah satu di tahun 2012 yaitu menjadi sebanyak 12 buah, poliklinik desa juga mengalami penambahan yaitu dari 329 buah menjadi 335 buah ditahun 2012. Sementara pada jasa pendidikan rasio guru mulai bertambah. Serta pada tingkat pengangguran juga mengalami penurunan di tahun 2012 .

Dari keterangan identifikasi sembilan sektor diatas dapat diketahui terdapat 4 sektor yang telah menjadi unggulan di Kabupaten Bojonegoro yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta sektor jasa-jasa. Hal ini dapat diketahui karena keempat sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari satu artinya apabila nilai LQ lebih dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan/ basis. Hal tersebut telah sesuai dengan teori Arsyad dalam Basuki & Gayatri (2009:42) yang mengemukakan bahwa terdapat tiga kategori yang dihasilkan dari perhitungan LQ (*Locatient Quotient*) dalam perekonomian suatu daerah/ Kabupaten yaitu Jika $LQ > 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur). Selanjutnya jika $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur), kemudian jika $LQ = 1$, artinya produk yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi

oleh daerah tersebut. Nilai LQ yang lebih dari satu yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, serta jasa-jasa artinya keempat sektor unggulan ini telah berkontribusi cukup tinggi/ lebih dominan dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur. Hal ini terbukti bahwa produksi sektor pertanian khususnya komoditas padi Kabupaten Bojonegoro menjadi urutan ketiga se-Jawa Timur, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian khususnya migas telah menyumbangkan 20% minyak nasional.

Sebagaimana pula menurut Sambodo dalam Ghufron (2008:18) mengemukakan bahwa :

“Sektor unggulan adalah sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan faktor anugerah (*endowment factors*). Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan / kriteria”.

Jika didasarkan pada pengertian sektor unggulan yang dikemukakan oleh Sambodo yang dikutip oleh Ghufron (2008:18) tersebut diatas, maka sektor pertambangan dan penggalian khususnya minyak bumi dan gas bumi saat ini telah memberikan peranan yang cukup besar dalam perekonomian daerah. Hal ini bisa dilihat pada kontribusi nilai PDRB dan dana bagi hasil (DBH) yang diberikan cukup tinggi. Dan karena tingginya angka tersebut kini daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah tertinggi penghasil minyak dan gas bumi di Propinsi Jawa Timur, sehingga teori dari Sambodo tersebut telah sesuai dengan kondisi sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Potensi/ sektor unggulan berupa migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro memang patut untuk menjadi unggulan karena sudah berkontribusi cukup baik pada level nasional. Sektor pertambangan dan penggalian khususnya migas selain terdapat di kabupaten Bojonegoro juga terdapat pula pada Kabupaten lain yaitu Tuban, namun Pemkab Bojonegoro tidak melakukan persaingan dalam hal produksi migas, karena sebenarnya konsumsi minyak yang dibutuhkan oleh Indonesia juga masih sangat kurang. Hal ini terbukti adanya negara Indonesia yang masih melakukan impor. Kondisi seperti ini disebabkan bahwa migas yang ada di Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan harian penduduk masyarakat yang per harinya membutuhkan $\pm 1,5$ juta barel, sementara target produksi migas di Indonesia masih mencapai ± 830 ribu barel. Dengan kondisi seperti ini justru dibutuhkan adanya eksplorasi/ eksploitasi migas kembali yang semestinya bisa dilakukan di daerah-daerah Propinsi Jawa Timur ataupun daerah lain yang memiliki kandungan migas. Sehingga adanya aglomerasi dengan Kabupaten Tuban sangat diperlukan, sebab telah diketahui bahwa di Kabupaten Tuban juga terdapat potensi migas namun dalam mengeksploitasi tentunya juga harus berdasarkan Amdal, agar tidak merusak lingkungan.

Sektor yang menjadi unggulan nantinya juga bisa menjadi sektor basis, artinya sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta sektor jasa-jasa tidak hanya dinikmati oleh daerah domestik (dalam daerah) saja namun juga bisa mengekspor ke luar daerah. Hal ini telah sesuai dengan teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh (Tarigan, 2005:29)

bahwa “sektor basis atau kegiatan basis adalah pada dasarnya kegiatan ekspor yang semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah”. Sehingga sektor basis dianggap satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah. Tarigan (2009:56) juga menyebutkan bahwa “kegiatan basis/ sektor basis adalah kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah”. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tarigan tersebut bahwa hasil dari pertanian Kabupaten Bojonegoro yaitu padi juga telah diekspor ke luar daerah Bojonegoro yaitu pada Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Pati. Konsumsi pangan yang dibutuhkan masyarakat Bojonegoro hanya sekitar kurang lebih 400.000 ton padi sedangkan produksi padi Bojonegoro pertahun mencapai kurang lebih 840.000 ton sehingga sisanya bisa disumbangkan pada nasional melalui ekspor keluar daerah Bojonegoro. Daya saing padi Bojonegoro dilihat dari segi kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan juga relatif baik dibanding dengan kabupaten lain sehingga kondisi ketahanan pangannya lebih stabil. Dengan demikian terbukti bahwa konsumsi padi di Kabupaten Bojonegoro sudah surplus sehingga dapat menyumbangkan pangan di tingkat nasional, hal ini juga telah sesuai dengan visi Kabupaten Bojonegoro yaitu “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil Sejahtera, Bahagia, Dan Berkelanjutan”, dan telah sesuai dengan teori Tarigan tersebut.

Contoh lain hasil pertanian yang juga menjadi unggulan di Kabupaten Bojonegoro adalah tembakau virginia karena jenis tembakau ini merupakan jenis tembakau yang pertama kalinya dicetuskan oleh Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2011 tembakau mencapai produksi 14.509 ton, tahun 2012 menurun menjadi 7.977 ton. Hasil tembakau kering pada waktu sebelum tahun 2012 sering dijual kepada perusahaan rokok milik PT. Gudang Garam namun karena pada waktu saat ini yaitu mulai tahun 2012 sampai sekarang tahun 2014 perusahaan PT. Gudang Garam sudah tutup dan tidak buka. Akibat dikarenakan PT. Gudang Garam pada saat ini sudah tidak buka mungkin menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah produksi tembakau di tahun 2012, karena pemasok terbanyak tembakau kering sebelumnya adalah dari PT. Gudang Garam. Akan tetapi, meskipun PT. Gudang Garam sudah tidak buka para petani Bojonegoro masih bisa menjual hasil tembakau kering mereka kepada perusahaan rokok lain misalnya PT. Djarum, Sadana, dan UD. Sopyono meski bahan baku yang diserap oleh perusahaan rokok tersebut tidak terlalu banyak.

Sementara, untuk sektor yang nilainya kurang dari satu yaitu meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta yang terakhir adalah sektor industri pengolahan. Kelima sektor tersebut tergolong bukan unggulan atau sektor non basis telah sesuai dengan teori yang pernah dijelaskan oleh Tarigan (2005:29) bahwa “sektor non basis adalah semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam

kegiatan sektor non basis. Sektor non basis adalah sektor/ kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat". Jadi kelima sektor yang terdiri dari sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta yang terakhir adalah sektor industri pengolahan tidak bisa melakukan ekspor ke luar daerah namun hanya bisa menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat/ lokal. Dengan pernyataan teori tersebut memang benar, saat ini sektor yang bukan unggulan di Kabupaten Bojonegoro hanya mampu memasarkan barang dan jasanya ke dalam negeri, bahkan masih cenderung impor.

Apabila dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Bojonegoro (Eks Karesidenan) dapat diperoleh hasil bahwa sektor unggulan (basis) dari masing-masing Kabupaten (sektor dengan nilai $LQ > 1$) adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Bojonegoro : sektor pertanian; pertambangan dan penggalian;
sektor bangunan; dan sektor jasa-jasa
- 2) Kabupaten Tuban : sektor pertanian; serta sektor pertambangan dan
penggalian
- 3) Kabupaten Lamongan : sektor pertanian; serta sektor jasa-jasa
- 4) Kabupaten Jombang : sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan
restoran; serta sektor jasa-jasa
- 5) Kabupaten Mojokerto : sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan

Dari potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah di wilayah eks-karesidenan Bojonegoro maka prioritas utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan aglomerasi ekonomi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban. Aglomerasi ini menitikberatkan pada sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian. Kedua Kabupaten tersebut dapat secara bersama-sama mengembangkan sektor yang menjadi unggulan di daerah keduanya yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun pengembangan yang dilakukan jangan sampai pada komoditas yang sama. Selain itu, tentu saja interaksi ini nantinya tidak boleh mengabaikan potensi-potensi yang ada di daerah-daerah yang lain. Paling tidak dari analisis ini dapat memberikan gambaran bahwa, agar pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten-kabupaten di eks-karesidenan Bojonegoro dapat tumbuh secara cepat maka aglomerasi ekonomi dari Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban harus dilakukan secara konsekwen. Aglomerasi ini diharapkan nantinya dapat merembet ke daerah-daerah yang lain.

Adanya peningkatan pada nilai PDRB sektor migas dan pertanian menjadikan pendapatan perkapita yang dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro dari 3 tahun ke tahun juga telah mengalami peningkatan. Hal ini dipicu pula dengan adanya sektor unggulan yang terus mengalami peningkatan pada perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan yaitu senilai 6.714.624 pada tahun 2010, pada tahun 2011 senilai 7.293.922, dan pada tahun 2012 senilai 7.701.754. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (1982:37)

bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan pendapatan riil perkapita.

2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Sektor Unggulan

a. Strategi Dinas ESDM dalam Mengembangkan Sektor Migas (Minyak dan Gas Bumi) Kabupaten Bojonegoro

1. Dasar Hukum Dan Latar Belakang dalam Mengembangkan Migas

Dalam melakukan pengembangan migas yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro tentunya didasari adanya sebuah dasar hukum yang mengikatnya. Dasar hukum tersebut meliputi undang-undang dasar (UUD) 1945 khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi secara jelas menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini jelas bahwa adanya kekayaan alam migas tersebut adalah murni tanggung jawab negara. Dasar hukum yang lainnya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi khususnya bagian kedua tentang pengawasan Pasal 41 ayat 2 menjelaskan bahwa “Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”. Sementara pada pasal 45 ayat 1 berbunyi “Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara”, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas, serta Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Di Bidang Industri Ekstraktif. Adanya dasar hukum yang sudah diatur dalam regulasi tersebut mempermudah pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu, di dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 pasal 90 poin b nomor 1 menyatakan bahwa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya, serta Tuban dan sekitarnya. Artinya bahwa kabupaten Bojonegoro termasuk dalam rencana pengembangan kawasan strategis wilayah khusus pertambangan migas yang berada dalam lingkup pengelolaan Pemerintah Daerah provinsi sebagai kawasan strategis propinsi (KSP).

Pertambangan dan perminyakan adalah 2 (dua) hal yang berbeda, baik dari sudut keberadaan sebagai sumber daya alam, maupun dari sisi tata kelolanya. Pertambangan secara umum diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba sedangkan perminyakan diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tata kelola antara 2 (dua) unsur sumber daya alam tersebut memiliki

ruang lingkup yang sangat berbeda sehingga tidak dapat dijadikan dalam satu regulasi, karena nantinya dapat menimbulkan bias implementasi kewenangan dan tata kelola. Sebagai contoh riil adalah adanya pelimpahan kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (diikuti indikator tata kelola lain seperti pengawasan, pembinaan dan pengaturan), hal ini berbeda dengan pengelolaan minyak dan gas bumi bahwa segala tata kelola minyak dan gas bumi baik pengaturan, pengawasan maupun pembinaan harus sesuai ketentuan perundangan, kewenangannya tidak dilimpahkan ke daerah. Sehingga disini pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro sama sekali tidak ikut campur mengenai perencanaan sampai dengan pengawasannya.

Adanya dasar hukum yang mengikat tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaannya. Masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola potensi minyak dan gas bumi yaitu adanya eksplorasi dan eksploitasi migas *onshore* di wilayah Kabupaten Bojonegoro berada di lingkungan permukiman penduduk yang rata-rata terkategori penduduk miskin. Sehingga sangat rentan terhadap munculnya gejala sosial masyarakat, selain itu belum optimalnya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 yang disebabkan beberapa faktor seperti, masih rendahnya kepedulian K3S dan kontraktor pelaksanaannya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat sekitar proyek serta dalam beberapa sisi masih muncul ambigu implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, khususnya dalam menterjemahkan domain

negara atas tata kelola migas. Karena terdapat beberapa permasalahan dari adanya dasar hukum tersebut sehingga cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro adalah dengan memberikan pengawasan terhadap K3S dalam memberlakukan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja *unskill* dengan alasan agar pemerintah daerah tidak kecolongan lagi apabila pihak K3S ada yang mengambil tenaga kerja *unskill* dari luar Bojonegoro.

2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Migas

Dalam mengerjakan pengembangan migas, mekanisme organisasi yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sudah berjalan cukup bagus. Hal ini dipacu karena pembagian tugas yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro sudah jelas, sehingga menjadikan para pegawai/ staf mudah untuk melakukan koordinasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Didalam mengerjakan pengembangan migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro tidak berjalan sendiri namun ada organisasi / SKPD lain yang turut serta terlibat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Strategic Planning Tools*, yaitu SKPD/ Unit Kerja yang menangani perencanaan pembangunan strategis daerah, dalam konteks ini adalah strategi umum perencanaan dan pengembangan potensi mineral

dan migas. Selanjutnya Badan Perijinan Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Operational Tools*, yaitu SKPD/ Unit Kerja yang menangani proses perijinan pemanfaatan potensi mineral baik, dalam rangka penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). Terakhir adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, sebagai *Operational Tools*, yaitu SKPD/ unit kerja yang menangani sektor hilir ataupun sektor industri dan perdagangan lain sebagai *multiplier effect* industri mineral dan migas. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan dari Jhingan yang dikutip oleh Arsyad (2010:164) bahwa “ada beberapa syarat atau kondisi untuk keberhasilan suatu perencanaan yaitu salah satunya yaitu adanya badan perencanaan, prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah adanya suatu badan perencanaan yang terorganisir dengan cara tepat”. Selain pendapat yang disebutkan oleh Jhingan tersebut, adanya organisasi yang saling terlibat tersebut juga telah sesuai dengan syarat perencanaan yang disebutkan oleh Dadang Solihin melalui (slideshare.net) menjelaskan bahwa “syarat perencanaan yaitu harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan salah satunya adalah orang, organisasi, atau badan pelaksananya”.

Sementara pihak yang mengelola migas di Kabupaten Bojonegoro adalah BP migas pusat dengan kontraktor kontrak kerjasama (K3S) yaitu Pertamina EP Cepu, *Exxon Mobile*, dan *Petrochine East Java*. Pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya sebagai sumber penerimaan daerah, penggerak

pembangunan daerah, penggerak investasi di daerah dan memberikan perijinan usaha pertambangan, memberikan implikasi timbulnya efek berantai (*multiplier effect*) industri turunan sektor hilir, serta membuka lapangan kerja yang cukup besar.

3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Migas

Dalam membuat sebuah perencanaan strategi pengembangan sektor migas ini tidak luput dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan menentukan tujuan dan sasaran ini nantinya merupakan langkah awal dalam membuat perencanaan strategi pengembangan untuk sektor pertambangan migas. Namun dikarenakan pertambangan migas menjadi tanggung jawab pusat maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro adalah tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan adanya pemanfaatan pengelolaan sektor pertambangan migas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, mengendalikan pengelolaan & pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) & pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari, mewujudkan akuntabilitas regulasi tata kelola dan ketersediaan data energi dan sumber daya mineral, melaksanakan tata kelola energi dan sumber daya mineral serta air tanah guna mendukung

kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari, meningkatkan nilai tambah energi dan sumber daya mineral bagi keberdayaan masyarakat, meningkatkan efek berantai (*multyplier effect*) industrialisasi sektor energi dan sumber daya mineral, mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas tenaga aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

Dengan ditentukannya tujuan tersebut juga telah sesuai dengan salah satu syarat perencanaan dari Dadang Solihin melalui (wldeshare.net) bahwa “perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan tujuan akhir yang dikehendaki”. Sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa tujuan akhir dari kebijakan pemanfaatan pengelolaan pertambangan migas ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta mengendalikan pengelolaan & pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) & pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari. Tujuan yang dikemukakan tersebut juga telah sesuai dengan teori perencanaan dari Soekartiwi (1990:4) yang menyebutkan bahwa “pada dasarnya perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya alam atau sumberdaya manusia. Bagaimana suatu sumberdaya dapat dialokasikan secara maksimal”.

Syarat perencanaan yang kedua menurut Solihin melalui (slideshare.net) adalah “perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya”. Berkaitan dengan syarat perencanaan tersebut maka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertambangan migas adalah meningkatnya pemantapan perencanaan sektor sumber daya alam secara terarah, meningkatnya kualitas penataan dan pemanfaatan sumber daya energi, serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dan energi, terumuskannya tata kelola energi dan sumber daya mineral dalam regulasi daerah dan juknis operasionalnya, meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap data energi dan sumber daya mineral, meningkatnya status data dasar geologi, sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologi, meningkatnya pengembangan sumber daya mineral dan migas, meningkatnya investasi sektor energi dan sumber daya mineral, meningkatnya peran pemanfaatan secara lestari sektor energi dan sumber daya mineral dalam pembangunan daerah, meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola pemanfaatan dan informasi geologi dan air tanah bagi masyarakat, meningkatnya dayaguna dan daya hasil migas bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya industri yang berbahan baku dari sektor migas (*forward linkage*), terwujudnya efektifitas indikator kinerja hasil pembangunan, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, serta

terwujudnya kapabilitas dan tata kelola sektor ESDM dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Penetapan sasaran tersebut juga telah sesuai dengan salah satu syarat keberhasilan yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan menurut Jhingan dikutip oleh Arsyad (2010:164) bahwa “syarat atau kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan suatu perencanaan adalah penetapan sasaran dan prioritas, penetapan dan sasaran prioritas ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.

4. Perencanaan Strategi Pengembangan Migas

Dalam merencanakan pengembangan pada pertambangan migas ini, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak turut andil/ tidak turut serta, karena sesuai yang disebutkan sebelumnya, bahwa untuk tahapan perencanaan migas tidak menjadi tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro. Seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan dilakukan oleh pusat. Pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro tidak diberikan kewenangan karena potensi migas adalah milik pusat. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya sebatas diberikan laporan hasil lifting dan dana bagi hasil (DBH) saja. Selebihnya pemerintah pusat yang dan KKS migas yang mengaturnya. Hal ini berarti pendekatan perencanaan yang dipakai adalah proses teknokratik dan *top down*. Seperti yang telah dijelaskan didalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan dalam Kuncoro (2012:53) bahwa “dikenal empat pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu proses politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom-up* dan *top down*”. Berdasarkan undang-undang tersebut, pendekatan yang dipakai dalam proses perencanaan sektor pertambangan mineral dan migas ini adalah menggunakan proses teknokratik dan *top-down*. Hal ini juga telah sesuai pula dengan ciri pendekatan yang dijabarkan oleh Kuncoro (2012:53) bahwa “proses teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/ unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, sedangkan proses *top-down* adalah perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah”. Mengacu pada teori milik Kuncoro tersebut perencanaan pertambangan migas memang dilakukan secara teknokratik karena tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, untuk mengelola migas juga dibutuhkan ahli professional dibidangnya. Sementara proses *top down* perencanaan migas ini berasal dari pemerintah pusat, karena sesuai yang disebutkan sebelumnya bahwa domain migas adalah pemerintah pusat artinya milik negara dan perencanaan yang dilakukan memang terencana dari pusat.

5. Strategi Pengembangan Migas

Strategi dan kebijakan tata kelola pertambangan dan migas dalam implementasinya mengacu pada visi Kabupaten Bojonegoro yakni “Terwujudnya Pondasi Kabupaten Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera Dan Berkelanjutan”. Dari visi yang ditetapkan tersebut dirumuskan misi yang salah satunya berbunyi “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis strategi migas dan agroindustri meliputi peningkatan sumberdaya air dan infrastrukturnya”, sedangkan strategi umum bidang minyak dan gas bumi adalah mengadakan perluasan lapangan kerja di sektor migas, kawasan industri migas dan turunannya, selanjutnya produksi gas bisa dimanfaatkan oleh daerah, sektor migas dan pertambangan lainnya mendukung *sustainable environment*, serta adanya dukungan program CSR sektor migas yang tepat sasaran. Strategi ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro. Terbuatnya strategi tersebut telah sesuai dengan teori dari Siagian yang dikutip oleh Riyadi & Bratakusumah (2004:69) bahwa “strategi adalah cara menentukan misi pokok suatu organisasi”.

Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas ESDM berdasarkan RENSTRA Dinas ESDM adalah meningkatkan akuntabilitas tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral dan air tanah, meningkatkan akuntabilitas data base sektor energi dan sumber daya mineral, mengantisipasi dampak negatif akibat bencana geologi, meningkatkan pemanfaatan potensi keunggulan kompetitif daerah, meningkatkan upaya

perkuatan struktur perekonomian daerah berbasis migas dan agribis, menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan, mengelola sumber daya geologi dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi/rehabilitasi lahan, mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan transparansi dan tata kelola hasil migas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan daerah melalui investasi industri hilir sektor migas, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas ESDM sesuai TUPOKSI yang telah ditentukan, serta meningkatkan kinerja pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral Dinas ESDM. Adanya kebijakan tersebut telah sesuai dengan salah satu syarat perencanaan yang disebutkan oleh Dadang Solihin dalam (slideshare.net) bahwa “syarat perencanaan yaitu harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya”.

Meskipun migas menjadi domain pusat namun dalam hal ini migas juga tidak tergantung pada DBH (Dana Bagi Hasil) sehingga Pemkab dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menempuh jalan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara menerbitkan Perda Konten Lokal Nomor 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan potensi lokal baik ketenagakerjaan maupun pelaku usaha lokal dan merupakan satu-satunya di Indonesia, kemudian yang kedua

adalah menerbitkan Perbub (Peraturan Bupati) tentang ADD (Alokasi Dana Desa) dan juga satu-satunya di Indonesia, serta *endowmentfund*, maksudnya tidak ingin apabila Bojonegoro nanti habis manis sepah dibuang artinya kalau minyak sudah habis tereksplorasi nantinya Bojonegoro tidak dapat apa-apa, sehingga Pemkab tidak menginginkan hal tersebut. Oleh sebab itu Pemkab menyertakan dana abadi di Bank Jatim dan DBH sebagai dana abadi. Dahulu Bojonegoro sempat menjadi 5 penghutang terbesar di Jawa Timur sedangkan sekarang Bojonegoro menjadi lima penyandang saham terbesar di Jawa Timur. Jadi penyertaan modalnya seperti itu. Adanya strategi tersebut juga telah sesuai dengan salah satu unsur pokok dari Arsyad (2010:159) yang mengatakan bahwa “setiap perencanaan pembangunan juga harus mengandung unsur pokok seperti adanya kebijakan atau strategi dasar dalam pembangunan”.

Salah satu paradigma pembangunan yang dikemukakan oleh (Fernanda, 2010 melalui diklatpimlan.files.wordpress.com) adalah *human development paradigm* (paradigma pembangunan manusia). Paradigma ini dilandasi oleh keyakinan dan pengakuan atas kekuatan *people choices* (pilihan rakyat), dalam arti rakyat harus diberi kesempatan untuk menggunakan kapabilitas dan kapasitasnya untuk membangun dirinya sendiri dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup generasi penerusnya dengan sumber daya dan lingkungan hidup yang lestari secara berkelanjutan. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, mendorong peningkatan kapabilitas maupun penggunaannya

dan mengurangi penderitaan dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan generasi penerus. Jika dikaitkan dengan paradigma tersebut maka meskipun pemanfaatan kekayaan migas tidak sepenuhnya *public oriented* (faktor domain pusat dan minimnya porsi tingkat keterlibatan serta porsi pemberdayaan masyarakat lokal), namun sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam memberikan perlindungan pada masyarakat adalah meletakkan strategi melalui rumusan kebijakan daerah yang harus mampu menjawab beberapa poin penting diantaranya adalah bagaimana mengarahkan pendayagunaan potensi migas yang ada di daerah, nantinya juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui perwujudan kemandirian dan keunggulan daerah serta bagaimana masyarakat mendapatkan *intended impact* (bukan *unintended impact*) dari implementasi kebijakan pendayagunaan potensi migas. Singkatnya, bagaimana masyarakat di daerah turut “berdaya” dengan kepemilikan keunggulan kompetitif potensi migas. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Selanjutnya apabila memperhatikan Undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3, maka yang paling berkepentingan secara primer dengan pengelolaan migas sesungguhnya adalah masyarakat. Tentu masyarakat yang hidup di wilayah eksploitasi migas berkeinginan untuk tidak menjadi pihak yang banyak dirugikan dan berdaya dalam konstelasi politik lokal dan nasional. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu pemerintah Kabupaten

Bojonegoro membuat adanya perda konten lokal yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro, perda ini dimaksudkan sebagai pemberdayaan potensi lokal dalam pembangunan berbasis migas di Kabupaten Bojonegoro. Perda konten lokal ini merupakan senjata pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengusahakan agar masyarakat Bojonegoro tidak menjadi penonton di rumah sendiri akibat adanya eksploitasi migas. Sebab dengan hadirnya perda konten lokal ini mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk merekrut sebagian besar tenaga kerjanya dari masyarakat lokal meskipun bukan direkrut sebagai tenaga ahli (*unskill*). Perda konten lokal tersebut juga merupakan satu-satunya perda di Indonesia yang mengatur sumber daya alam berbasis konten lokal. Adanya penerbitan perda konten lokal tersebut tentunya berdampak pada berimbangnya pertumbuhan ekonomi, sebab adanya proyek pertambangan migas juga akan menumbuhkan/ menaikkan angka pendapatan masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran di daerah sekitar. Hal tersebut telah sesuai dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Arsyad sebagaimana dikutip oleh Danantyo (2012:13) “strategi ekonomi dapat dicapai salah satunya melalui strategi pengembangan masyarakat (*community-based development strategy*). Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan

memberdayakan (*empowerment*) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah”.

6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Migas

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perencanaan pengembangan migas mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pengawasan bahkan sampai pada pelaksanaan semua dilakukan oleh pusat dan SKK (Satuan Kerja Khusus) migas. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro hanya memberikan masalah perijinan usaha pertambangan, IMB, rekon lifting, dan sebagai penerima Dana Bagi Hasil (DBH) saja. Sehingga dalam bidang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa migas adalah domain pemerintah pusat. Meskipun migas adalah domain pusat itu hanyalah pada strategi secara teknis dan bisnis saja, untuk strategi sosial tetap daerah yang melaksanakannya sehingga dalam rangka pengendalian masalah sosial (khususnya area ring lokasi eksplorasi dan eksploitasi) maka pemerintah daerah menitikberatkan pada upaya pengendalian sosial melalui strategi pemberdayaan masyarakat, baik melalui piranti perijinan (IMB dan HO) maupun upaya legal melalui penerbitan perda konten lokal sebagai langkah perlindungan kepada tenaga kerja dan unit usaha lokal.

Meskipun perda konten lokal belum berjalan efektif 100 % namun, sudah memberikan kontribusi bagus didalam pemberdayaan masyarakat.

Hal ini terbukti dengan progres penyerapan tenaga kerja dalam 2 minggu yang cukup tinggi, bergeraknya sektor jasa disekitar area eksploitasi migas, serta pembangunan sarana-sarana pendukung kegiatan migas tidak dibangun pada area *Central Processing Facility* (CPF) akan tetapi dibangun pada kawasan *zona development*. Sementara sosialisasi yang diberikan berupa program CSR, diklat, beasiswa AK migas (maksudnya adalah beasiswa bagi anak-anak daerah untuk bersekolah ke sekolah khusus migas).

b. Strategi Dinas Pertanian dalam Mengembangkan Sektor Pertanian (Komoditas Padi) Kabupaten Bojonegoro

1. Dasar Hukum Dan Latar Belakang Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Pembuatan suatu program perencanaan strategi pengembangan pertanian khususnya komoditas padi tentunya didasari oleh undang-undang dan produk hukum lainnya. Demikian pula dengan pembuatan suatu strategi pengembangan pertanian komoditas padi ini yang dilatarbelakangi oleh sesuatu hal sehingga mengakibatkan mengapa strategi ini perlu dilakukan. Dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah atas dasar acuan dari dokumen RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) yang disesuaikan pula dengan visi-misi Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dalam menjalankan perannya Dinas Pertanian juga memakai dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 yang di dalamnya terdapat Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) yang

harus kerjakan dan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya dasar hukum tersebut memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Latar belakang yang mendasari atas dilakukannya strategi pengembangan pertanian khususnya komoditas padi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dikarenakan potensi pertanian yang terus dan masih tetap menjadi unggulan nomer dua setelah pertambangan dan penggalian. Hal ini dipicu adanya lahan sawah yang ada di Kabupaten Bojonegoro cukup luas yaitu sekitar lebih dari ± 77.000 Ha. Dengan luas lahan tersebut, potensi yang menjadi unggulan adalah komoditas padi. Rata-rata produksi 1 (satu) tahun mencapai ≥ 840.000 ton gabah kering giling. Sehingga dengan kondisi luas lahan dan produksi tersebut sangat dimungkinkan adanya pengembangan komoditas padi selanjutnya. Produksi padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro juga menduduki posisi 3 besar se-Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian selain sudah mampu mencukupi ketahanan pangan di daerah sendiri, produksi padi Bojonegoro juga telah berkontribusi dalam memberikan sumbangan pangan nasional. Dengan adanya kontribusi pangan nasional tersebut telah membuktikan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro telah menjadi sektor basis dan hal ini telah sesuai dengan pernyataan dari Ambardi dan Socia dalam Ghufron (2008:20) yang menyebutkan bahwa “sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan”. Selain itu di dalam

Perda Propinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 pasal 74 point 2 menyatakan bahwa ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi salah satunya Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung. Artinya bahwa kabupaten Bojonegoro dan 4 kabupaten disekitarnya (eks-karasidenan) termasuk kabupaten Lamongan, Mojokerto, Jombang, dan Tuban termasuk dalam penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Organisasi yang Terlibat Dalam Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Mekanisme organisasi yang ada pada pembuat perencanaan strategi pengembangan pertanian khususnya komoditas padi dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didorong dengan pembagian tugas yang ada pada Dinas Pertanian sudah jelas, sehingga akan memudahkan para pegawai/ staf untuk berkoordinasi dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jika disimak lebih lanjut, maka struktur organisasi dan cara kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sudah dibagi masing-masing tugas di tiap-tiap bagian, sehingga tidak ada satupun bagian yang kosong karena masing-

masing bagian sudah memiliki wewenang dan tugas sendiri-sendiri, dengan demikian akan mendukung terciptanya suatu mekanisme kerja yang teratur. Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1987:52) bahwa “salah satu ciri dari perencanaan pembangunan adalah adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan”.

Dalam melaksanakan pengembangan pertanian komoditas padi, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro melakukan atau menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi lain diantaranya kelompok tani/ gabungan kelompok tani, himpunan petani pemakai air (HIPA), unit pelayanan jasa alat mesin pertanian (ALSINTAN), dan pusat pengembangan agensi hayati (PPAH). Hal ini telah sesuai dengan salah satu syarat perencanaan yang diajukan oleh Dadang Solihin melalui (slideshare.net) bahwa “syarat perencanaan yaitu harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan orang, organisasi atau badan pelaksananya”.

3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Sebelum menyusun sebuah strategi pengembangan pertanian pada komoditas padi dibutuhkan adanya perencanaan terlebih dahulu. Adanya perencanaan itu sendiri pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa adanya strategi pengembangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan produksi padi yang mana guna mendukung pencapaian daerah Kabupaten Bojonegoro

sebagai lumbung pangan bagi negeri, meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi padi, adanya optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, serta memberdayakan petani/ kelompok tani dan melaksanakan usaha tani. Adanya pemberdayaan petani atau kelompok tani dirasa telah sesuai dengan salah tujuan pembangunan yang disebutkan oleh Solihin melalui (slideshare.net) “tujuan pembangunan adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan perencanaan strategi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sudah sangat jelas dan terarah, bahwa setiap pelaksanaan program strategi yang dilakukan harus sudah mengarah pada tujuan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan salah satu syarat keberhasilan dari perencanaan yang dikemukakan Jhingan sebagaimana dikutip oleh Arsyad (2010:164) bahwa “di dalam suatu perencanaan, dapat pula ditetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara, seperti kenaikan pendapatan nasional, perkapita, peningkatan produksi pertanian, pencapaian swasembada dan sebagainya”. Arah dan tujuan yang jelas dari perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro juga telah sesuai dengan salah satu syarat perencanaan yang ajukan oleh Dadang Solihin melalui (www.slideshare.net) bahwa “syarat perencanaan yaitu harus memiliki, mengetahui, dan mempertimbangkan tujuan akhir yang dikehendaki”. Selain itu juga, telah sesuai dengan salah satu aspek perencanaan pembangunan dari (Solihin, 2009 melalui hayda.wordpress.com) bahwa” perencanaan pembangunan

daerah sebagai suatu usaha yang sistematis dengan cara merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah”.

Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Soekartiwi (1990:5) bahwa “perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai, kadang-kadang sasaran-sasaran ataupun tujuan dari suatu perencanaan sering dikaitkan dengan kelompok sasaran atau *target group* atau dengan kata lain pada kelompok mana tujuan dari perencanaan tersebut ditujukan”. Hal ini terbukti perencanaan atas strategi pengembangan pertanian komoditas padi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro bahwa yang menjadi sasaran adalah petani/ kelompok tani/ gabungan kelompok tani, penyuluh swakarsa/ petani perintis, serta petugas pertanian. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar yang menjadi sasaran adalah tetap para petani. Adanya penetapan sasaran tersebut juga telah sesuai dengan salah satu syarat yang disebutkan Jhingan sebagaimana dikutip oleh Arsyad (2010:164) bahwa “syarat kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan suatu perencanaan yaitu penetapan dan sasaran prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan secara makro sektoral”.

4. Perencanaan Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Perencanaan strategi pengembangan pertanian khususnya komoditas padi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro ini dilalui dengan 3 tahapan yaitu perencanaan dalam membuat target tanam, membuat target panen, serta membuat target produksi. Target tersebut lalu di *breakdown* per

wilayah Kecamatan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Adanya target-target tersebut dan potensi yang dimiliki di masing-masing wilayah ini telah sesuai dengan teori dari Arsyad (2010:160) yang menyatakan bahwa “perencanaan memungkinkan kita untuk melakukan perkiraan tentang potensi, prospek pertumbuhan, hambatan serta resiko yang mungkin di masa datang”. Sementara didalan teori perencanaan strategi yang dikemukakan Bryson (2007:55) menyebutkan bahwa ada delapan langkah yang harus ditempuh dalam merumuskan perencanaan strategi diantaranya yaitu:

- a) memprakarsai dan menyepakati suatu proses renstra
- b) mengidentifikasi mandat (tupoksi) organisasi
- c) memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
- d) menilai lingkungan eksternal
- e) menilai lingkungan internal
- f) mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi
- g) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu
- h) menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Dari delapan langkah tersebut, telah terpenuhi 6 langkah perencanaan strategis yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu dimulai dengan mengidentifikasi mandat (tupoksi) organisasi, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian
- d) pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang pertanian
- e) pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pertanian
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro juga sudah memperjelas misi organisasi. Yang menjadi misi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertanian adalah sebagai berikut:

- a) mengoptimalkan produktivitas komoditas pertanian dengan memperhatikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial bidang pertanian secara seimbang berkesinambungan dan bertanggung jawab
- b) meningkatkan SDM atau petani dalam upaya mengelola komoditas pertanian
- c) membangun infrastruktur bidang pertanian sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
- d) mengupayakan ketersediaan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat dosis, dan tersedia secara merata sesuai kebutuhan petani
- e) memanfaatkan peran teknologi informasi dalam upaya menjembatani proses alih teknologi pertanian, penyuluhan pertanian, dan komunikasi antar *stakeholder* bidang pertanian.

Langkah yang selanjutnya adalah menilai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertanian. Sehingga yang menjadi peluang untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a) berkembangnya teknologi pertanian yang semakin mempercepat pembangunan pertanian
- b) pasar komoditas tanaman pangan yang terbukti luas
- c) peluang investasi di bidang agroindustri dan agribisnis cukup besar
- d) tersedianya fasilitas permodalan dari Bank/ Lembaga Keuangan Non Bank
- e) berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/ kelompok tani dengan pengusaha/ produsen

Kemudian ancaman yang harus dihadapi adalah:

- a) berkembangnya pembangunan industri dan perumahan mengakibatkan penurunan sumber daya alam pertanian dan tenaga kerja di bidang pertanian
- b) rusaknya sumber daya alam dan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan
- c) masih tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan anomali iklim
- d) kebijakan ekonomi makro yang kurang mendukung pembangunan pertanian

Langkah selanjutnya adalah menilai lingkungan internal. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kalau lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman sedangkan lingkungan internal di dalam penelitian ini berupa kekuatan dan kelemahan yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga yang menjadi kekuatan adalah:

- a) tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian
- b) adanya dukungan teknologi di bidang pertanian yang memadai
- c) adanya dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program
- d) pencapaian program sebelumnya
- e) tersedianya teknologi informasi
- f) tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung baik asset Dinas Pertanian maupun dukungan masyarakat
- g) terjalinnya kemitraan antara petani, pemerintah, dan pengusaha yang harmonis sehingga mendukung kelancaran pembangunan pertanian

Kemudian yang menjadi kelemahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertanian adalah:

- a) masih belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia pertanian dari aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan pertanian
- b) masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian

- c) masih belum mantapnya penerapan pengelolaan sarana prasarana dan penerapan prinsip-prinsip tata kerja pertanian dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian
- d) ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah
- e) masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian
- f) tingkat kehilangan hasil yang masih cukup tinggi
- g) infrastruktur di bidang pertanian masih terbatas

Langkah perumusan perencanaan strategi selanjutnya menurut Bryson ini adalah mengidentifikasi isu-isu strategi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan pertanian. Yang menjadi isu-isu strategi adalah adanya:

- a) tuntutan kebutuhan pangan yang semakin meningkat akibat penambahan penduduk, sementara lahan pertanian makin lama makin berkurang akibat tuntutan pembangunan baik perumahan maupun industri migas
- b) kondisi pertanian yang semakin menurun tingkat kesuburannya
- c) semakin menurunnya jumlah petani
- d) perubahan iklim akibat dari *global warming*
- e) masih rendahnya akses permodalan petani, teknologi informasi, dan pasar
- f) nilai tambah hasil petani masih belum dinikmati petani

Setelah mengidentifikasi adanya isu-isu strategi yang harus dihadapi dalam mengembangkan pertanian, langkah selanjutnya adalah merumuskan

strategi-strategi untuk mengelola isu-isu tersebut. Sedangkan strategi-strategi yang harus dilakukan adalah :

- a) pengembangan padi hibrida
- b) pendampingan petani melalui sekolah lapang yakni sekolah yang dilaksanakan di kelompok tani yang secara langsung di praktekan di sawah dan melakukan pengamatan yang didampingi petugas PPL dan POPT
- c) optimalisasi kemanfaatan air bengawan solo melalui pompanisasi berbasis listrik
- d) optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik
- e) gerakan taman dengan menggunakan metode jajar legowo yaitu metode dengan jarak taman yang bervariasi (diikuti dengan pemupukan berimbang yakni pupuk urea 200 kg/Ha, ponska 300 kg/Ha, organik 500 kg/Ha)
- f) penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam/*transplanter* dan alat panen yaitu *powerthresher* dan *combine harvester*.
- g) perbaikan intensifikasi pertanian
- h) mengupayakan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan
- i) peningkatan pengetahuan SDM mulai dari petani, penyuluh, maupun insan pertanian secara umum sesuai dengan teknologi yang berkembang

- j) membangun fasilitas teknologi informasi dalam upaya pengontrol, pemantau, dan mengevaluasi program-program dan kebijakan bidang pertanian. Misalnya dengan membangun fasilitas *sms center*.

Selanjutnya langkah terakhir dari perumusan strategi yang dikemukakan oleh Bryson adalah menetapkan visi organisasi. Dalam penelitian ini visi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah “Mewujudkan petani yang maju, mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan SDA secara berkesinambungan guna mendukung Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan”.

5. Strategi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Untuk menjalankan sebuah perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya yakni membuat target tanam, panen, dan produksi salah satunya dapat dicapai melalui strategi-strategi pengembangan. Strategi-strategi tersebut diantaranya dilakukan melalui pengembangan sarana prasarana, akselerasi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, penguatan kelembagaan, pengembangan padi hibrida, pendampingan petani melalui sekolah lapang yakni sekolah yang dilaksanakan di kelompok tani yang secara langsung di praktekkan di sawah dan melakukan pengamatan yang didampingi petugas PPL dan POPT, kemudian optimalisasi kemanfaatan air bendungan solo melalui pompanisasi berbasis listrik, selanjutnya optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik, strategi selanjutnya

adalah gerakan taman dengan menggunakan metode jajar legowo yaitu metode dengan jarak taman yang bervariasi (diikuti dengan pemupukan berimbang yakni pupuk urea 200 kg/Ha, ponska 300 kg/Ha, organik 500 kg/Ha), strategi berikutnya adalah penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam/ *transplanter* dan alat panen yaitu *powerthresher* dan *combine harvester*, kemudian perbaikan intensifikasi pertanian, lalu mengupayakan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan, selanjutnya peningkatan pengetahuan SDM mulai dari petani, penyuluh, maupun insan pertanian secara umum sesuai dengan teknologi yang berkembang, serta strategi yang terakhir adalah membangun fasilitas teknologi informasi dalam upaya pengontrol, pemantau, dan mengevaluasi program-program dan kebijakan bidang pertanian, misalnya dengan membangun fasilitas *sms center*. Adanya strategi-strategi di atas diharapkan mampu mencapai tujuan dan saran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan definisi strategi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1993:13) “strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang tepat guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan”.

Sementara disisi yang berbeda Arsyad (2010:156-157) mengemukakan bahwa “perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sosial atau organisasional yang disengaja untuk mengembangkan suatu strategi optimal dari tindakan nyata dimasa depan untuk mencapai suatu kumpulan tujuan yang diinginkan untuk memecahkan masalah-

masalah dalam konteks yang kompleks dan disertai oleh kekuatan dan keinginan untuk menjalankan sumberdaya yang ada dan juga bertindak seperlunya untuk mengimplementasikan strategi terpilih”. Teori tersebut telah sesuai dengan strategi-strategi yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro diatas. Adanya strategi yang telah dibuat tersebut, diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah pertanian yang selama ini dikeluhkan.

6. Perencanaan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengembangan Pertanian (Komoditas Padi)

Perencanaan pelaksanaan pengembangan pertanian komoditas padi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sudah cukup bagus. Hal ini terbukti dengan pertimbangan adanya bahasa yang mudah dimengerti dan alur kegiatan dari strategi pengembangan juga sudah tepat. Perencanaan yang dilakukan pun sudah bertahap/ berurutan yakni dimulai dengan target tanam, panen, baru yang terakhir adalah tahap produksi. Melihat data yang telah disajikan pada penyajian data, perencanaan pelaksanaan pengembangan pertanian komoditas padi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro juga telah memenuhi kriteria tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan dari Tjokroamidjojo (1987:57-59) sebagai berikut:

- a) penyusun rencana
- b) penyusunan program rencana
- c) pelaksanaan rencana
- d) pengawasan atas pelaksanaan rencana
- e) evaluasi

Selain sudah memenuhi tahapan perencanaan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo tersebut, perencanaan pelaksanaan pengembangan pertanian komoditas padi juga telah sesuai kriteria perencanaan yang baik dan lengkap menurut Syamsi (1994:81-82) yakni mencakup:

- a) apa (*what*), yakni apa yang dilakukan sehingga perlu direncanakan
- b) mengapa (*why*), yaitu alasan memilih dan melakukan kegiatan tersebut dan mengapa perlu diprioritaskan pelaksanaannya.
- c) siapa (obyek) dan siapa (subyek) (*who and who*), menentukan obyek atau sasaran dan menentukan subyek pelaksanaannya yaitu orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.
- d) di mana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek).
- e) kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu/ timing pelaksanaan yang tepat.
- f) bagaimana (*how*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan

Berasarkan teori tersebut telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu berdasarkan dokumen rencana strategi Dinas pertanian Tahun 2009-2013 terdapat 2 program yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Kegiatan yang mencakup dari kedua program tersebut adalah pengamanan ketersediaan pangan melalui Pengamanan ketersediaan pangan melalui pengamanan lahan sawah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian; Pengembangan kualitas dan mutu produk pertanian; Optimalisasi dan pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana; Pengembangan komoditas pertanian substitusi pangan; Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produktivitas dan produksi hasil pertanian; Peningkatan distribusi pangan; Peningkatan pemanfaatan teknologi

pertanian untuk meningkatkan mutu hasil dan menurunkannya tingkat kehilangan hasil; Penganekaragaman pangan kepada keluarga miskin; Peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan kawasan sentra pertanian; Pengembangan desa mandiri pangan; Pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha mandiri; Pengendalian hama terpadu; Pemanfaatan pupuk organik; Pengembangan komoditas ekspor pertanian unggulan; Pembinaan pemasaran hasil pertanian; Pengembangan kemitraan usaha tani tanaman pangan; Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil; Mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara petani dengan pengusaha serta melindungi petani dari persaingan usaha yang tidak sehat; Peningkatan kualitas SDM petani melalui kegiatan pelatihan; Pemberdayaan kelompok tani produktif melalui perluasan jenis usaha di pedesaan; Pemberdayaan kelompok tani, wanita tani, dan masyarakat pertanian dalam pengolahan hasil pertanian. Sementara kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara adalah petani secara swadaya melakukan budidaya tanaman padi; pelaksanaan demplot atau percontohan di beberapa lokasi sentra padi; pelaksanaan program SLPTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu); serta pelaksanaan demvarietas padi unggul baik, padi hibrida maupun padi non hibrida.

Mengapa memilih kegiatan tersebut karena adanya pertimbangan utama adalah potensi lahan mendukung untuk produksi padi yang cukup baik. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan usulan dari petugas yang ada di kecamatan diverifikasi oleh Tim Teknis di Kabupaten sehingga

lokasi yang terpilih betul-betul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah petugas pertanian ditingkat kabupaten/ kecamatan dengan para kelompok tani. Selain itu adanya sosialisasi merupakan salah satu bagian terpenting dari perencanaan yang harus dilakukan guna keberhasilan suatu pelaksanaan perencanaan tersebut. sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari cara sosialisasi pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang secara langsung mengadakan pertemuan dengan petani/ kelompok tani/ gabungan dari kelompok tani. Cara tersebut dinilai cukup baik karena bisa langsung menginformasikan/ menyampaikan kepada para petani. Sehingga jika ada petani atau peserta sosialisasi yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan kepada petugas pertanian, selain itu bentuk sosialisasi yang lain adalah dilakukan melalui radio maksudnya adalah memanfaatkan fasilitas radio yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk menyiarkan tentang pertanian Bojonegoro, serta sosialisasi lewat *sms center* apabila ada yang dikeluhkan bisa langsung sms ke *sms center*. Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro turut mengikutsertakan masyarakat misalnya petani untuk membentuk suatu pola kemitran guna mengelola lahan sawah yang akan ditanami padi. Hal ini telah sesuai dengan teori pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2010:374) yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-

sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi”.

Dari pembahasan sebelumnya mengenai sektor unggulan dan strategi pengembangan sektor paling unggul yakni sektor pertambangan migas dan sektor pertanian dapat diringkas dalam tabel 36 matriks di bawah ini.

Tabel 36 Matriks Teori dan Hasil Penelitian Menurut Fokus yang diteliti

No	Fokus	Empiris di Kabupaten Bojonegoro	Teori	Hasil Analisis
1	<p>Potensi daerah/ sektor-sektor pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro dilihat dari</p> <p>a. potensi/ sektor-sektor perekonomian dalam PDRB diantaranya: sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa.</p> <p>b. Identifikasi sektor unggulan kabupaten Bojonegoro dengan daerah disekitarnya (eks-karasidenan) yang meliputi sektor-sektor perekonomian pada PDRB dengan menggunakan analisis LQ</p>	<p>a. Potensi daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan sektor perekonomian dalam PDRB yaitu dimulai dari sektor pertanian, pada sektor pertanian terdiri atas 5 sub sektor yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Pada sektor pertambangan dan penggalian terdiri atas 2 subsektor yaitu pertambangan migas dan penggalian yang meliputi penggalian komoditas pasir, batu kali, tanah, tanah liat, dll. Pada sektor listrik, gas, dan air bersih hanya ada dua komoditas yang dimiliki yaitu listrik dan air bersih saja. Pada sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung jalan, jembatan, dsb. Pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang kegiatan yang dilakukan meliputi perdagangan, penyediaan akomodasi, hotel serta penjualan makanan dan minuman seperti restoran dan sejenisnya. Pada sektor angkutan dan komunikasi terdiri atas angkutan rel, jalan raya,</p>	<p>Menurut Sumihardjo, (2008:12) potensi daerah pada umumnya meliputi: potensi bidang pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan, dan peternakan; potensi kelautan, sumber hayati dan non hayati; potensi energi dan sumber daya mineral; potensi bidang perindustrian dan perdagangan terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil menengah, sub bidang jasa, konstruksi, dan pariwisata; potensi transmigrasi</p> <p>Menurut Sambodo dalam (Ghufron, 2008:18) sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah. Sedangkan metode untuk memilah antara</p>	<p>Dari hasil empiris penelitian diketahui bahwa potensi daerah/ sektor-sektor pembangunan daerah telah sesuai dengan teori dari Sumihardjo, (2008:12) mengenai potensi daerah yang telah disebutkan yakni meliputi potensi pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura (perkebunan), kehutanan, perikanan, dan peternakan; potensi energy dan sumber daya mineral; potensi bidang perindustrian dan perdagangan. Sementara sektor unggulan yang saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah daerah Bojonegoro adalah sektor pertanian serta pertambangan migas. Kedua sektor ini sekaligus telah menjadi sektor basis ekonomi.</p>

		<p>dan jasa penunjang angkutan sedangkan komunikasinya berupa pos giro, telekomunikasi (telepon, telegraf), pada sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan meliputi bank, sewa bangunan, jasa perusahaan seperti jasa periklanan, serta pada sektor jasa-jasa meliputi jasa pemerintahan dan swasta.</p> <p>b. Setelah diidentifikasi menggunakan analisis LQ sektor yang paling unggul adalah pertanian serta pertambangan dan penggalian.</p>	<p>kegiatan basis dan kegiatan non basis menurut Tarigan (2005:32) salah satunya adalah dengan menggunakan metode analisis LQ. metode LQ membandingkan porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional.</p>	
2	<p>Strategi pemerintah daerah didalam mengembangkan sektor unggulan yakni terdapat 2 sektor paling unggul yaitu:</p> <p>a. Strategi Dinas ESDM didalam mengembangkan sektor migas</p> <p>Strategi Dinas Pertanian didalam mengembangkan sektor pertanian (komoditas padi)</p>	<p>a. Strategi Dinas ESDM didalam mengembangkan sektor pertambangan migas lebih mengarah kepada strategi pemberdayaan masyarakat karena mengacu pada undang-undang tentang migas bahwa daerah tidak diberikan kewenangan dalam mengelola migas sehingga strategi yang dilakukan oleh Dinas ESDM hanya sebatas pada straegi dalam memberdayakan masyarakat dengan cara : Menerbitkan perda konten lokal, Menerbitkan Perub tentang alokasi dana desa, serta endowmentfund maksudnya adalah Pemkab menyertakan dana abadi di Bank Jatim dan DBH sebagai dana abadi.</p> <p>b. Strategi Dinas Pertanian didalam mengembangkan pertanian (komoditas padi) adalah dengan Pengembangan padi hibrida; Pendampingan petani melalui sekolah lapang; Optimalisasi pemanfaatan air bengawan solo melalui</p>	<p>Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 secara jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</p> <p>Menurut Bryson (2007:55) ada 8 langkah perencanaan strategi diantaranya : memprakarsai dan menyepakati suatu proses RENSTRA, mengidentifikasi mandate (Tupoksi) organisasi, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan eksternal, menilai lingkungan internal, mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu, serta menciptakan visi organisasi yang</p>	<p>Berdasarkan hasil empiris penelitian yang dilakukan oleh peulis dapat diketahui bahwa Dinas ESDM tidak mempunyai hak dalam menentukan strategi secara teknis karena mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan dikuasai oleh pusat, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya yakni meliputi air, minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Strategi yang dilakukan hanya sebatas pemberdayaan masyarakat. Dari hasil empiris dilapangan juga telah diketahui bahwa Dinas Pertanian sudah menerapkan 8 langkah dalam menyusun perencanaan</p>

		<p>pompanisasi berbasis listrik; Optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik; Gerakan taman dengan menggunakan metode jajar legowo yaitu metode dengan jarak taman yang bervariasi (diikuti dengan pemupukan berimbang yakni pupuk urea 200 kg/ha, ponska 300 kg/ha, organik 500 kg/ha); Penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam/ <i>transplanter</i> dan alat panen yaitu <i>powerthresher</i> dan <i>combain harvester</i>; Perbaikan intensifikasi pertanian; Mengupayakan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan; Peningkatan pengetahuan SDM mulai dari petani, penyuluh, maupun insan pertanian secara umum sesuai dengan teknologi yang berkembang; serta Membangun fasilitas teknologi informasi dalam upaya pengontrol, pemantau, dan mengevaluasi program-program dan kebijakan bidang pertanian</p>	<p>efektif bagi masa depan. Menuurt Tjokroamidjojo (1993:13) strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang tepat guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. Kriteria perencanaan yang baik dan lengkap menurut Syamsi (1994:81-82) mencakup : Apa (<i>what</i>), yakni apa yang dilakukan sehingga perlu direncanakan. Yang kedua mengapa (<i>why</i>), yaitu alasan memilih dan melakukan kegiatan tersebut dan mengapa perlu diprioritaskan pelaksanaannya.. Kemudian siapa (obyek) dan siapa (subyek) (<i>who and who</i>), menentukan obyek atau sasaran dan menentukan subyek pelaksanaannya yaitu orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu di mana (<i>where</i>), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek). Kemudian kapan (<i>when</i>), yaitu pemilihan waktu/ timing pelaksanaan yang tepat. Serta bagaimana (<i>how</i>), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang dibutuhkan</p>	<p>strategis serta sudah menjawab kriteria perencanaan yang baik dan lengkap.</p>
--	--	--	---	---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, arsip/ dokumen dinas-dinas terkait, maupun observasi atau pengamatan langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dari fokus penelitian ini, yang kemudian sebelumnya telah disajikan dan diinterpretasikan oleh peneliti tentang identifikasi sektor unggulan dan strategi pengembangan sektor paling unggul yang dilakukan oleh masing-masing Dinas terkait, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa:

1. Potensi yang ada di Kabupaten Bojonegoro jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup potensi pada sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan/ konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan potensi yang menjadi unggulan (basis) di Kabupaten Bojonegoro adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, bangunan, serta jasa-jasa, namun pemilihan sektor unggulan hanya didasarkan pada hasil angka LQ paling tinggi yaitu sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara, perhitungan dengan indeks gravitasi dan model interaksi ruang maka interaksi kota-desa yang paling erat adalah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban. Dengan demikian aglomerasi ekonomi pusat-desa

tersebut diharapkan dapat merembet ke daerah-daerah lain di wilayah Bojonegoro. Sedangkan sektor-sektor yang perlu dikembangkan di pusat-desa tersebut adalah pada sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian.

2. Dalam mengembangkan sektor-sektor yang menjadi unggulan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu membuat strategi perencanaan pengembangan pada kedua sektor yang menjadi unggulan paling tinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian. Untuk sektor pertambangan dan penggalian khususnya pada pertambangan migas pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro tidak diberikan tanggung jawab dalam melakukan strategi pengembangan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada pengawasan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten karena tidak ada kewenangan untuk mengelola migas. Mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan, bahkan pengawasan dilakukan oleh pusat dan SKK migas. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro hanya sebatas rekon lifting, penerima laporan dana bagi hasil saja. Namun pemerintah tidak tinggal diam, untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak menjadi penonton maka Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan perda konten lokal Nomor 23 Tahun 2011 yakni didalamnya mengandung isi yang intinya adalah untuk melindungi dan memberdayakan potensi lokal baik ketenagakerjaan maupun pelaku usaha lokal. Sedangkan

untuk sektor pertanian, yang mana dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro maka strategi pengembangan pertanian khususnya untuk komoditas padi adalah melalui pengembangan padi hibrida; pendampingan petani melalui sekolah lapang (sekolah yang dilaksanakan di kelompok tani langsung di sawah, jadi maksudnya ini adalah di praktekkan secara langsung, kemudian mengadakan pengamatan yang didampingi oleh petugas PPL dan POPT), optimalisasi kemanfaatan air bendungan solo melalui pompanisasi berbasis listrik; optimalisasi penggunaan lahan melalui gerakan penggunaan pupuk organik; gerakan taman dengan menggunakan metode jarak legowo atau jarak tanam yang bervariasi diikuti dengan pemupukan berimbang yakni dengan pemakaian pupuk urea 200 kg/Ha, ponska 300 kg/Ha, organik 500 kg/Ha.; penerapan mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat tanam atau transplanter dan alat panen yaitu *powerthresher* dan *combine harvester*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya tentang identifikasi sektor unggulan, maka peneliti mencoba memberikan masukan atau saran yang mungkin dapat berguna dalam mensukseskan identifikasi sektor unggulan tersebut, yaitu :

1. Diperlukan adanya aglomerasi secara konsekwen antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban yang menitikberatkan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian serta sebaiknya

pemerintah daerah juga lebih memperhatikan lagi sektor-sektor yang tidak menjadi unggulan agar nantinya bisa menyusul menjadi unggulan.

2. Saran bagi pemerintah daerah terkait sektor paling unggul/ unggulan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a) Meskipun pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro tidak ada kewenangan untuk mengelola migas sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap mengoptimalkan secara efektif adanya perda konten lokal Nomor 23 Tahun 2011, apabila ada pihak K3S yang melanggar aturan dari perda tersebut sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro secara tegas harus memberikan sanksi dan tetap melakukan pengawasan/ razia pada sejumlah pegawai *unskill* migas.
- b) Dalam mengoptimalkan pengelolaan migas yang ada di daerah, pemerintah pusat juga harus mengikutsertakan pemerintah daerah dalam mengkaji strategi-strategi secara teknis dan ikut serta dalam pegangan/ pengawasan produksi sehingga satu sama lain tidak saling dirugikan serta dalam penentuan strategi pengelolaan migas di Kabupaten Bojonegoro perlu adanya keikutsertakan antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro beserta masyarakat setempat karena merekalah yang mengetahui seluk beluk daerah tersebut dan juga agar meminimalisir permasalahan yang ada di daerah. Oleh sebab itu adanya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terutama pada bagian kedua kedua pasal 41 ayat 2 perlu untuk direvisi. Bagian Kedua Tentang Pengawasan Pasal 41 ayat 2 menjelaskan bahwa “Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”, sementara pada pasal 45 ayat 1 berbunyi “Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara”. Seharusnya di dalam undang-undang tersebut keikutsertakan pemerintah daerah dilibatkan.

- c) Sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian tetap mengadakan dan menambah waktu pelatihan secara kontinyu mengenai misalnya pentingnya menggunakan bibit/benih unggul khususnya untuk komoditas padi ataupun cara pengusiran hama penyakit wereng serta pemberian pelatihan sekolah lapang yang berguna untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan petani dalam upaya mengendalikan hama dan penyakit di lahan sawah sebaiknya dilakukan ditiap masing-masing desa.
- d) Sebaiknya pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro beserta masyarakat petani tetap terus meningkatkan produktivitas pertanian khususnya pada komoditas padi dengan ditunjang adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti pembangunan irigasi bagi lahan yang jauh dari sungai bengawan solo serta penambahan pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*: Edisi Keempat. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

_____. 2010. *Ekonomi Pembangunan*: Edisi Kelima, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013*. Bojonegoro

Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur (BAPPEPROP). 2013. *Produk Domestik Regional Bruto*. Surabaya. Jawa Timur

_____. 2013. *Buku Profil Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro 2013*. Bojonegoro

Badan Perencanaan Pembangunan & Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013*. Jawa Timur

Biro Pusat Statistik (BPS). 35220.1303. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Menurut Lapangan Usaha 2008-2012*. Kabupaten Bojonegoro

_____. *Mojokerto Dalam Angka 2013*. Kabupaten Mojokerto.

Biro Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Bojonegoro Dalam Angka 2013*. BPS-BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro

Budiharsono. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Bungin, Burhan.. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Bryson, John. [Penerjemah Miftahuddin]. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. *Rencana Strategi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013-2018*. Kabupaten Bojonegoro

- Dinas Pertanian. 2009. *Rencana Strategi Dinas Pertanian Tahun 2009-2013*. Kabupaten Bojonegoro
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Humanika
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, Dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Rohidi, Tjejep Rohendi, Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Riyadi dan Bratakusumah. Dedy Supriady. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Soekartiwi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Edisi 1 Cetakan 1*. Jakarta: Rajawali
- Siagian, Sondang. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- _____. 1982. *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita: Cetakan Kedua*. Bandung: Penerbit Alumni/1982
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukmadinata, Syaodih Nana. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Sukirno, Sadorno. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaannya)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bima Grafika
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press
- _____. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan: Cetakan Satu*. Malang: penerbit universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*: Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*: Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- _____. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- _____. 1982. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta. PT. Gunung Agung
- Todaro, P Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*: Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga
- _____, Smith C Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi*: Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga

Skripsi:

- Danantyo, Yanuar. 2012. *Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah* (Studi Pada Bappeda Kab. Jombang). [Skripsi]. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang
- Ghufron, Muhammad. 2008. *Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor diunduh dari <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/2356/A08mgh.pdf;jsessionid=8EA686337E781346F90ACA2D15B49323?sequence=4>> diakses pada tanggal [29 September 2013 pukul 15.31 WIB].
- Usya, Nurlatifa. 2006. *Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang* [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Internet:

- Basuki, Agus & Gayatri, Utari. (2009). *Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: (Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. [internet], Volume 10 (Nomor 1, April), 42. Diunduh dari: <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=9939&val=641>> diakses pada tanggal [04 Juni 2013 pukul 23.15 WIB].

Biro Pusat Statistik (BPS). *Tuban Dalam Angka 2013*. Kabupaten Tuban. Diakses melalui tubankab.bps.go.id pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 20.37 WIB

_____. *Lamongan Dalam Angka 2013*. Kabupaten Lamongan. Diakses melalui lamongankab.bps.go.id pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 20.37 WIB

_____. *Jombang Dalam Angka 2013*. Kabupaten Jombang. Diakses melalui jombangkab.bps.go.id pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 20.37 WIB

_____. *JawaTimur Dalam Angka 2013*. Jawa Timur. Diakses melalui jatim.bps.go.id pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 20.37 WIB

Ebtian, Rico. 2011. Analisis Sektor Dan Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan Melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30370/4/Chapter%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2014 Pukul 22.00 WIB

Fernanda, Desi. 2010. *Paradigma-Paradigma Pembangunan: Program DIKLATPIM Melalui* http://diklatpimlan.files.wordpress.com/2010/04/paradigma-pembangunan_desi-fernanda.pdf Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2014 Pukul 10.00 WIB

Sabana, Choliq. 2007. Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah. [Tesis]. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang melalui eprints.undip.ac.id/16896/ Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2014 pukul 20.00 WIB

Solihin, Dadang Melalui <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan-pembangunan-daerah-konsep-strategi-tahapan-dan-proses> Diakses Pada Tanggal 14 November 2013 Pukul 22.00 WIB

_____. Melalui <http://www.slideshare.net/DadangSolihin> Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2014 pukul 23.00 WIB

_____. Melalui <http://hayda.wordpress.com/2009/11/27/3/> Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2014 Pukul 23.00 WIB

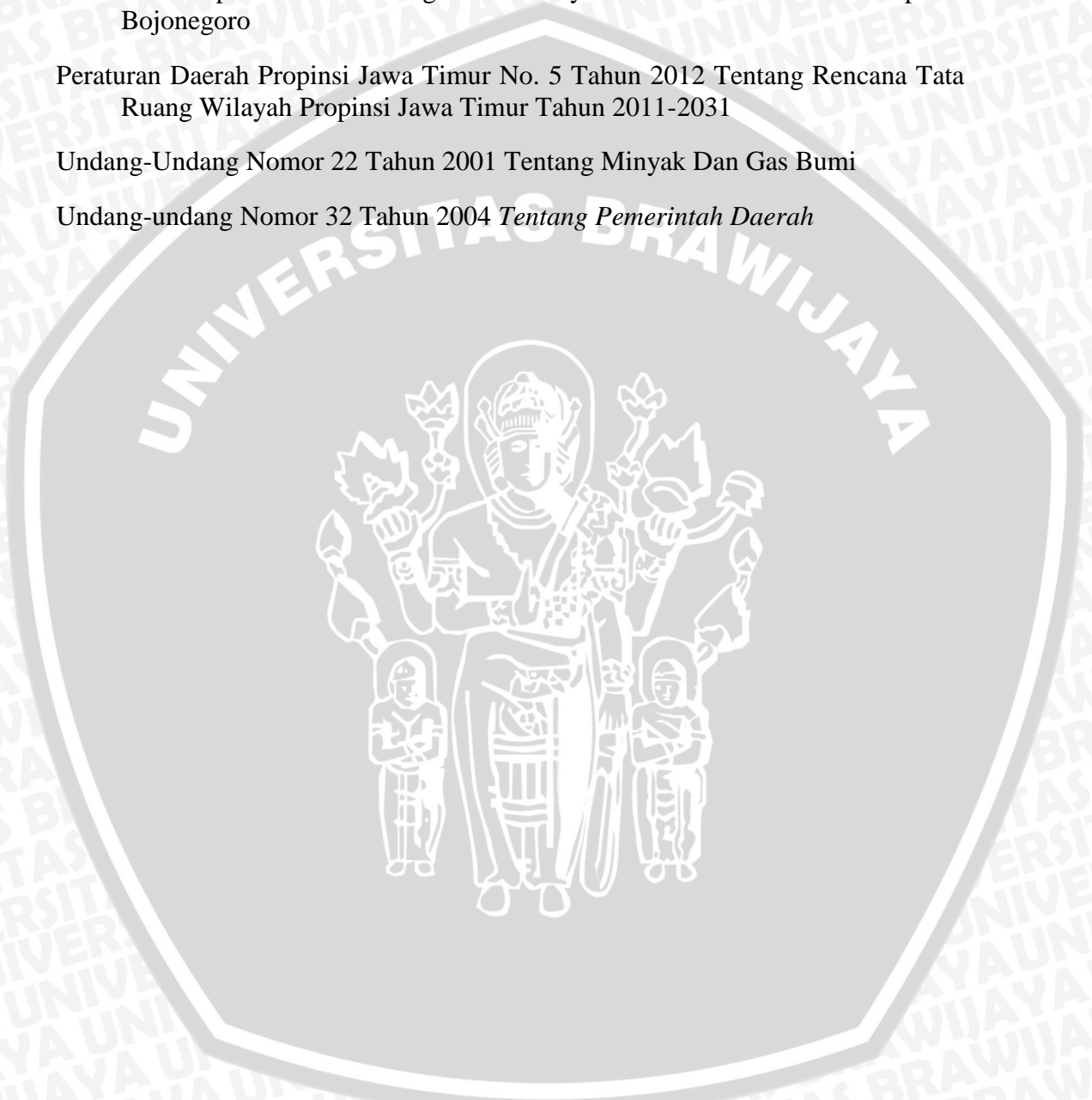
Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

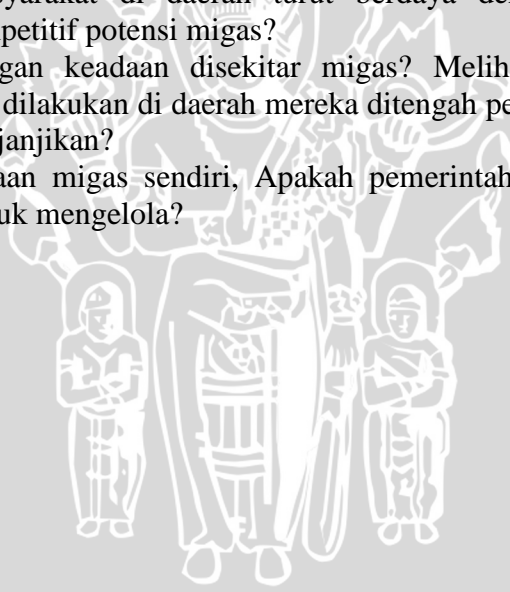


LAMPIRAN



1. PEDOMAN WAWANCARA dengan DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) KABUPATEN BOJONEGORO

- 1) Bagaimana profil, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Bagaimana gambaran kondisi pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Bojonegoro saat ini?
- 3) Bagaimanakah potensi pertambangan dan penggalian sehingga patut untuk dikembangkan? dan bisa menjadi unggulan.
- 4) Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan sektor pertambangan dan penggalian?
- 5) Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengembangan pada sektor pertambangan dan penggalian yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro?
- 6) Bagaimana mengarahkan pendayagunaan potensi migas yang ada di bawah nantinya juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah?
- 7) Bagaimana masyarakat di daerah turut berdaya dengan kepemilikan keunggulan kompetitif potensi migas?
- 8) Bagaimana dengan keadaan disekitar migas? Melihat eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di daerah mereka ditengah pemanfaatan potensi migas yang menjanjikan?
- 9) Untuk pengelolaan migas sendiri, Apakah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola?



2. PEDOMAN WAWANCARA dengan DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO

- 1) Bagaimana profil, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro?
- 2) Bagaimana gambaran kondisi pertanian yang ada di Kabupaten Bojonegoro saat ini?
- 3) Bagaimanakah potensi pertanian di Kabupaten Bojonegoro sehingga patut untuk dikembangkan dan menjadi unggulan?
- 4) Di dalam sektor pertanian terdapat 5 subsektor, saya melihat yang paling berkontribusi adalah subsektor tabama. Di dalam subsektor tabama ini komoditas apa yang menjadi unggulan sehingga memiliki kontribusi tinggi dalam memajukan sektor ekonomi?
- 5) Bagaimana tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam mengembangkan pertanian di kabupaten Bojonegoro?
- 6) Untuk komoditas padi, bagaimana upaya strategi Dinas Pertanian dalam mengembangkan komoditas ini sehingga produksi yang diperoleh bisa cukup tinggi dan menjadi salah satu tabama penyumbang tertinggi?
- 7) Bagaimanakah langkah atau strategi yang dibuat/dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selama ini dalam mengembangkan sektor pertanian? Kiat-kiat seperti apa saja yang dilakuan selama ini?
- 8) Apa yang menjadi kendala dalam melakukan strategi pengembangan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? (faktor-faktor pendukung dan penghambat)
- 9) Seperti yang diketahui, pertanian di Kabupaten Bojonegoro ini telah menjadi sektor unggulan. Apakah pertanian di Kabupaten Bojonegoro ini juga melakukan ekspor ke luar daerah? Komoditas apa saja yang sudah di ekspor?
- 10) Bagaimana perencanaan pelaksanaan strategi pengembangan pertanian apabila ditinjau dari:
 - (a) Apa, materi kegiatan apa yang dilaksanakan?
 - (b) Mengapa, alasan memilih dan menetapkan kegiatan tersebut?
 - (c) Bagaimana, cara teknis dalam pelaksanaan yang dibutuhkan dengan dana yang tersedia?
 - (d) Kapan, pemilihan waktu yang tepat untuk melaksanakannya?
 - (e) Siapa, orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut?
- 11) Apa ada sosialisasi yang diberikan selama mengembangkan pertanian?

3. DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Halaman Depan Kantor Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan Bapak Dadang Aris Subiantoro, ST (Kasi Bidang Migas Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro)



Wawancara dengan Bapak Drs. Fajar Yudhy Hartanto (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro)



Halaman Depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro



Wawancara dengan Bapak Rohmat Harianto, SP, MM (Ketua Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro)



Wawancara dengan Bapak Bambang Sutopo, SP, MAP (Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro)



Wawancara dengan Ibu Endang Sumarningsih, SP (Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan Dinas Perhubungan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro)



Halaman Depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro

4. HASIL ANALISIS RATA-RATA LQ KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN DAERAH DI SEKITAR SERTA HASIL ANALISIS INDEKS GRAVITASI

Hasil Nilai Rata-rata LQ Kabupaten Bojonegoro dengan Daerah di sekitarnya

No	Sektor	Rata-rata LQ Kabupaten Tahun 2012				
		Bojonegoro	Tuban	Lamongan	Jombang	Mojokerto
1	Perdagangan	1,78	1,97	2,44	1,97	1,56
2	Pertambangan dan pertambangan	13,57	8,75	0,07	0,71	0,66
3	Industri pengolahan	0,30	0,91	0,22	0,43	1,46
4	Listrik, gas, dan air bersih	0,48	2,34	0,83	0,77	0,68
5	Keuangan	1,08	0,16	0,83	0,57	0,46
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	0,52	0,56	0,87	1,13	0,79
7	Pengangkutan dan komunikasi	0,48	0,26	0,23	0,61	0,47
8	Kesehatan, perumahan, dan jasa perumahan	0,88	0,93	0,71	0,80	0,36
9	Jasa-jasa	1,04	0,54	1,03	1,34	0,84
Total		26,13	16,34	8,23	8,33	7,22

Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis
Keterangan: Kolesa Warna Kuning = Sektor Unggulan

Indeks Gravitasi dan Model Interaksi Ruang Daerah di sekitar Bojonegoro Tahun 2012

No	Kabupaten	Jarak Dari Kabupaten Bojonegoro (km)	Nilai Indeks Gravitasi Tahun 2012
1	Tuban	65	29.497.285,826.186.877,09
2	Lamongan	63	21.827.634.747,051.164,05
3	Jombang	85	13.311.678.734.546.480,70
4	Mojokerto	115	8.557.979,957.590.602,57

Sumber: Data Sekunder Olahan Penulis

5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Produk Domestik Regional Bruto Kab. Bojonegoro
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2008-2012 (juta rupiah)

Sektor/Sub Sektor (1)	2008 [*] (2)	2009 [*] (3)	2010 ^{**} (4)	2011 ^{**} (5)	2012 ^{**} (6)
1 PERTANIAN	1.901.812,55	2.034.637,33	2.148.859,11	2.214.298,26	2.314.455,45
a. Tanaman Bahan Makanan	1.339.061,03	1.420.050,28	1.521.734,79	1.536.014,74	1.605.596,21
b. Tanaman Perkebunan	141.074,28	147.831,74	126.661,50	140.479,13	146.463,54
c. Peternakan	259.957,29	296.642,03	338.800,30	375.386,88	396.558,70
d. Kehutanan	142.000,26	148.193,44	133.550,33	128.836,82	128.025,15
e. Perikanan	19.719,69	21.919,84	28.112,19	33.580,69	37.811,86
2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.450.962,91	1.808.356,61	2.317.251,59	2.678.531,78	2.721.579,17
a. Pertambangan Migas	1.357.562,44	1.709.259,26	2.211.238,83	2.567.615,80	2.605.616,51
b. Pertambangan Non Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	93.400,47	99.097,35	106.012,76	110.915,98	115.962,66
3 INDUSTRI PENGOLAHAN	503.423,15	531.374,94	587.330,15	648.995,33	705.912,22
a. <i>Industri Migas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. <i>Industri Tanpa Migas</i>	503.423,15	531.374,94	587.330,15	648.995,33	705.912,22
1. Makanan, Minuman & Tembakau	282.230,26	302.639,44	349.034,07	391.076,26	432.217,47
2. Tekstil, Barang dari Kulit & Alas Kaki	3.343,52	3.434,17	3.816,86	4.211,81	4.541,59
3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	80.541,83	82.095,91	75.851,56	80.788,65	84.254,48
4. Kertas & Barang Celakan	37.470,74	38.941,77	43.222,03	46.378,23	50.617,20
5. Pupuk Kimia & Barang dari Karet	11.298,49	11.509,07	12.853,83	13.634,46	13.909,88
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	48.345,42	50.433,94	56.223,86	62.027,75	66.227,03
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	1.226,05	1.245,69	1.257,30	1.287,73	1.319,71
9. Barang Lainnya	38.966,84	41.074,95	45.270,63	49.590,44	52.824,86
4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	48.077,66	50.889,69	53.293,12	56.877,85	60.341,71
a. Listrik	45.243,38	48.011,82	50.272,69	53.736,07	57.024,72
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	2.834,28	2.877,87	3.020,43	3.141,78	3.316,99
5 BANGUNAN	225.623,44	244.348,91	270.640,85	301.388,11	329.658,31
6 PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1.156.631,43	1.218.195,57	1.311.245,13	1.443.595,56	1.605.566,98
a. Perdagangan	1.068.753,31	1.129.737,42	1.217.877,76	1.341.502,39	1.494.688,96
b. Hotel	8.080,96	8.351,57	8.905,97	11.534,99	12.634,28
c. Restoran	79.797,16	80.106,58	84.461,41	90.558,18	98.243,74
7 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	270.288,70	289.103,14	301.163,31	320.666,17	349.461,99
a. <i>Pengangkutan</i>	218.806,51	231.668,17	238.764,52	251.600,40	272.367,26
1. Angkutan Rel	28.369,45	29.046,79	29.587,35	33.929,33	33.887,72
2. Angkutan Jalan Raya	177.050,69	189.062,10	195.093,18	202.769,55	222.656,44
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angkutan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	13.386,37	13.559,28	14.083,99	14.901,52	15.873,10
b. <i>Komunikasi</i>	51.482,19	57.434,97	62.398,78	69.065,77	77.094,73
1. Pos & Telekomunikasi	45.128,96	50.912,34	55.816,89	62.270,98	69.967,67
2. Jasa Penunjang Komunikasi	6.353,23	6.522,63	6.581,89	6.794,79	7.127,06
8 KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	346.728,06	363.411,81	383.081,28	418.056,19	455.597,64
a. Bank	70.126,45	74.902,04	78.957,56	86.339,69	95.465,79
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	67.886,87	73.190,23	79.168,30	88.318,87	97.911,22
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	179.417,00	185.689,75	194.517,05	210.564,65	227.072,92
e. Jasa Perusahaan	29.297,74	29.629,79	30.438,37	32.832,98	35.147,71
9 JASA-JASA	697.243,64	727.207,08	755.368,53	792.696,14	837.007,85
a. <i>Pemerintahan Umum</i>	427.645,39	440.383,28	454.717,51	470.564,24	491.799,68
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Jasa Pemerintah Lainnya	269.598,25	286.823,80	300.651,02	322.131,90	345.208,17
b. <i>Swasta</i>	77.493,74	80.720,12	83.646,87	87.778,80	93.633,65
1. Jasa Sosial Masyarakat	23.763,35	25.019,09	26.302,57	28.299,13	29.881,05
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan	168.341,17	181.084,80	190.701,58	206.053,97	221.693,47
3. Jasa Perorangan Dan RT					
PDRB DENGAN MIGAS	6.600.791,54	7.267.525,09	8.128.233,06	8.975.105,39	9.379.581,33
PDRB TANPA MIGAS	5.243.229,10	5.559.265,83	5.916.994,23	6.307.489,59	6.773.964,81

Sumber: Bappeda dan BPS Kab. Bojonegoro, 2013

Produk Domestik Regional Bruto Kab. Tuban
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2008-2012 (juta rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011 ¹⁾	2012 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PERTANIAN	2.291.313,27	2.329.967,66	2.386.472,69	2.469.313,29	2.673.361,11
a.	Tanaman Bahan Makanan	1.712.020,90	1.747.548,54	1.791.452,33	1.841.024,02	1.922.949,59
b.	Tanaman Perkebunan	119.942,91	122.325,81	126.023,78	129.439,32	133.568,43
c.	Peternakan	259.636,08	266.058,65	279.394,43	300.383,51	311.467,98
d.	Kehutanan	42.885,23	43.509,55	47.005,31	48.707,06	49.910,13
e.	Perikanan	146.828,14	149.524,70	142.598,24	149.759,37	155.405,30
II.	PERTAMBANGAN & PENGOALIAN	1.293.328,77	1.389.894,91	1.662.893,90	1.749.919,63	1.863.967,37
a.	Minyak dan Gas Bumi	639.727,14	689.754,44	729.967,12	753.545,06	617.379,47
b.	Pertambangan Bukan Migas	-	-	-	-	-
c.	Pengalihan	613.598,63	699.939,96	932.726,78	997.374,47	1.186.527,90
III.	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.746.648,99	1.860.648,66	1.939.672,26	2.042.198,89	2.177.779,71
a.	Industri Migas	-	-	-	-	-
1.	Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2.	Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b.	Industri Bukan Migas	1.746.648,99	1.860.648,66	1.939.672,26	2.042.198,89	2.177.779,71
1.	Makanan Minuman Dan Tembakau	129.857,54	137.249,06	145.503,40	156.505,51	170.866,68
2.	Tekstil, Brg dr Kulit & Ales Kaki	6.648,75	7.069,05	7.431,84	7.932,17	8.640,68
3.	Brg dr Kayu & Hasil Hutan lainnya	2.581,46	2.750,15	2.719,22	2.861,29	3.053,69
4.	Kertas dan Barang Cetakan	101.308,25	108.230,22	114.737,43	122.668,52	133.354,47
5.	Pupuk, Kimia & Brg dr Karet	38.385,07	38.684,89	40.150,69	41.752,33	43.477,95
6.	Semen & Brg Galian Bukan Logam	1.468.723,93	1.564.520,71	1.626.908,02	1.708.161,88	1.815.967,64
7.	Logam Dasar Besi & Baja	242,27	255,21	265,14	275,58	284,13
8.	Alat Angk. Mesin & Peralatannya	1.024,87	1.055,24	1.082,33	1.114,45	1.150,62
9.	Barang Lainnya	786,84	834,13	876,17	927,16	983,84
IV.	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	219.441,90	227.189,00	249.719,03	276.388,26	299.867,26
a.	Listrik	207.661,83	224.238,51	246.609,89	272.004,94	296.217,36
b.	Gas Kota	-	-	-	-	-
c.	Air Bersih	2.780,08	2.950,49	3.149,14	3.381,32	3.649,89
V.	KONSTRUKSI	34.106,16	36.961,78	38.913,04	44.997,78	61.813,76
VI.	PERDAG. HOTEL & RESTORAN	1.124.803,86	1.202.417,81	1.306.949,74	1.436.763,09	1.683.764,60
a.	Perdagangan	1.101.771,27	1.178.322,93	1.280.292,08	1.408.057,23	1.553.762,70
b.	Hotel	9.954,44	10.602,72	11.183,22	11.830,93	12.664,75
c.	Restoran	12.677,85	13.491,96	14.574,44	15.874,93	17.327,16
VII.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	144.178,13	163.186,63	166.006,30	179.667,43	197.667,26
a.	Pengangkutan	73.763,23	78.319,10	83.305,63	89.720,34	97.953,74
1.	Angkutan Jalan Rel	-	-	-	-	-
2.	Angkutan Jalan Raya	61.654,23	65.432,10	69.465,42	74.797,87	81.640,28
3.	Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4.	Angk. Sungai, Danau & Persebr.	-	-	-	-	-
5.	Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6.	Jasa Penunjang Angkutan	12.108,99	12.887,00	13.840,21	14.922,47	16.313,46
b.	Komunikasi	70.414,90	74.867,53	81.699,67	89.937,10	99.613,50
1.	Pos & Telekomunikasi	-	-	-	-	-
2.	Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-
VIII.	KEU, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	366.489,32	389.086,36	418.416,41	466.368,83	497.738,86
a.	Bank	31.637,39	33.379,12	35.272,89	38.196,92	42.392,98
b.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	94.631,10	100.242,54	109.496,86	120.011,84	131.978,94
c.	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d.	Real Estat	110.664,24	118.290,71	127.883,09	141.408,00	154.310,77
e.	Jasa Perusahaan	129.556,60	137.185,99	145.763,56	155.752,08	169.056,19
IX.	JASA-JASA	382.618,09	386.678,96	401.934,30	424.807,46	461.203,83
a.	Pelayanan Umum	189.607,20	201.259,04	203.178,18	209.740,84	217.700,92
1.	Adm. Pemerintahan dan Pertahanan	189.607,20	201.259,04	203.178,18	209.740,84	217.700,92
2.	Jasa Pemerintahan Lainnya	-	-	-	-	-
b.	Sarasta	172.908,90	184.417,91	198.756,12	214.866,63	233.502,61
1.	Jasa Sosial Kemasyarakatan	41.071,46	43.585,62	46.295,13	49.575,86	53.217,99
2.	Jasa Hiburan dan Rekreasi	15.701,93	16.660,34	18.087,24	19.658,60	21.491,68
3.	Jasa Perorangan & Rumah Tangga	116.135,52	124.171,95	134.373,75	145.632,17	158.792,94
	PDRB	7.622.332,19	7.872.839,84	8.486.916,06	9.068.212,67	9.826.933,44
	PDRB TANPA MROAS	6.862.866,06	7.263.876,00	7.736.946,94	8.314.867,81	8.919.663,87

Sumber: Kab. Tuban Dalam Angka 2013

Produk Domestik Regional Bruto Kab. Lamongan
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2008-2012 (juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1. PERTANIAN	2.859.095,91	2.996.968,48	3.135.747,71	3.209.766,22	3.382.337,18
a. Tanaman Bahan Makanan	1.799.795,04	1.852.165,53	1.899.536,28	1.838.367,97	1.947.493,49
b. Tanaman Perkebunan	70.105,85	74.665,04	76.296,36	82.569,45	84.463,17
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	85.865,96	89.286,30	96.333,72	104.577,42	109.088,48
d. Kehutanan	4.325,75	1.859,94	1.224,57	1.227,73	1.229,44
e. Perikanan	899.003,31	978.991,67	1.062.356,78	1.183.023,66	1.240.062,60
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	8.768,46	8.847,94	8.978,56	9.942,18	10.644,38
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	8.768,46	8.847,94	8.978,56	9.942,18	10.644,38
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	281.373,65	301.444,97	324.437,74	363.511,48	387.507,69
a. Industri Migas					
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	281.373,65	301.444,97	324.437,74	363.511,48	387.507,69
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	135.125,83	150.367,85	165.957,87	190.538,89	205.491,92
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	48.363,62	50.572,23	53.301,69	58.866,01	62.200,15
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	59.312,57	60.364,02	62.939,74	69.199,64	72.447,96
4. Kertas dan Barang Cetakan	3.697,42	3.918,07	4.291,16	4.695,09	4.880,88
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	9.400,65	9.648,15	10.680,31	10.851,74	11.422,69
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	11.707,42	12.370,19	12.844,12	14.112,56	14.942,86
7. Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	-	-	-	-	-
9. Barang lainnya	13.766,14	14.204,45	14.422,84	15.247,55	16.121,22
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	61.841,15	65.806,97	69.623,70	75.199,72	78.205,69
a. Listrik	59.697,47	63.567,47	67.260,35	72.856,40	75.749,59
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	2.143,68	2.239,51	2.363,35	2.343,32	2.456,11
5. BANGUNAN	148.906,84	153.787,13	159.169,68	173.652,84	191.212,95
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1.345.567,31	1.472.494,76	1.617.554,02	1.826.266,21	2.012.724,35
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.204.139,71	1.325.511,86	1.466.817,01	1.659.839,83	1.834.537,56
b. Hotel	1.263,50	1.385,46	1.692,67	1.854,13	1.927,68
c. Restoran	140.164,10	145.597,45	149.044,34	164.572,25	176.259,10
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	95.442,76	102.842,72	109.866,66	117.726,62	124.738,94
a. Pengangkutan	57.096,30	61.823,58	65.756,21	70.171,31	74.075,95
1. Angkutan Rel	1.856,83	2.067,98	2.282,46	2.426,91	2.530,49
2. Angkutan Jalan Raya	45.968,20	47.714,01	50.000,03	52.648,02	55.824,89
3. Angkutan Laut	368,88	397,07	416,08	433,86	452,25
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	8.902,38	11.644,51	13.057,64	14.662,52	15.268,32
b. Komunikasi	38.346,46	41.019,14	44.110,45	47.555,31	50.662,99
1. Pos dan Telekomunikasi	31.959,58	34.187,17	36.665,74	39.321,86	41.916,58
2. Jasa Penunjang Komunikasi	6.386,88	6.831,97	7.444,71	8.233,45	8.746,41
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERSH.	187.361,87	207.471,87	232.843,30	261.531,05	279.848,73
a. Bank	31.637,07	35.100,16	39.724,95	45.396,53	48.188,29
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	32.514,73	35.868,06	40.405,23	45.555,41	49.366,54
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
d. Sewa Bangunan	119.477,51	132.563,75	148.314,66	165.743,92	177.088,10
e. Jasa Perusahaan	3.732,56	3.939,90	4.398,46	4.835,20	5.205,80
9. JASA-JASA	459.787,76	482.430,25	532.845,12	588.226,72	630.948,83
a. Pemerintahan Umum	231.568,61	243.512,18	263.642,29	285.216,69	303.824,41
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	231.568,61	243.512,18	263.642,29	285.216,69	303.824,41
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	228.219,15	238.918,07	269.202,83	303.010,03	327.124,43
1. Sosial Kemasyarakatan	94.501,81	100.840,08	123.339,82	142.194,80	154.479,14
2. Hiburan & Rekreasi	11.891,90	14.043,30	17.062,21	16.889,41	17.829,45
3. Perorangan & Rumah tangga	121.825,43	124.034,70	128.800,79	143.925,81	154.815,83
PDRB DENGAN MIGAS	5.448.145,70	5.792.095,10	6.191.066,48	6.625.823,03	7.098.168,75

Sumber: Kab. Lamongan Dalam Angka 2013

Produk Domestik Regional Bruto Kab. Jombang
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
2011-2012 (juta rupiah)

Sektor / Sub Sektor	2011*)	2012**)
(1)	(2)	(3)
1. PERTANIAN	1.908.193,25	1.965.898,20
a. Tanaman Bahan Makanan	1.186.520,74	1.208.160,82
b. Tanaman Perkebunan	449.981,56	474.069,64
c. Peternakan	222.016,30	232.494,14
d. Kehutanan	31.836,48	33.091,25
e. Perikanan	17.838,17	18.082,35
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	105.689,59	109.250,20
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00
b. Pertambangan Tanpa Migas	91.460,16	94.629,07
c. Penggalian	14.229,43	14.621,13
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	734.097,16	780.291,65
a. Industri Migas	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	734.097,16	780.291,65
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	383.067,17	411.788,62
2. Tekstil, Barang kulit & Alas kaki	58.902,84	61.180,76
3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	147.274,39	152.609,37
4. Kertas & Barang Cetak	50.152,82	53.744,79
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	32.689,90	34.572,42
6. Semen & Barang Galian Bukan Logam	12.068,12	12.820,53
7. Logam Dasar Besi & Baja	2.005,63	2.054,29
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1.207,98	1.228,08
9. Barang Lainnya	46.728,31	50.292,79
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	69.609,14	73.828,91
a. Listrik	68.175,38	72.338,28
b. Gas	0,00	0,00
c. Air Bersih	1.433,76	1.490,63
5. BANGUNAN	125.447,03	133.959,11
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	2.418.535,27	2.667.715,78
a. Perdagangan	2.222.306,15	2.455.213,44
b. Hotel	5.182,78	5.568,18
c. Restoran	191.046,34	206.934,16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	312.380,00	341.637,35
a. Pengangkutan	127.466,65	131.002,83
1. Angkutan Rel	6.571,65	6.915,81
2. Angkutan Jalan Raya	118.801,86	121.872,02
3. Angkutan Laut	0,00	0,00
4. Angkutan Penyeberangan	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	2.093,14	2.215,01
b. Komunikasi	184.913,35	210.634,52
1. Pos Dan Telekomunikasi	181.398,22	206.885,22
2. Jasa Penunjang Komunikasi	3.515,13	3.749,30
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	290.542,58	321.625,66
a. Bank	112.693,78	127.196,59
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	50.943,91	56.704,64
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	117.022,57	127.350,36
e. Jasa Perusahaan	9.882,32	10.374,07
9. JASA-JASA	795.001,39	836.097,50
a. Pemerintahan Umum	387.264,29	406.925,43
1. Adm. Pemerintah dan Pertahanan	387.264,29	406.925,43
2. Jasa Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
b. Swasta	407.737,10	429.172,07
1. Sosial Kemasyarakatan	254.143,11	263.761,80
2. Hiburan Dan Rekreasi	10.364,25	11.278,09
3. Perorangan Dan Rumah Tangga	143.229,74	154.132,18
PDRB DENGAN MIGAS	6.759.495,41	7.230.304,36
PDRB TANPA MIGAS	6.759.495,41	7.230.304,36

Sumber: Kab Jombang Dalam Angka 2013

Produk Domestik Regional Bruto Kab. Mojokerto
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2012 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2009	2010	2011*	2012**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERTANIAN	1.659.693,40	1.777.115,02	1.863.162,50	1.956.272,50
1.1	Tanaman Bahan Makanan	853.202,87	912.860,52	942.083,94	973.183,94
1.2	Tanaman Perkebunan	339.010,54	361.985,85	380.542,35	400.442,35
1.3	Peternakan dan Hasil-hasilnya	444.949,51	478.314,88	515.276,43	556.076,43
1.4	Kehutanan	16.005,52	16.826,82	17.441,51	17.971,51
1.5	Perikanan	6.524,96	7.126,94	7.818,26	8.598,26
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	105.301,21	113.451,52	121.074,18	127.934,18
2.1	Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
2.2	Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-	-
2.3	Penggalian	105.301,21	113.451,52	121.074,18	127.934,18
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	2.727.531,18	2.873.921,38	3.075.515,72	3.293.642,72
3.1	INDUSTRI MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
b.	Gas Alam Cair	-	-	-	-
3.2	INDUSTRI TANPA MIGAS	2.727.531,18	2.873.921,38	3.075.515,72	3.293.642,72
a.	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	1.235.720,59	1.304.455,46	1.398.625,77	1.500.625,77
b.	Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Barang Kulit dan Alas kaki	186.698,94	191.816,40	204.051,43	217.151,43
c.	Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	168.123,86	173.772,71	184.734,91	196.634,91
d.	Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan	736.804,03	773.333,19	826.704,69	883.904,69
e.	Industri Pupuk, Kimia, Barang Dari Karet dan Plastik	164.248,18	177.349,45	189.622,80	203.122,80
f.	Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam	97.606,99	105.304,72	113.410,77	122.310,77
g.	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	119.079,51	127.120,06	135.967,36	145.667,36
h.	Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	410,57	484,93	546,23	603,23
i.	Industri Barang Lainnya	18.838,49	20.284,45	21.851,75	23.621,75
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	68.924,00	72.882,66	77.151,63	81.997,63
4.1	Listrik	67.178,60	71.101,83	75.335,18	80.135,18
4.2	Gas	-	-	-	-
4.3	Air Bersih	1.745,40	1.780,83	1.816,45	1.862,45
5	BANGUNAN/KONSTRUKSI	101.157,75	109.272,86	122.912,15	137.312,15
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	1.837.996,06	1.986.024,37	2.151.045,08	2.332.325,08
6.1	Perdagangan Besar dan Eceran	1.805.888,77	1.950.901,64	2.111.639,88	2.287.639,88
6.2	Hotel	18.250,32	20.179,38	23.193,64	26.753,64
6.3	Restoran	13.856,96	14.943,35	16.211,56	17.931,56
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	241.980,16	264.967,03	294.486,49	331.367,49
7.1	PENGANGKUTAN	96.463,49	98.785,80	103.682,14	109.953,14
a.	Angkutan Rel	-	-	-	-
b.	Angkutan Jalan Raya	95.344,70	97.556,69	102.314,22	108.424,22
c.	Angkutan Laut	-	-	-	-
d.	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-
e.	Angkutan Udara	-	-	-	-
f.	Jasa Penunjang Angkutan	1.118,79	1.229,11	1.367,92	1.528,92
7.2	KOMUNIKASI	145.516,67	166.181,23	190.804,35	221.414,35
a.	Pos dan Telekomunikasi	143.001,84	163.336,70	187.572,59	217.672,59
b.	Jasa Penunjang Komunikasi	2.514,83	2.844,52	3.231,75	3.741,75
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	114.577,37	123.671,39	135.913,09	149.549,09
8.1	Bank	10.984,54	11.784,25	12.901,79	14.143,79
8.2	Lembaga Keuangan Tanpa Bank	13.775,15	14.813,79	16.238,52	17.808,52
8.3	Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
8.4	Sewa Bangunan	84.821,45	91.759,85	100.976,93	111.266,93
8.5	Jasa Perusahaan	4.996,23	5.313,49	5.795,84	6.329,84
9	JASA-JASA	543.316,28	580.984,96	616.892,06	657.344,06
9.1	PEMERINTAHAN UMUM	275.891,95	288.803,69	303.472,24	319.359,24
a.	Administrasi Pemerintah dan Pertahanan	275.891,95	288.803,69	303.472,24	319.359,24
b.	Jasa Pemerintah Lainnya	-	-	-	-
9.2	SWASTA	267.424,33	292.181,27	313.419,82	337.984,82
a.	Sosial Kemasyarakatan	92.962,09	97.322,01	103.228,73	109.742,73
b.	Hiburan dan Rekreasi	20.707,47	23.161,31	25.842,83	29.124,83
c.	Perorangan dan Rumah tangga	153.754,77	171.697,95	184.348,26	199.117,26
PDRB DENGAN MIGAS		7.400.477,40	7.902.291,18	8.458.152,89	9.067.744,89
PDRB TANPA MIGAS		7.400.477,40	7.902.291,18	8.458.152,89	9.067.744,89

Sumber: Kab. Mojokerto Dalam Angka 2013

PDRB JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 2011-2012
(JUTA RUPIAH)

No	Sektor/ Subsektor	2011	2012
I	Pertanian	52.628.433,20	54.463.942,77
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	28.774.273,14	29.602.961,48
	1.2 Tanaman Perkebunan	7.456.131,01	7.632.728,73
	1.3 Peternakan	9.009.563,08	9.341.723,33
	1.4 Kehutanan	772.918,65	975.927,50
	1.5 Perikanan	6.615.547,26	6.910.601,73
II	Pertambangan dan Penggalian	8.228.632,48	8.419.507
	2.1 Pertambangan Migas	1.831.926,85	1.798.951
	2.2 Pertambangan Non Migas	724.182,21	754.210,34
	2.3 Penggalian	5.672.523,42	5.866.345,97
III	Industri Pengolahan	92.171.192,46	98.017.056,57
	3.1 Makanan, Minuman, dan Tembakau	50.128.723,79	53.809.756,63
	3.2 Tekstil, Barang dari Kulit & Alas Kaki	2.776.688,62	2.823.991,38
	3.3 Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	1.965.794,68	2.015.165,51
	3.4 Kertas dan Barang Cetak	16.083.768,72	16.749.735,74
	3.5 Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet	9.020.876,59	9.918.950,24
	3.6 Semen dan Barang Galian Bukan Logam	3.137.569,11	3.208.264,78
	3.7 Logam Dasar Besi dan Baja	3.636.459,99	3.962.094,37
	3.8 Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	3.106.283,51	3.190.012,34
	3.9 Barang Lainnya	2.315.027,45	2.339.085,58
IV	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.932.084,07	5.238.431,69
	4.1 Listrik	3.569.246,08	3.869.377,14
	4.2 Gas Kota	1.048.365,99	1.037.149,12
	4.3 Air Bersih	314.472,00	331.905,43
V	Konstruksi	11.994.825,72	12.840.565,41
VI	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	116.645.214	128.375.498,61
	6.1 Perdagangan	95.198.460,50	105.151.262,62
	6.2 Hotel	3.345.093,500	3.589.853,75
	6.3 Restoran	18.101.660,35	19.634.382,24
VII	Pengangkutan dan Komunikasi	27.945.256,10	30.640.913,32
	a. Angkutan	13.856.861,63	14.959.763,81
	1. Angkutan rel	183.182,51	175.240,83
	2. Angkutan Jalan Raya	4.281.086,08	4.595.499,74
	3. Angkutan Laut	965.379,13	1.033.556,67
	4. Angkutan Penyeberangan	57.265,57	55.844,61
	5. Angkutan Udara	3.102.366,08	3.459.203,39
	6. Jasa Penunjang Angkutan	5.267.582,26	5.640.418,57
	b. Komunikasi	14.088.394,50	15.681.149,51
	1. Pos dan Telekomunikasi	0	0
	2. Jasa Penunjang Komunikasi	0	0
VIII	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	20.186.109,20	21.782.339,98
	8.1 Bank	5.153.252,96	5.689.640,29
	8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.751.977,74	3.028.945,58
	8.3 Jasa Penunjang Keuangan	0	0
	8.4 Sewa Bangunan	7.523.531,42	8.173.806,71
	8.5 Jasa Perusahaan	4.757.347,08	4.889.947,40
IX	jasa-jasa	32.251.530,10	33.884.591,32
	a. Pemerintahan Umum	10.041.907,15	10.474.699,67
	b. Swasta	22.209.623,40	23.409.891,65
	1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	2.781.581,99	2.956.494,73
	2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	1.284.814,80	1.379.648,59
	3. Jasa Perorangan dan RT	18.143.226,68	19.073.748,33
	Produk Domestik Regional Bruto	366.983.277,33	393.662.846,67

Sumber: BAPPEPROP Jatim, 2012

6. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PERKAPITA

a. PDRB Perkapita Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2012

ATAS DASAR HARGA KONSTAN

DENGAN MIGAS

1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (Juta Rupiah)	8 128 233,08	8 875 105,39	9 379 581,33
2. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	111,84	109,16	105,68
3. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Orang)	1 209 973	1 216 781	1 217 850
4. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA (Rupiah)	6 717 698	7 293 922	7 701 754

b. PDRB Perkapita Kabupaten Tuban Tahun 2008-2012

Atas Dasar Harga Konstan 2000

1 Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)	7,522,332.19	7,972,830.04	8,468,916.06	9,068,212.57	9,636,933.44
2 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Rupiah)	6,973,897.89	7,375,721.16	7,566,186.76	8,062,374.87	8,514,004.38
3 Pendapatan Regional (Juta Rupiah)	7,323,998.31	7,760,790.90	8,242,948.29	8,793,443.35	9,344,931.83
4 Pendapatan Regional Perkapita Rupiah	6,790,024.03	7,179,562.26	7,364,305.62	7,818,082.80	8,256,027.81
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	1,078,641	1,080,956	1,119,311	1,124,757	1,131,892

c. PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan Tahun 2008-2012

II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN (TAHUN 2000)

1	Produk Domestik Regional Bruto	<i>Juta Rp.</i>	5.448.146	5.792.095	6.191.066	6.625.823	7.098.169
2	Penyusutan	<i>Juta Rp.</i>	261.511	278.021	297.171	318.040	340.712
3	Produk Domestik Regional Neto	<i>Juta Rp.</i>	5.186.635	5.514.075	5.893.895	6.307.784	6.757.457
4	Pajak Tak Langsung Neto	<i>Juta Rp.</i>	17.434	18.535	19.811	21.203	22.714
5	Produk Regional Neto Biaya Faktor/Pendapatan Regional	<i>Juta Rp.</i>	5.169.201	5.495.540	5.874.084	6.286.581	6.734.743
6	Penduduk Pertengahan Tahun	<i>Jiwa</i>	1.189.614	1.189.615	1.179.059	1.185.693	1.193.725
7	PDRB Per Kapita	<i>Rp.</i>	4.579.759	4.868.882	5.250.854	5.588.144	5.946.234
8	Pendapatan Regional Per Kapita	<i>Rp.</i>	4.345.276	4.619.595	4.982.010	5.302.031	5.641.787

d. PDRB Perkapita Kabupaten Jombang Tahun 2008-2012

II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000

1.	PDRB (Juta Rp.)	5.673.483,59	5.972.302,39	6.327.278,13	6.759.495,41	7.230.304,36
2.	PDRB Perkapita (Rp.)	4.772.462	4.993.814	5.262.177	5.567.473	5.938.356
3.	Pendapatan Regional (Juta Rp.)	5.555.388,23	5.850.083,60	6.200.954,08	6.603.952,09	7.095.748,58
4.	Pendapatan Regional Perkapita (Rp.)	4.673.122	4.891.620	5.157.117	5.459.635	5.827.843
5.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	1.188.796	1.195.940	1.202.407	1.209.596	1.217.580

e. PDRB Perkapita Kabupaten Mojokerto Tahun 2009-2012

II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN

1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	<i>Juta Rupiah</i>	7.400.477,40	7.902.291,18	8.458.152,89	9.067.744,89
2.	Penyusutan	<i>Juta Rupiah</i>	725.074,35	774.240,41	828.701,91	888.427,72
3.	Produk Domestik Regional Neto (PDRN)/ Atas dasar Harga Pasar	<i>Juta Rupiah</i>	6.675.403,05	7.129.050,77	7.629.450,98	8.179.317,17
4.	Pajak Tak Langsung Neto	<i>Juta Rupiah</i>	384.997,20	411.103,20	440.020,96	471.733,94
5.	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional	<i>Juta Rupiah</i>	6.290.405,85	6.716.947,57	7.189.430,03	7.707.583,23
6.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	<i>Jiwa</i>	1.014.587	1.027.001	1.031.213	1.039.477
7.	PDRB per kapita	<i>Rupiah</i>	7.294.078,68	7.694.531,15	8.202.139,51	8.723.372,32
8.	Pendapatan Regional per kapita	<i>Rupiah</i>	6.199.956,94	6.540.351,54	6.971.818,65	7.414.866,55

7. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bojonegoro 2012

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Pereempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mangomulyo	12 678	12 808	25 486
2. Ngraho	26 317	25 733	30 447
3. Tambakrejo	30 738	30 447	61 185
4. Ngambon	6 716	6 613	13 329
5. Sekar	15 407	15 287	30 694
6. Bubulan	8 483	8 527	17 010
7. Gondang	14 408	14 239	28 647
8. Temayang	20 788	20 453	41 241
9. Sugihwaras	26 878	26 250	53 128
10. Kedungadem	47 393	46 627	94 020
11. Kepohbaru	37 496	36 015	73 511
12. Baureno	45 368	43 933	89 301
13. Kanor	33 621	33 246	66 867
14. Sumberejo	39 981	39 541	79 522
15. Balen	36 186	35 652	71 838
16. Sukosewu	24 487	23 651	48 138
17. Kapas	29 045	28 066	57 111
18. Bojonegoro	49 576	49 950	99 526
19. Trucuk	22 563	22 349	44 912
20. Dander	47 567	46 757	94 324
21. Ngasem	34 511	33 830	68 341
22. Kalitidu	27 977	27 464	55 441
23. Malo	18 014	17 959	35 973
24. Purwosari	16 883	16 985	33 868
25. Padangan	25 818	25 540	51 358
26. Kasiman	17 836	17 687	35 523
27. Kedewan	7 325	7 392	14 717
28. Gayam	"	"	"
Jumlah	742 181	730 684	1 472 865

Sumber : Kab. Bojonegoro Dalam Angka 2013

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tuban Tahun 2009-2012

Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
	(1)	(2)	
1. Kenduruan	15.606	15.398	31.004
2. Bangilan	26.672	26.441	53.113
3. Senori	23.432	23.314	46.746
4. Singgahan	22.567	22.585	45.152
5. Montong	29.072	27.874	56.946
6. Parengan	30.574	30.415	60.989
7. Soko	45.714	45.154	90.868
8. Rengel	32.754	32.428	65.182
9. Grabagan	20.830	20.740	41.570
10. Plumpang	43.480	43.283	86.763
11. Widang	28.838	28.665	57.503
12. Palang	45.598	45.607	91.205
13. Semanding	57.515	58.769	116.284
14. Tuban	46.056	47.739	93.795
15. Jenu	28.149	27.972	56.121
16. Merakurak	29.976	30.180	60.156
17. Kerek	35.156	35.698	70.854
18. Tambakboyo	21.956	21.780	43.736
19. Jatirogo	30.990	30.468	61.458
20. Bancar	30.249	30.540	60.789
Jumlah/Total 2012	645.264	645.130	1.290.394
Jumlah/Total 2011	630.576	628.240	1.258.816
Jumlah/Total 2010	620.006	617.707	1.237.713
Jumlah/Total 2009	561.363	577.689	1.139.052

Sumber: Kab. Tuban Dalam Angka 2013

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012

No.	Kecamatan/ Distrikt	Laki- Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total	Rasio Jenis Kelamin/ Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sukorame	10.943	10.793	21.736	101,39
2.	Bluluk	10.528	10.809	21.337	97,40
3.	Ngimbang	22.986	22.956	45.942	100,13
4.	Sambeng	25.197	24.858	50.055	101,36
5.	Mantup	22.030	22.157	44.187	99,43
6.	Kembangbahu	24.802	24.663	49.465	100,56
7.	Sugio	29.066	28.863	57.929	100,70
8.	Kedungpring	28.348	28.022	56.370	101,16
9.	Modo	23.819	23.666	47.485	100,65
10.	Babat	42.803	42.363	85.066	101,28
11.	Pucuk	23.580	23.505	47.085	100,32
12.	Sukodadi	26.934	27.378	54.312	98,38
13.	Lamongan	33.243	34.046	67.289	97,64
14.	Tikung	21.926	21.926	43.852	100,00
15.	Sarinejo	12.391	12.268	24.659	101,00
16.	Deket	22.081	21.851	43.932	101,05
17.	Glagah	20.813	20.284	41.097	102,61
18.	Karangbinangun	19.580	19.488	39.068	100,47
19.	Turi	26.719	26.276	52.995	101,69
20.	Kalitengah	16.732	16.685	33.417	100,28
21.	Karanggeneng	20.756	20.847	41.603	99,56
22.	Sekaran	20.587	20.265	40.852	101,59
23.	Maduran	15.603	15.593	31.196	100,06
24.	Laren	23.398	23.190	46.588	100,90
25.	Solekuro	19.299	19.138	38.437	100,84
26.	Paciran	45.514	45.090	90.604	100,94
27.	Bondong	33.854	33.967	67.821	99,67
Jumlah / Total		643.532	640.847	1.284.379	100,42
Tahun / Year 2011		643.262	662.636	1.305.898	97,08
Tahun / Year 2010		750.167	749.804	1.499.971	100,05

Sumber: Kab. Lamongan Dalam Angka 2013

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
		(a)	(b)	(c)	
010. Bandar Kedung Mulyo	16.927	27.659	26.698	54.357	96,53
020. Parak	17.885	30.973	30.457	61.430	98,33
030. Gudo	19.314	30.989	30.835	61.824	99,50
040. Diwek	35.378	60.479	58.750	119.229	97,14
050. Ngoro	26.534	43.650	42.630	86.280	97,66
060. Mojowarno	30.910	52.006	49.986	101.992	96,12
070. Barong	18.837	30.969	30.248	61.217	97,67
080. Wongsalam	12.074	18.680	18.467	37.147	98,86
090. Mojotengah	27.204	44.296	43.025	87.321	97,13
100. Sambito	28.792	47.078	45.551	92.629	96,76
110. Jegeran	22.047	37.977	36.493	74.470	96,09
120. Ponorongan	21.478	35.877	34.951	70.828	97,42
130. Jombang	49.185	77.691	78.035	155.726	100,44
140. Megalah	14.271	21.823	21.608	43.431	99,01
150. Tembela	18.618	29.161	29.023	58.184	99,53
160. Kesamban	23.638	37.697	36.863	74.560	97,79
170. Kudu	10.805	16.466	16.325	32.791	99,14
171. Ngusikan	7.378	11.792	11.743	23.535	99,58
180. Ploso	14.146	22.706	22.371	45.077	98,52
190. Kabuh	14.509	22.117	22.584	44.701	102,11
200. Plandaan	13.819	20.555	20.465	41.020	99,56
Jumlah	443.946	720.641	707.108	1.427.749	98,12
2011	395.045	649.350	640.985	1.290.335	98,71

Sumber : Kab. Jombang Dalam Angka 2013

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2010-2012

Kecamatan <i>District</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>	
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01. Jatilejo	22.440	21.955	44.395	102,21	
02. Gondang	22.433	22.231	44.664	100,91	
03. Pacet	29.652	29.558	59.210	100,32	
04. Trawas	15.660	15.759	31.419	99,37	
05. Ngoro	40.793	40.935	81.728	99,65	
06. Pungging	39.113	38.790	77.903	100,83	
07. Kutorejo	33.118	32.341	65.459	102,40	
08. Mojosari	40.517	39.464	79.981	102,67	
09. Bangsal	26.650	26.037	52.687	102,35	
10. Mojoanyar	25.948	25.299	51.247	102,57	
11. Dlanggu	28.884	28.699	57.583	100,64	
12. Puri	39.123	38.618	77.741	101,31	
13. Trowulan	39.326	38.485	77.811	102,19	
14. Sooko	39.311	38.470	77.781	102,19	
15. Gedeg	30.539	30.218	60.757	101,06	
16. Kemlagi	30.972	30.913	61.885	100,19	
17. Jetis	44.114	43.239	87.353	102,02	
18. Dawarblandong	26.842	27.301	54.143	98,32	
Jumlah/Total					
	2012	575.435	568.312	1.143.747	101,25
	2011	559.793	553.028	1.112.821	101,22
	2010	547.322	541.310	1.088.632	101,11

Sumber : Kab. Mojokerto Dalam Angka 2013



8. JARAK ANTAR KABUPATEN (km)

Jarak Antar Kab/ Kota di Jawa Timur

	Surabaya	Gresik	Sidoarjo	Mojokerto	Jombang	Bojonegoro	Lamongan	Tuban	Magetan	Ponorogo	Pacitan	Kediri	Nganjuk	Tulungagung	Blitar	Trenggalek	Malang	Pasuruan	Probolinggo	Lumajang	Bondowoso	Situbondo	Jember	Banyuwangi	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Surabaya	0	18	23	48	79	108	45	103	169	181	193	188	276	123	119	154	167	186	88	60	99	145	191	194	197	288	28	90	123	175
Gresik	18	0	41	67	97	90	27	85	187	190	211	216	294	141	137	172	185	204	107	78	117	163	200	212	215	306	46	108	141	193
Sidoarjo	23	41	0	72	102	131	68	126	192	204	216	221	298	145	142	177	144	208	66	37	76	122	168	171	174	265	51	113	146	188
Mojokerto	48	67	72	0	30	115	57	110	120	132	144	149	227	74	70	105	118	137	86	61	100	146	182	185	188	289	77	139	172	224
Jombang	79	97	102	30	0	85	80	81	90	102	114	119	197	44	40	75	88	107	119	91	130	176	222	225	228	319	107	169	202	254
Bojonegoro	108	90	131	115	85	0	63	65	110	78	112	139	217	129	125	160	173	192	197	168	207	253	298	202	305	396	136	198	231	283
Lamongan	45	27	68	57	80	63	0	58	177	187	201	206	284	131	127	162	175	194	134	105	144	190	236	239	242	333	73	135	168	220
Tuban	103	95	126	110	82	65	58	0	172	184	196	201	279	126	122	157	170	189	191	163	202	248	284	297	300	391	131	193	226	278
Magetan	169	187	192	128	90	110	177	182	0	32	24	29	107	78	50	108	122	82	178	181	220	266	312	315	338	407	127	250	292	344
Ngawi	181	199	264	132	102	78	189	184	32	0	34	61	139	90	62	121	134	114	190	193	232	278	324	327	330	42	408	271	304	356
Magetan	193	211	216	144	114	113	201	190	24	34	0	53	131	102	74	133	146	106	202	205	244	290	336	330	342	433	221	383	316	368
Ponorogo	188	216	221	148	119	139	206	201	29	61	53	0	78	115	79	84	117	52	195	210	249	211	341	344	347	438	226	283	321	373
Pacitan	276	294	298	227	197	217	284	179	107	139	131	78	0	180	157	149	182	117	270	213	352	276	390	421	358	462	364	386	399	451
Kediri	123	141	146	47	44	129	131	126	78	90	102	115	180	0	28	31	44	63	100	156	194	217	386	289	299	383	151	213	246	296
Nganjuk	119	137	142	70	40	125	127	122	50	62	74	79	157	28	0	59	72	96	128	131	170	216	282	285	288	359	147	209	242	294
Tulungagung	154	172	177	105	75	160	162	157	109	121	132	84	149	31	59	0	33	32	111	66	205	205	297	300	303	384	182	244	277	329
Blitar	167	185	144	118	86	173	175	170	122	134	146	117	182	44	72	33	0	64	78	133	172	172	264	267	270	361	195	257	290	342
Trenggalek	196	204	206	137	107	182	194	180	82	144	106	52	117	63	90	32	64	0	142	197	236	236	328	331	334	425	214	276	350	361
Malang	88	107	66	88	119	197	134	192	178	190	202	195	290	100	26	111	78	142	0	55	94	117	194	189	192	259	117	179	212	264
Pasuruan	60	78	37	61	91	168	105	163	181	193	205	210	313	155	131	166	133	197	55	0	39	85	131	134	137	228	86	150	183	235
Probolinggo	90	117	76	100	130	207	144	202	220	132	244	240	352	194	170	205	172	236	94	39	0	46	92	95	96	189	127	189	222	274
Lumajang	145	163	122	149	176	253	190	248	266	276	290	221	276	217	216	205	172	236	117	85	46	0	105	140	172	177	173	235	268	320
Bondowoso	191	209	168	192	222	299	236	294	312	324	336	341	390	386	362	297	264	328	186	131	92	105	0	35	32	126	219	281	314	396
Situbondo	194	212	171	195	225	302	239	297	345	327	339	344	421	289	208	300	267	331	167	134	95	140	35	0	67	94	222	284	317	389
Jember	197	215	174	196	228	305	242	300	318	330	342	347	358	292	268	303	270	334	192	137	96	72	32	97	0	105	225	287	320	372
Banyuwangi	288	306	285	289	319	396	333	391	407	421	433	436	462	383	389	394	361	425	239	228	189	177	136	94	105	0	316	378	411	463
Bangkalan	28	46	51	77	107	136	73	131	197	200	221	226	304	151	147	182	195	214	117	86	127	173	219	222	225	316	0	62	96	147
Sampang	90	108	113	139	169	196	135	193	259	271	283	288	366	213	209	144	257	276	179	150	189	235	281	294	287	375	62	0	33	85
Pamekasan	123	141	145	172	202	231	168	226	292	304	316	321	399	246	242	277	290	309	212	183	222	268	314	317	320	411	95	33	0	52
Sumenep	175	193	196	224	254	283	220	278	344	356	368	373	451	286	294	329	342	361	264	235	274	320	396	369	372	463	147	85	52	0

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2013

**9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN BOJONEGORO

BAB III

PEMBERDAYAAN KANDUNGAN LOKAL

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS diwajibkan menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, yang mencakup :

1. Kategori Tenaga Profesional :
 - a. Memusatkan proses perekrutan di daerah
 - b. Sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang dan pelatihan kerja
 - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan proporsional serta adil kepada tenaga kerja warga Bojonegoro melalui sistem seleksi kompetitif
2. Kategori Tenaga terlatih :
 - a. Mendata lewat Dinas Tenaga Kerja tentang ketersediaan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi;
 - b. Memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai potensi penduduk lokal;
 - c. Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal tenaga lokal melalui sistem seleksi kompetitif.
3. Kategori Tenaga kasar/buruh :

Rekrutmen dilaksanakan dengan memberi proporsi 100% (seratus persen) dari tenaga lokal Bojonegoro.

10. PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAKORWIL yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :

- a. BAKORWIL-I berkududukan di Kota Madiun ;
- b. BAKORWIL-II berkududukan di Kabupaten Bojonegoro;
- c. BAKORWIL-III berkududukan di Kota Malang ;
- d. BAKORWIL-IV berkududukan di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

- a. Wilayah Kerja BAKORWIL - I, meliputi:
Kota Madiun; Kabupaten Madiun ; Kabupaten Magetan; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Blitar; Kota Blitar dan Kabupaten Nganjuk.
- b. Wilayah Kerja BAKORWIL -II, meliputi:
Kabupaten Bojonegoro; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Tuban; Kabupaten Jombang; Kabupaten Mojokerto; Kota Mojokerto; Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.
- c. Wilayah Kerja BAKORWIL - III, meliputi :
Kota Malang; Kabupaten Malang; Kota Batu; Kabupaten Pasuruan; Kota Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kota Probolinggo; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Jember; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.
- d. Wilayah Kerja BAKORWIL - IV, meliputi :
Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kota Surabaya; Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

11. LUAS PANEN PADI PER KABUPATEN/ KOTA

Luas Panen Padi per Kabupaten/Kota
Harvested Area of Paddy per Regency/Municipality

No.	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Luas Panen Padi (Ha)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012 Akap
1	Pecahan	28.627	32.786	32.147	33.770	33.965	36.202
2	Ponorogo	69.434	61.187	61.136	62.787	61.054	63.336
3	Trenggales	23.087	26.386	26.766	31.801	26.810	27.401
4	Tulungagung	38.440	42.049	44.811	47.298	47.237	47.607
5	Bitar	44.709	43.677	44.967	62.686	66.190	46.664
6	Kadiri	64.966	63.644	64.811	66.342	63.887	61.233
7	Malang	60.471	62.462	66.344	66.171	66.611	66.901
8	Lumajang	64.489	69.216	70.768	72.376	67.203	74.772
9	Jember	138.661	138.661	162.370	163.231	166.107	166.668
10	Banyuwangi	113.676	109.962	115.620	122.122	116.463	116.186
11	Bondowoso	63.762	63.218	69.890	69.638	66.769	66.969
12	Bludondo	31.310	33.166	37.746	38.483	36.644	44.067
13	Probolinggo	60.319	49.667	61.860	62.136	66.717	66.464
14	Pasuruan	61.067	78.726	88.663	87.679	66.646	66.643
16	Siboharjo	26.779	26.103	32.421	31.274	26.779	31.022
16	Majokerto	42.369	46.220	47.672	49.641	46.671	46.366
17	Jombang	63.226	66.466	66.361	72.666	71.642	76.774
18	Nganjuk	76.666	72.623	73.642	76.796	76.407	66.166
18	Madun	62.612	63.663	71.666	66.667	71.613	73.136
20	Wagatan	37.666	36.673	41.616	42.360	42.466	43.606
21	Ngawi	103.168	100.669	109.410	112.636	106.674	116.261
22	Bojonegara	106.664	117.662	124.766	147.417	137.606	133.634
23	Tuban	72.661	66.360	76.262	76.664	66.371	63.263
24	Lamongan	126.436	129.440	134.143	140.763	123.671	143.149
26	Gresik	60.426	60.621	66.616	63.109	62.616	66.203
26	Bangkalan	36.632	41.622	44.139	44.366	47.666	46.166
27	Sampang	32.666	33.366	33.617	36.716	34.437	43.160
28	Pamekasan	21.347	22.666	22.369	22.637	23.430	26.343
28	Sumanep	21.261	26.121	26.179	21.672	23.632	26.166
71	Kota Kadiri	1.263	1.277	1.660	2.126	2.677	1.664
72	Kota Bitar	1.664	1.666	1.661	2.126	2.206	1.762
73	Kota Malang	2.217	2.101	2.129	2.016	2.036	1.669
74	Kota Probolinggo	2.034	1.666	1.623	1.662	2.199	2.277
75	Kota Pasuruan	2.679	2.674	2.399	2.261	2.613	2.666
76	Kota Majokerto	901	932	886	970	970	1.066
77	Kota Madun	2.377	2.346	2.472	2.472	2.379	2.444
78	Kota Sumbawa	1.642	1.602	2.666	2.300	2.699	2.206
79	Kota Batu	1.116	1.006	1.206	1.210	1.640	626
	Jawa Timur	1.726.046	1.774.664	1.904.630	1.963.663	1.826.796	1.876.719

Sumber : Badan Pusat Statistik

12. PRODUKSI PADI PER KABUPATEN /KOTA

Produksi Padi per Kabupaten/Kota
Production of Paddy per Regency/Municipality

No.	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Produksi Padi (Ton)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012 Atap
1	Pacitan	112.147	137.903	163.568	153.328	160.269	172.688
2	Ponorogo	350.674	398.225	379.983	398.144	300.603	406.678
3	Trenggalek	106.412	136.704	147.250	165.343	148.379	167.222
4	Tulungagung	209.937	261.908	270.917	271.668	266.658	299.755
5	Blitar	217.758	255.273	249.874	314.297	326.780	303.332
6	Kediri	324.358	304.154	310.289	314.594	300.889	306.175
7	Malang	330.422	416.396	429.372	407.564	444.990	416.607
8	Lumajang	334.611	375.280	393.773	396.411	357.761	408.635
9	Jember	733.853	775.613	847.251	851.598	813.514	968.505
10	Banyuwangi	638.244	644.809	717.193	788.742	695.962	732.262
11	Bondowoso	253.703	286.984	339.140	336.968	304.025	317.439
12	Situbondo	176.341	201.898	219.226	234.719	213.330	266.005
13	Probolinggo	238.154	253.615	267.718	276.932	304.197	302.572
14	Pasuruan	471.077	487.554	567.672	574.679	585.734	571.510
15	Sidoarjo	176.172	175.867	201.815	187.963	157.883	203.573
16	Mojokerto	248.875	288.246	302.586	309.678	276.301	306.881
17	Jombang	357.858	409.156	417.939	483.979	380.819	482.628
18	Nganjuk	391.992	437.901	406.668	429.348	411.107	507.670
19	Madiun	350.711	398.644	428.595	409.094	399.810	499.679
20	Magetan	220.018	222.836	247.985	277.488	262.993	288.756
21	Ngawi	561.738	592.565	647.264	668.024	574.224	708.694
22	Bojonegoro	586.313	693.972	814.778	900.328	675.697	808.112
23	Tuban	405.264	434.454	463.223	493.106	454.177	576.738
24	Lamongan	740.272	798.703	831.955	838.596	601.505	856.890
25	Gresik	291.670	301.649	342.826	330.864	272.323	386.435
26	Bangkalan	150.165	221.891	250.622	225.277	263.693	259.861
27	Sampang	150.234	197.639	175.677	217.984	213.821	245.536
28	Pamekasan	90.623	126.000	110.666	130.991	147.232	178.801
28	Sumenep	101.849	153.499	212.003	177.575	176.175	160.365
71	Kota Kediri	7.501	9.435	11.454	13.890	15.040	9.770
72	Kota Blitar	8.966	10.257	10.001	12.429	8.474	10.899
73	Kota Malang	11.170	9.953	12.365	11.087	11.523	12.563
74	Kota Probolinggo	9.710	8.095	10.573	11.596	9.627	13.178
75	Kota Pasuruan	13.737	15.409	15.035	12.299	13.825	19.830
76	Kota Mojokerto	4.577	4.474	4.445	4.785	4.683	6.674
77	Kota Madiun	11.771	12.897	16.001	12.523	14.150	17.135
78	Kota Surabaya	7.412	8.149	14.760	12.842	13.120	13.776
79	Kota Batu	6.140	6.766	6.623	7.037	5.250	4.878
	Jawa Timur	9.402.029	10.474.773	11.259.085	11.643.773	10.576.543	12.198.707

Sumber : Badan Pusat Statistik

13. SURAT KETERANGAN DARI TEMPAT RISET

a. Surat Keterangan Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : •Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik • Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis -
Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik • Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : ~~2795~~..UN.10.3/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala BANGKESBANGPOL Kabupaten Bojonegoro

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/ survey bagi mahasiswa:

Nama : Trias Ayu Novitasari
Alamat : Desa Sugiharwas RT/RT: 18/03 Kecamatan Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro
NIM : 10503060011028
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan
Tema : Identifikasi Sektor Unggulan Kab. Bojonegoro
Lamanya : 3 bulan
Peserta : 1 orang

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih.

Malang, Februari 2014

a.n. Dekan

Ketua Prodi Ilmu Perencanaan Pembangunan



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

b. Surat Keterangan Selesai Riset dari Bappeda Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JL. Pahlawan No. 09 Telp . (0353) 881422 Fax. (0353) 889741
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 1338 / 202.412 / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si
2. NIP. : 19680224 199403 1 006
3. Jabatan : Plt Kepala BAPPEDA

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : TRIAS AYU NOVITASARI
2. NIM : 105030600111028
3. Fak./Jurusan : Ilmu Administrasi/ Perencanaan Pembangunan (Universitas Brawijaya Malang)
4. Judul Survey : Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Bojonegoro

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro sejak tanggal 10 Maret s/d 10 Juni 2014 selesai

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bojonegoro, 17 Juni 2014

Plt. KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680224 199403 1 006

c. Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Pahlawan No: 7 Telepon (0353) 887193
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/ 089 /412.47/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Fajar Yudhy Hartanto
NIP : 19680606 199403 1 014
Pangkat/ Gol : Pembina Tk I / (IVb)
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Menerangkan bahwa :

Nama : Trias Ayu Novitasari
NIM : 105030600111028
Program Studi : S1 Perencanaan Pembangunan
Universitas : Universitas Brawijaya Malang
Alamat Tinggal : Jl Airlangga No. 229 RT18 RW3 Desa Sugiharwas
Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (wawancara dan pengumpulan data) guna penyelesaian tugas akhir (Skripsi) yang dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemkab Bojonegoro terhitung mulai tanggal 10 Maret s/d 10 Juni 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 17 Juni 2014

**PIt. KEPALA DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Drs FAJAR YUDHY HARTANTO

Pembina TK I
NIP. 19680606 199403 1 014

d. Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PERTANIAN
Jl. Raya Sukowati Nomor 412 Telepon (0353) 881410
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 520 / III ○ /412.31/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BAMBANG SUTOPO, M.Si
NIP : 19650408 199003 1 014
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV. b)
Jabatan : Sekretaris
Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

Menerangkan bahwa :

Nama : Trias Ayu Novitasari
NIM : 105030600111028
Alamat Tinggal : Jl. Airlangga No: 229 RT 18 RW 3
Desa Sugihwaras, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (wawancara dan pengumpulan data) guna penyelesaian tugas akhir (Skripsi) yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 10 Maret s/d 10 Juni 2014.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 17 Juni 2014

an. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Ir. BAMBANG SUTOPO, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19650408 199003 1 014



CURRICULUM VITAE

Nama : Trias Ayu Novitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 105030600111028
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 29 Nopember 1991
Pendidikan : 1. SD Negeri 1 Baureno Tamat Tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Baureno Tamat Tahun 2007
3. SMA Negeri 3 Bojonegoro Tamat Tahun 2010

